

BUKU I



KONDISI EKSISTING ARSITEKTUR SPBE

Pemerintah Kabupaten Tapin



2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Adanya amanat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengenai implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (IPPD). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Masyarakat & Swasta). Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE.



Implementasi SPBE dievaluasi oleh evaluator dari Kemenpan-RB setiap tahunnya dengan tujuan untuk memastikan kelangsungan dari implementasi SPBE. Dalam menanggapi amanat SPBE ini Pemerintah Kabupaten Tapin berinisiatif untuk mengimplementasikan SPBE dengan semangat *continuous improvement*. Salah satu tahapan yang dilakukan yaitu dengan menyusun kajian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Tujuan dari disusunnya kajian perencanaan ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tapin dalam mengimplementasikan SPBE selama 5 tahun kedepan agar dalam pelaksanaannya seluruh instansi internal yang terlibat dapat saling bersinergi. Selain itu juga dengan adanya perencanaan ini diharapkan dapat meningkatkan penilaian indeks SPBE secara bertahap.

Strategi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menyusun Arsitektur dan Peta Rencana ini agar dapat meningkatkan indeks SPBE ialah dengan berpedoman pada Perpres 95/2018 dan mengikuti Visi, Misi, Tujuan & Strategi SPBE Nasional serta berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu dengan melakukan *reverse engineering* terhadap parameter dari 47 indikator yang menjadi pokok dari evaluasi SPBE. Sehingga dapat dipastikan apa yang tertuang dalam kajian ini telah memenuhi dengan konteks evaluasi dalam SPBE. Dalam Arsitektur SPBE ini mencakup domain Tata Kelola, Manajemen, Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data & Informasi, Arsitektur Layanan Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Keamanan Informasi dan Audit TIK dengan harapan agar Pemerintah Kabupaten Tapin dapat menghadirkan transformasi digital dalam layanan internal maupun publiknya.

Daftar Isi

Daftar Isi	3
Bab I Pendahuluan	5
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Maksud dan Tujuan	9
1.3. Landasan Hukum	9
1.4. Landasan Teori	11
1. TOGAF 9.1 Framework untuk Arsitektur Data, Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan TIK	11
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	11
3. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	14
Bab II Visi, Misi Strategi SPBE	22
2.1. Visi RPJMD	23
2.2. Strategi Peningkatan SPBE	24
2.1. Inisiatif Strategis SPBE	27
Bab III Analisa Kondisi Eksisting SPBE	29
3.1. Kebijakan & Management	30
A. Kebijakan	30
B. Manajemen	30
3.2. Arsitektur Proses Bisnis	31
A. Katalog Proses Bisnis	32
3.3. Arsitektur Data	153
A. Katalog Entitas Data	153
B. Analisis Diagram Data	164
3.4. Arsitektur Layanan	166
A. Diagram Layanan SPBE yang menjadi indikator dalam evaluasi	166
1. Layanan Perencanaan	167
2. Layanan Penganggaran	171
3. Layanan Keuangan	173
4. Layanan Pengelolaan Aset	177
5. Layanan Kepegawaian	181
6. Layanan Kinerja Pegawai	186
7. Layanan Kearsipan Dinamis	189
8. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	193
9. Layanan Pengaduan Publik	196
10. Layanan Data Terbuka	198

11.	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	200
12.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	202
13.	Layanan JDIH	204
14.	Layanan Perizinan	207
15.	Layanan Kesehatan	209
16.	Layanan Kependudukan	210
B.	Katalog Layanan	220
C.	Analisis Diagram Layanan	227
3.5.	Arsitektur Aplikasi Eksisting	229
A.	Katalog Aplikasi Eksisting	229
B.	Analisis Diagram Aplikasi Eksisting	240
C.	Diagram Integrasi Antar Aplikasi	242
3.6.	Arsitektur Infrastruktur	245
A.	Infrastruktur SPBE	245
1.	Colocation Server	245
a.	Teknologi	245
2.	Jaringan Intra Daerah	249
a.	Jaringan Data Lokal (LAN) Diskominfo	249
b.	Jaringan Internet	249
c.	Jaringan Nirkabel (WiFi)	249
d.	Perangkat Jaringan	249
3.	Sistem Penghubung Layanan Daerah	250
3.7.	Arsitektur Keamanan	250
Bab IV Analisa Kesenjangan SPBE		251
4.1.	Analisa Kesenjangan SPBE	252

Bab I

Pendahuluan

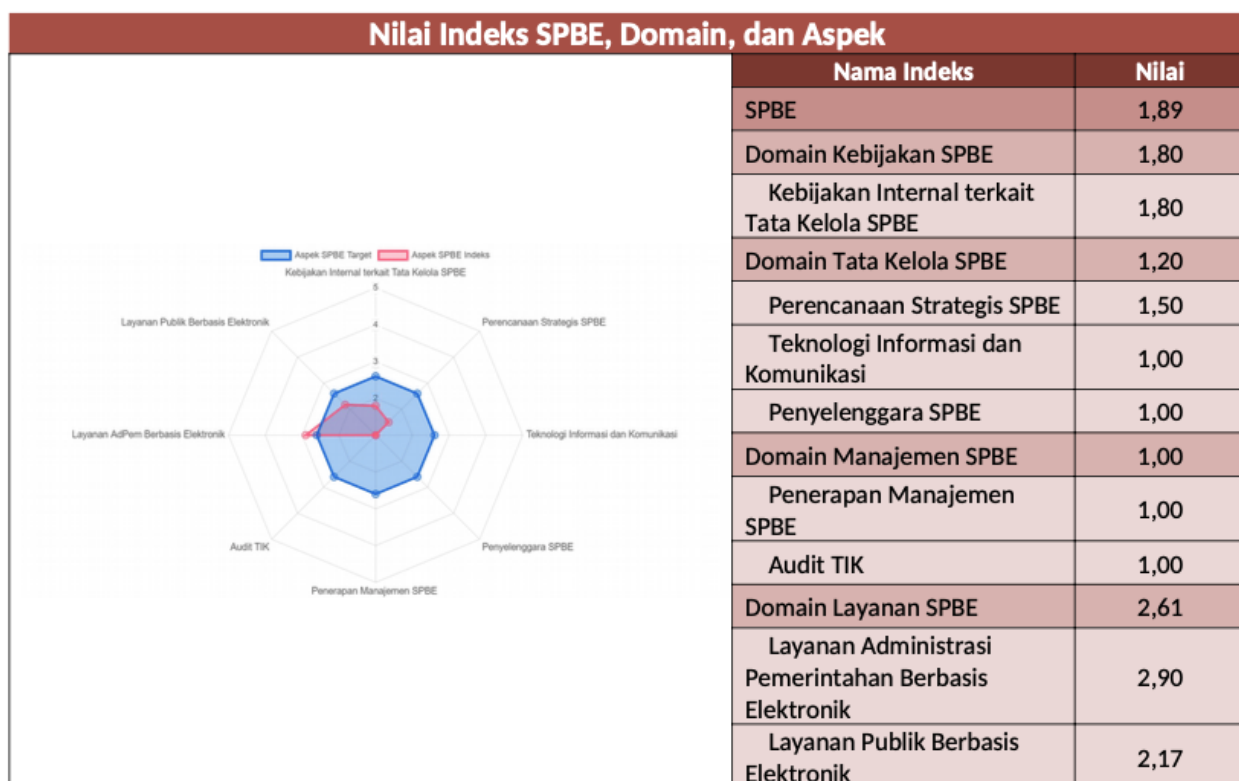
1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah menunjukkan keberadaan dan fungsi infrastruktur digital yang sangat esensial dan strategis. Menyadari hal itu, pemerintah mengalokasikan belanja untuk kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebesar 30,5 triliun rupiah pada APBN Tahun Anggaran (TA) 2021. Jumlah tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (*service delivery*). Pemerintah mencoba mengoptimalkan belanja tersebut agar dapat mencapai target Pembangunan Nasional dengan *better spending* yaitu penghematan belanja infrastruktur TIK dan Aplikasi Umum yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan oleh evaluator eksternal Kemenpan-RB dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan sebanyak 47 indikator. Instrumen ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sejalan dengan hal tersebut Kabupaten Tapin juga telah melakukan evaluasi SPBE secara eksternal dengan hasil sebagai berikut ini.

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. TAPIN

1,89
(Cukup)



Gambar 1.1.1 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kab. Tapin Tahun 2021

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 di Pemerintah Kabupaten Tapin ini akan menjadi baseline dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Dokumen ini disusun menentukan strategi yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan

SPBE secara menyeluruh di Pemerintah Kabupaten Tapin khususnya di masa mendatang serta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan internal dan publik dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Urgensi dalam mengimplementasikan SPBE dengan baik tentunya sejalan dengan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 dimana visi yang merupakan gambaran kondisi atau keadaan Kabupaten Tapin yang akan diwujudkan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

“Bersama Mewujudkan Tapin Maju Sejahtera dan Agamis”

Berdasarkan dengan visi tersebut, maka perlu adanya peningkatan pelayanan internal pemerintah dan pelayanan publik dalam rangka untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Revolusi Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan, penetrasi teknologi yang serba disruptif, menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai konsekuensi dari fenomena Internet untuk segalanya *Internet of Things* (IoT). Adanya pemanfaatan IoT ini menghasilkan kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data *basic*. Atas dasar ini maka pelayanan pemerintahan perlu didukung dengan teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi (*Cloud Computing*), hingga kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).

Selain itu, Perubahan pada lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup, dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah ini menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan. Perubahannya ini dapat diimplementasikan pada reformasi di kegiatan pemerintahan. Di satu sisi dalam mewujudkan reformasi organisasi pemerintah, perlu didukung dengan komitmen dan perencanaan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu upaya guna mewujudkan tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah dengan memodernisasi birokrasi pemerintahan yang memfokuskan pada orientasi pelayanan publik kepada kepuasan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan TIK. Saat ini pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan (*Smart Government*) atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimanfaatkan untuk mendukung fungsi dan layanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Aktivitas pemerintahan ini sudah sejak lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat. Baik Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai “*Leading Sector*” di bidang pengembangan dan pengelolaan TIK maupun SKPD-SKPD lain saat ini menggunakan berbagai sistem informasi yang mana pertumbuhannya terus meningkat. Ketidakteraturan dalam proses pengembangan aplikasi SPBE yang digunakan menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan proses pemeliharaan. Hal ini dikarenakan belum tersedianya kebijakan, panduan dan standar yang jelas terkait dengan implementasi *Smart Government* sehingga membuat proses pengelolaan tidak berjalan dengan efektif.



Gambar 1.1.2. Kondisi Anggaran TIK Pemerintah (Sumber: Paparan Kemenkeu)

Faktanya, kini masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, birokrasi yang cepat dan efektif sehingga Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi tuntutan yang harus diterapkan dengan serius. Pelayanan yang dikenal dengan sebutan SPBE diharapkan mampu mendongkrak kualitas Pemerintah Kabupaten Tapin kepada masyarakat karena dapat menghemat waktu layanan, percepatan proses, menyederhanakan alur birokrasi, serta adanya transparansi terhadap proses, biaya, maupun waktu pelayanan.



Gambar 1.1.3. Kebijakan Pengembangan SPBE

Untuk memastikan SPBE baik yang akan dibangun maupun yang sudah ada benar-benar mendukung proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin berjalan dengan baik maka

diperlukan suatu kajian terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini terkait dengan proses pembangunan dan pemeliharaan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dapat terselesaikan dan mampu diimplementasikan dengan baik menyesuaikan proses bisnis yang ada di Pemerintah Kabupaten Tapin. Dalam rangka membangun panduan yang dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Tapin menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah. Harapan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan adanya kajian ini maka pengembangan SPBE dapat dilaksanakan dengan lebih sistematis dan terpadu. Keterpaduan ini ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah di Kabupaten Tapin 2022-2026 ini adalah:

1. Penyusunan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Tapin dalam mengimplementasikan SPBE di Kabupaten Tapin.
2. Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kab. Tapin agar implementasi SPBE di Kabupaten Tapin menjadi lebih terarah dan komprehensif.
3. Terciptanya perencanaan dan implementasi SPBE di Kabupaten Tapin yang terintegrasi antar pemangku kepentingan.

Sementara tujuan dari penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah di Kabupaten Tapin 2022-2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kerangka kerja (*framework*) tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien;
2. Memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kabupaten Tapin agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Menyusun dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Tapin 2022-2026 untuk peningkatan indeks SPBE di Kabupaten Tapin.

1.3. Landasan Hukum

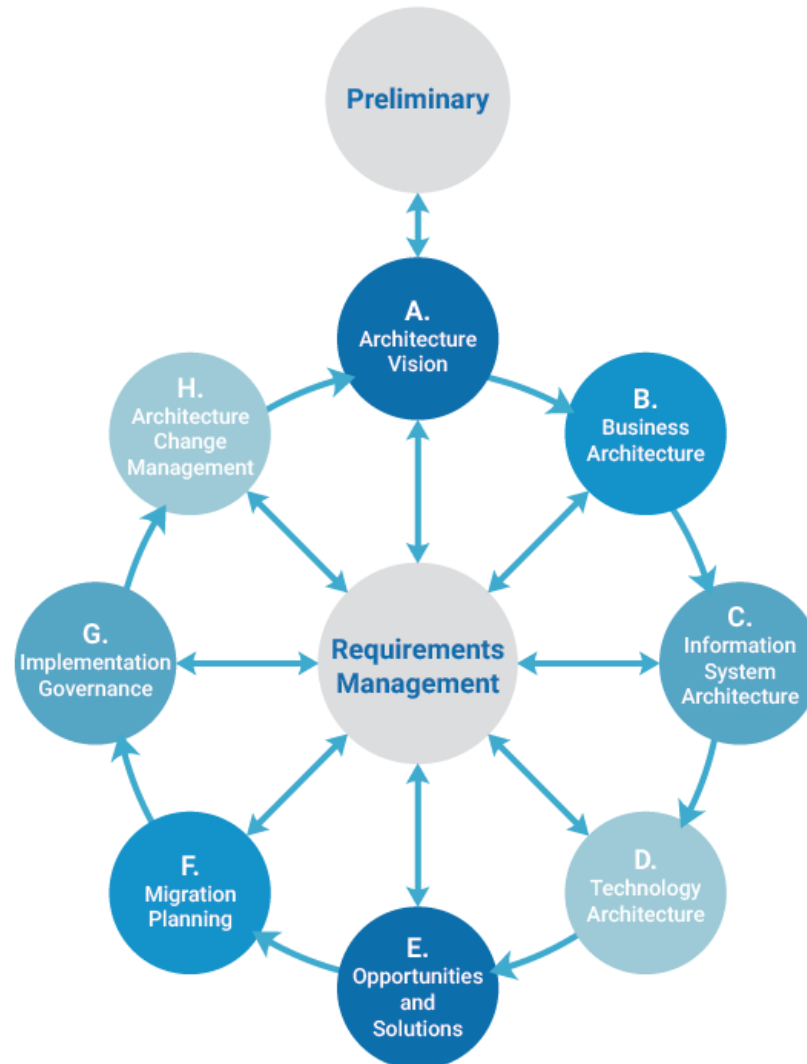
Landasan hukum dalam pekerjaan penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah di Kabupaten Tapin ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
11. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.
12. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57/kep/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;
14. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

1.4. Landasan Teori

1. TOGAF 9.1 Framework untuk Arsitektur Data, Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan TIK



Gambar 1.4.1 Tata Kelola (TOGAF)

Penyusunan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi mengadopsi dari konsep Arsitektur Pengembangan IT (*Architecture Development Method*) yang ada dalam framework TOGAF 9.1 konsep ini mendefinisikan arsitektur dimulai dengan mendefinisikan visi arsitektur dilanjutkan dengan menentukan arsitektur bisnis, arsitektur sistem dan data, arsitektur teknologi (infrastruktur TIK). Visi arsitektur yang dibangun harus mampu memenuhi tujuan dari perkembangan teknologi/kebijakan yang ingin diadopsi oleh pemerintah daerah di masa mendatang dan mempertimbangkan evaluasi atas arsitektur TIK yang telah dibangun sebelumnya.

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Merujuk kepada Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE pemerintah daerah agar SPBE menjadi terpadu dan diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah sehingga akan membentuk satu-kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

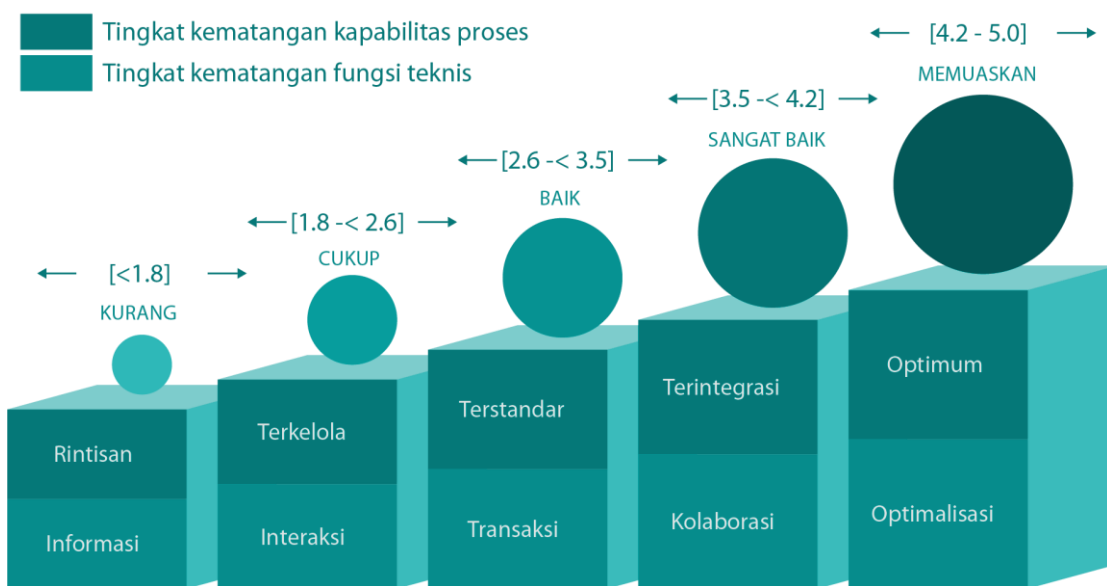


Gambar 1.4.2 Ruang Lingkup Arsitektur SPBE Nasional

Untuk mengimplementasikan Arsitektur SPBE Nasional, Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan SDM. Terdapat 3 tahapan penting dalam kesuksesan SPBE:

1. Perencanaan: Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kontrak.
2. Pelaksanaan: Manajemen Proyek/Kegiatan, Manajemen Rekanan, dan Tim Pelaksana (jumlah & kompetensi).
3. Evaluasi: Monitoring dan evaluasi setiap tahun untuk mengetahui capaian progress penerapan Arsitektur SPBE khususnya Roadmap, Kondisi permasalahan eksisting SPBE, Inisiatif perbaikan program.

Untuk mengetahui kondisi penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Tapin saat ini, dapat menggunakan konsep tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.



Gambar 1.4.3 Tingkat Kematangan Proses SPBE

Tabel 1.4.1 Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE

Tingkat (Level)	Karakteristik
1 - Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi. Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep.
2 - Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi. Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral.
3 - Terstandarisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait. Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.
4 - Terintegrasi	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara Kuantitatif. Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut.
5 - Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan.

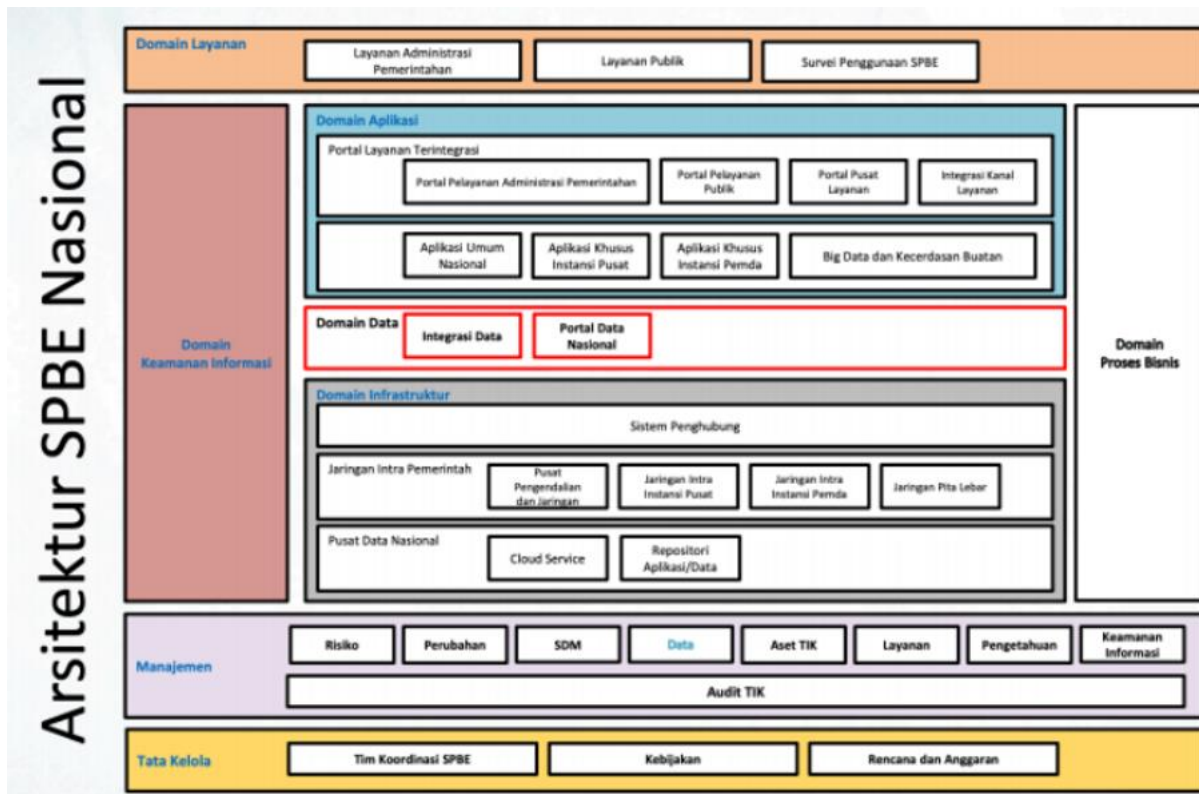
Tabel 1.4.2 Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE

Tingkat (Level)	Kriteria
1 - Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 - Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 - Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan.

4 - Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain.
5 - Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

3. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Dalam Perpres 95/2018 telah dijelaskan mengenai Arsitektur SPBE Nasional sebagai pedoman dalam menyusun Arsitektur SPBE Daerah. Keberhasilan penerapan SPBE Daerah dalam penyelenggaraan alur hidup pemerintahan perlu didukung oleh arsitektur yang terperinci sehingga dapat menjadi acuan pengembangan SPBE dalam institusi. Gambaran arsitektur SPBE dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.4.4 Domain Arsitektur SPBE

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi antara Proses bisnis, Data dan informasi, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengembangan dari keenam arsitektur tersebut didukung oleh Manajemen yang dilaksanakan dengan baik dan Tata kelola yang disusun secara rinci dan terarah.

Setiap layer arsitektur yang disebutkan dalam kerangka SPBE memiliki detail masing-masing yang kemudian saling terkait dan dapat mendorong keberhasilan domain-domain lainnya. Dalam proses penyusunan dokumen arsitektur SPBE, langkah awal yang harus disusun terlebih dahulu adalah bidang Tata Kelola. Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan kegiatan dalam institusi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan dari institusi. Dalam hal ini, pengembangan arsitektur SPBE bidang Tata

Kelola dimulai dengan membentuk Tim Koordinasi, menentukan Kebijakan, dan menyusun Rencana dan Anggaran.

Langkah kedua dalam membangun arsitektur SPBE adalah dengan menentukan bentuk-bentuk Manajemen yang akan dilakukan dalam proses pengembangan SPBE di Institusi. Manajemen adalah sebuah cara untuk mengarahkan Tim Koordinasi SPBE untuk mencapai tujuan utama melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Hal-hal yang harus ditentukan dalam proses penentuan manajemen adalah

- Manajemen Resiko
- Manajemen Keamanan Informasi
- Manajemen SDM
- Manajemen Pengetahuan
- Manajemen Data
- Manajemen Layanan
- Manajemen Aset TIK
- Manajemen Perubahan

Selanjutnya manajemen yang dilakukan mencakup hal-hal dalam mendukung pengembangan arsitektur lainnya. Arsitektur yang akan dikelola pertama adalah arsitektur proses bisnis, disini proses bisnis dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan alur organisasi internal dan pelayanan paling efektif dan efisien. Dari arsitektur proses bisnis selanjutnya dapat menjadi acuan dalam pembangunan aplikasi pada domain aplikasi. Dalam hal ini, aplikasi dapat berupa portal yang mendukung layanan dan telah terintegrasi dengan berbagai aplikasi lain. Adapun beberapa portal layanan yang dapat dibangun antara lain:

- Portal layanan administrasi pemerintah
- Portal layanan publik
- Portal pusat layanan
- Integrasi kanal layanan

Aplikasi juga dapat dibagi berdasarkan penggunaannya, yaitu aplikasi yang bersifat khusus dan bersifat umum. Adapun berdasarkan penggunaannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Aplikasi umum nasional
- Aplikasi khusus instansi pusat
- Aplikasi khusus instansi pemda
- Big data dan kecerdasan buatan

Pembangunan aplikasi tentunya mengacu pada data yang dikelola oleh instansi, dalam arsitektur data memungkinkan adanya integrasi data dan portal data nasional.

Arsitektur lain yang dikembangkan dalam proses pembangunan SPBE adalah arsitektur infrastruktur, arsitektur ini dikembangkan sebagai bentuk penanganan alat yang digunakan dalam pelayanan yang ada. Dalam arsitektur infrastruktur dibagi menjadi 2 jenis yaitu infrastruktur Jaringan dan infrastruktur pusat data daerah. Infrastruktur jaringan adalah hal-hal mengenai pengelolaan koneksi yang ada pada instansi. Termasuk didalamnya ada diantaranya

pusat pengendalian dan jaringan, jaringan intra instansi pusat, jaringan intra instansi pemda, dan jaringan pita lebar. Selanjutnya untuk pusat data nasional didalamnya ada cloud services dan repositori aplikasi / data.

Arsitektur terakhir yang digunakan dalam peningkatan layanan instansi adalah arsitektur keamanan informasi, dimana aspek keamanan informasi adalah aspek-aspek yang dilingkupi dan melingkupi keamanan informasi dalam sebuah sistem informasi. Aspek-aspek ini adalah: privasi/kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi dari semua pihak, kecuali yang memiliki kewenangan.

Kelima arsitektur yang telah disebutkan (arsitektur proses bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan informasi) adalah domain yang dikelola untuk meningkatkan layanan yang dimiliki oleh instansi. Pengembangan domain layanan tentunya mengedepankan aspek kemudahan bagi pengguna layanan tersebut. Adapun klasifikasi layanan yang diberikan oleh instansi pusat adalah layanan administrasi pemerintahan, layanan publik, dan survey penggunaan aplikasi SPBE.

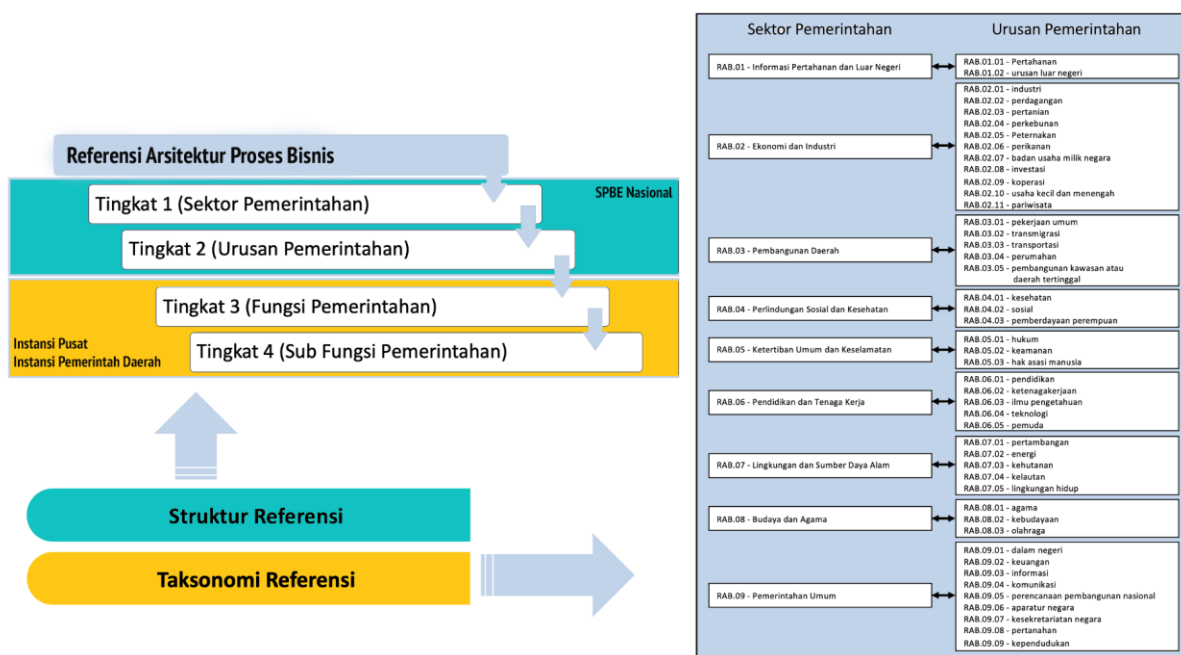
Dalam Arsitektur SPBE Nasional terdapat enam komponen berupa taksonomi referensi arsitektur di tingkat nasional yang menjadi acuan oleh setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD), dalam setiap domain arsitektur SPBE Nasional, sesuai dengan struktur yang telah ditentukan.

A. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur proses bisnis berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Sektor pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Fungsi pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- d. Sub fungsi pemerintahan yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur proses bisnis dijelaskan pada gambar berikut ini.



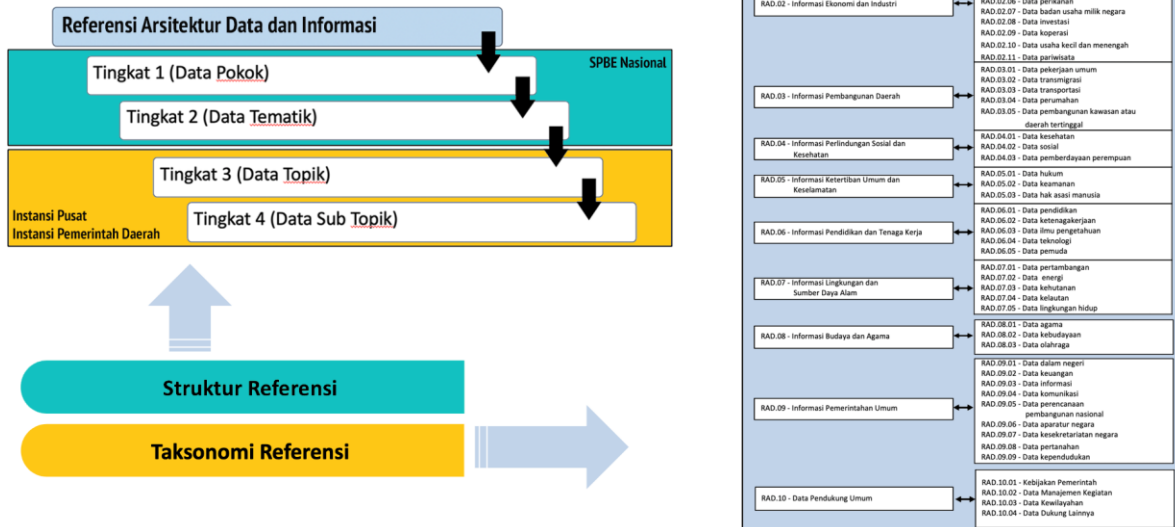
Gambar 1.4.5 Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

B. Struktur Referensi Arsitektur Data (RAD)

Dalam domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses bisnis pemerintahan, selanjutnya diklasifikasikan substansi data dan informasi kedalam tingkatan struktur domain arsitektur data dan informasi berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- Data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Data topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- Data sub topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur data dijelaskan pada gambar berikut ini.



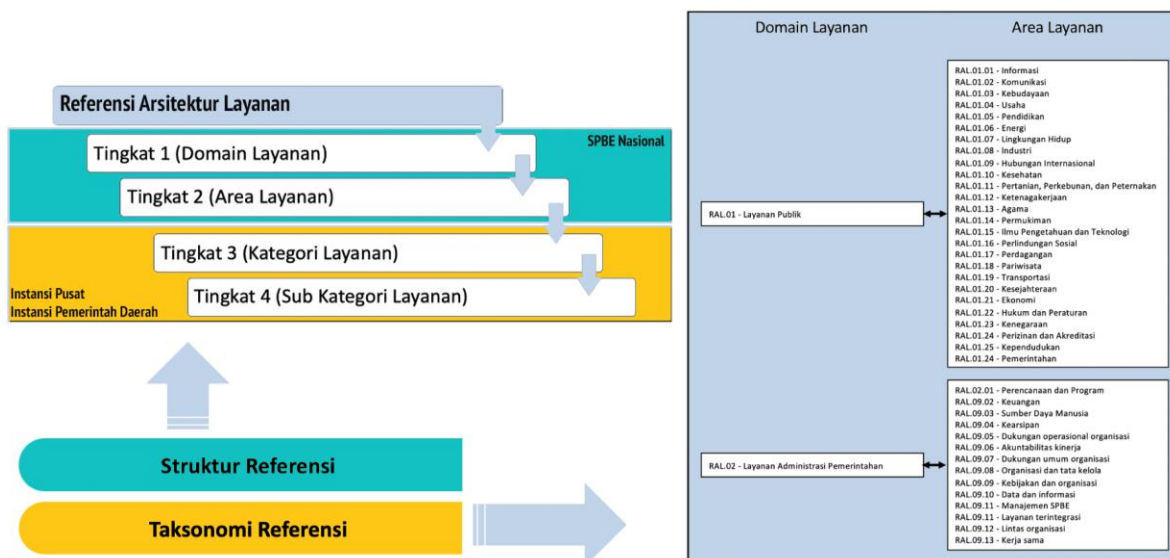
Gambar 1.4.6 Taksonomi Referensi Arsitektur Data (RAD)

C. Struktur Referensi Arsitektur Proses Layanan (RAL)

Dalam domain arsitektur layanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi layanan SPBE ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur layanan SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Kategori layanan, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga);
- Sub kategori layanan, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur layanan dijelaskan pada gambar berikut ini.



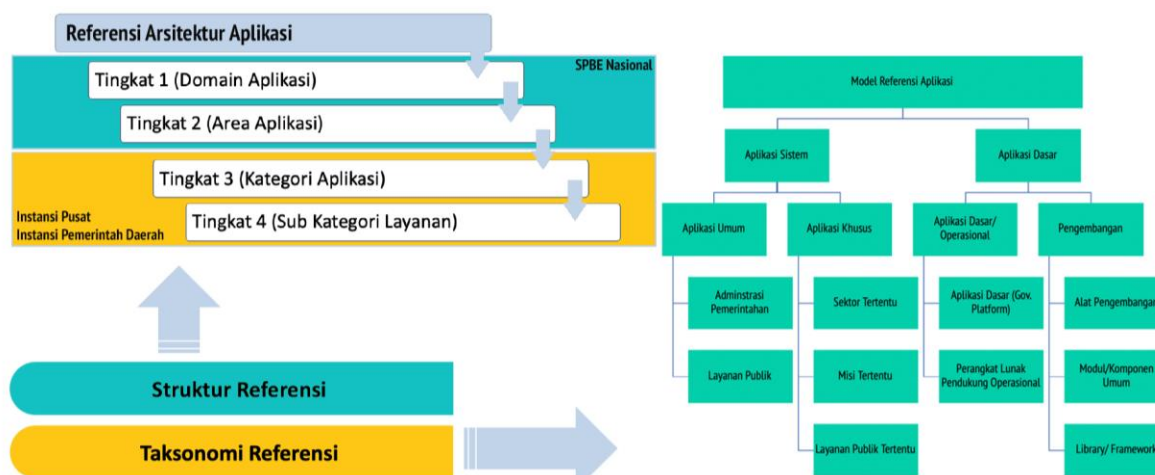
Gambar 1.4.7 Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan (RAL)

D. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

Dalam domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi aplikasi SPBE ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur aplikasi SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Area aplikasi, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga);
- Sub kategori aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur aplikasi dijelaskan pada gambar berikut ini.



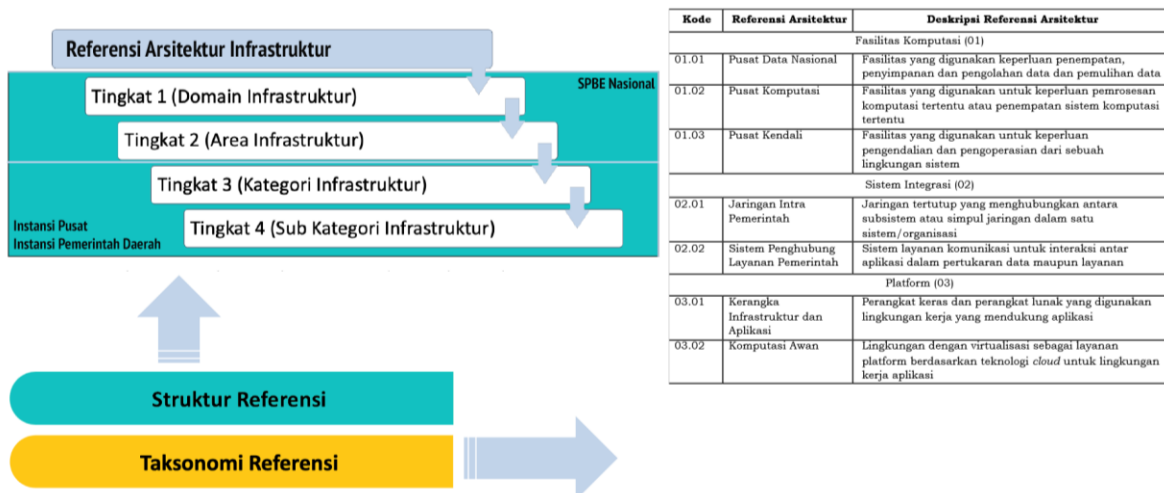
Gambar 1.4.8 Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

E. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur infrastruktur SPBE berupa 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- Domain infrastruktur, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Area infrastruktur, yang menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Kategori infrastruktur, yang menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur infrastruktur dijelaskan pada gambar berikut ini.



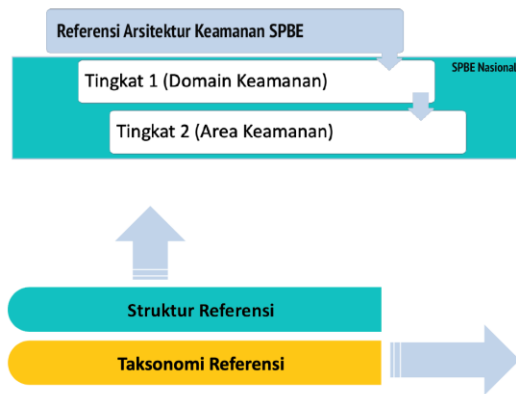
Gambar 1.4.9 Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

F. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan Informasi

Dalam domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur keamanan SPBE berupa 2 (dua) tingkat, yaitu:

- Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan pertimbangan kelayakan keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur keamanan informasi dijelaskan pada gambar berikut ini.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Standar atau Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk penerapan Keamanan SPBE.
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan Keamanan SPBE.
01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan Keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk menanggulangi, memulihkan dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
Kelakuan Keamanan (03)		
03.01	Kelakuan Keamanan Aplikasi Umum	Uji kelakuan keamanan terhadap aplikasi umum yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar aplikasi umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelakuan keamanan.
03.02	Kelakuan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Uji kelakuan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Infrastruktur SPBE Nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelakuan keamanan.

Gambar 1.4.10 Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan Informasi (RAK)

Bab II

Visi, Misi Strategi

SPBE

2.1. Visi RPJMD

Visi SPBE Nasional adalah

"Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja"

Visi SPBE Nasional perlu diselaraskan, disinkronisasikan, dan diharmonisasikan dengan visi dan misi SPBE Pemerintah Kabupaten Tapin.

Visi Pemerintah Kab. Tapin

"Bersama Mewujudkan TAPIN Maju, Sejahtera dan Agamis."

Dengan mengacu pada dua hal pondasi strategi dalam arsitektur dan peta jalan SPBE Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 berfokus pada peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Dalam rangka mencapai visi SPBE, maka misi SPBE adalah:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen TIK yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM TIK.



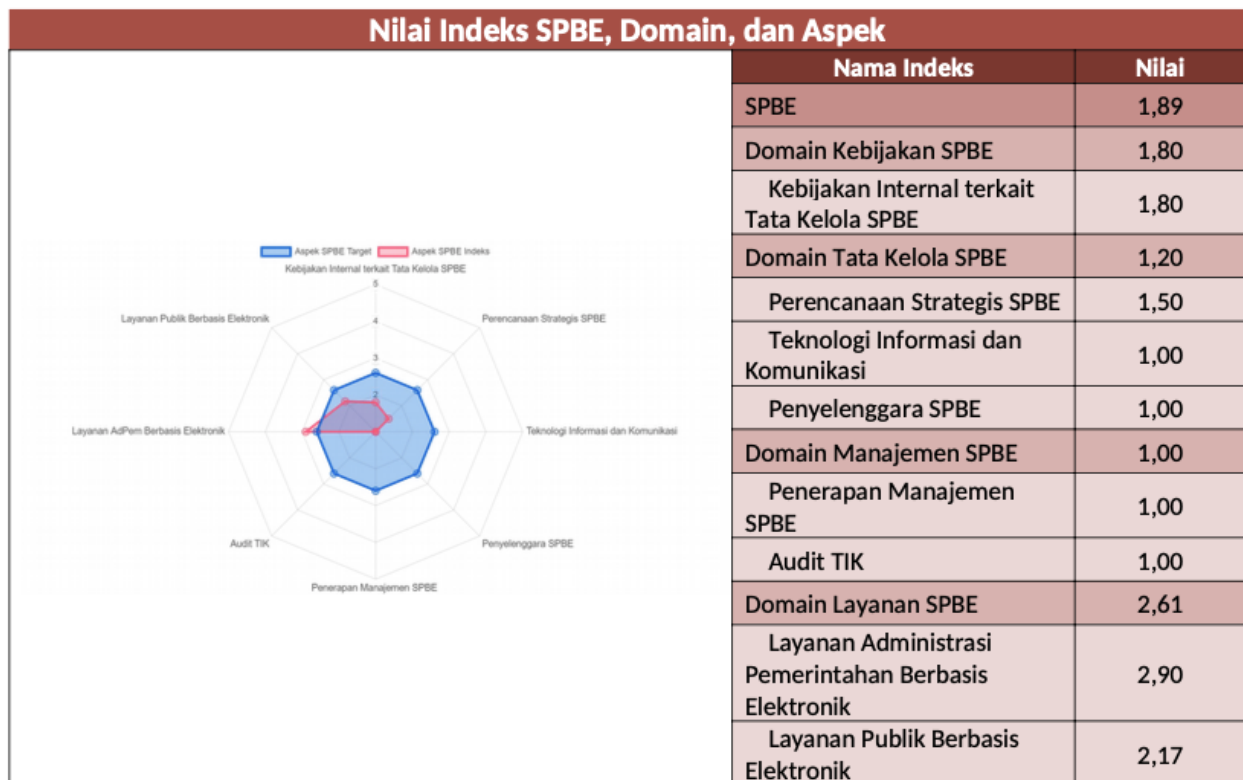
Gambar 2.1.1 Unsur-unsur dalam SPBE

2.2. Strategi Peningkatan SPBE

Berdasarkan dari hasil Evaluasi Indeks SPBE Kab. Tapin tahun 2021, Strategi Peningkatan Indeks SPBE yang perlu dituju yakni dengan meningkatkan seluruh domain yang meliputi: kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE agar bisa mencapai target level 3 (tiga).

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. TAPIN

1,89
(Cukup)



Gambar 2.2.1 Indeks SPBE Kabupaten Tapin

Jika dilihat pada nilai indeks diatas dapat disimpulkan bahwa selama ini belum seluruhnya perangkat daerah di Kabupaten Tapin aktif berkolaborasi dalam implementasi SPBE. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan indeks pada seluruh domain SPBE perlu dilakukan beberapa *best practices*.

Tabel 2.2.1 Peningkatan Indeks SPBE

No	Indikator	Peluang Peningkatan Indeks SPBE	Penanggung Jawab
1	Indikator 1 sampai 10 terkait Kebijakan SPBE	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan reuiu atas regulasi eksisting yang terkait SPBE, memastikan cakupannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam pedoman evaluasi SPBE. Regulasi telah diterapkan oleh seluruh perangkat daerah. Melakukan revisi / perbaiki regulasi SPBE Daerah sesuai dengan perkembangan regulasi SPBE dari Pusat. 	Tim Koordinator SPBE
2	Indikator 11-13 terkait Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Rencana Anggaran SPBE	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan reuiu atas regulasi eksisting yang terkait SPBE, memastikan cakupannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam pedoman evaluasi SPBE. Regulasi telah diterapkan oleh seluruh perangkat daerah. Melakukan revisi / perbaiki regulasi SPBE Daerah 	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Peluang Peningkatan Indeks SPBE	Penanggung Jawab
		sesuai dengan perkembangan regulasi SPBE dari Pusat. 4. Menuangkan substansi Peta Rencana SPBE ke dalam RKPD.	
3	Indikator 16 terkait Layanan Pusat Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan migrasi seluruh aplikasi internal ke Pusat Data / Server yang terpusat milik Pemkab Tapin yang dikelola oleh Diskominfo. 2. Server Pemkab Tapin terintegrasi dengan jaringan Pusat Data Nasional. 3. Melakukan evaluasi atas operasional Pusat Data milik Pemkab Tapin. 	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Indikator 17 terkait Jaringan Intra Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan konektivitas ke seluruh SKPD (Metro Area Network) yang terpusat di Diskominfo sebagai NOC nya. 2. Memasang MRTG pada jaringan MAN Kab Tapin. 3. Memastikan seluruh ruangan SKPD tercover radius Access Point. 4. Melakukan evaluasi atas operasional Jaringan Intra milik Pemkab Tapin. 	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Indikator 19 terkait Tim Koordinasi SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendefinisikan tugas dan fungsi, Program Kerja Tim Koordinasi SPBE sesuai yang tertuang dalam peta rencana. 2. Melakukan pembaharuan tugas dan fungsi Program Kerja Tim Koordinasi SPBE sesuai kondisi yang akan datang. 	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
6	Indikator 20 terkait Kolaborasi Penerapan SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kolaborasi dalam penerapan peta rencana SPBE dengan melibatkan seluruh perangkat daerah Pemkab. Tapin. 2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan peta rencana SPBE 	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
7	Indikator 21 - 28 terkait Manajemen SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji manajemen SPBE dan menerapkannya di lingkungan Pemkab. Tapin sesuai pedoman yang ditetapkan. 2. Melakukan kegiatan manajemen SPBE secara berkelanjutan. 3. Melakukan reuiu dan perbaikan atas penerapan manajemen SPBE. 	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Indikator 37 terkait Layanan Kearsipan Dinamis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan fitur grafik/chart jumlah persuratan berdasarkan jenis surat. 2. Integrasi dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE). 3. Melakukan monev atas kekurangan aplikasi kearsipan dinamis. 	Dinas Arsip dan Perpustakaan

No	Indikator	Peluang Peningkatan Indeks SPBE	Penanggung Jawab
9	Indikator 39 terkait Layanan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan fitur mekanisme penginputan bukti dukung oleh Auditee, Reviu tindak lanjut, persetujuan dan status monitoring pelaksanaan pengawasan. 2. Penambahan fitur grafik/chart jumlah kegiatan pengawasan berdasarkan jenis. 3. Integrasi dengan TTE. 4. Melakukan monev atas kekurangan Aplikasi SPIP. 	Inspektorat
10	Indikator 40 terkait Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan reviu atas pemanfaatan e-SAKIP Reviu. 2. Bersurat ke Kemenpan-RB terkait rekomendasi perbaikan fitur berdasarkan dari hasil reviu. 	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
11	Indikator 41 terkait Layanan Data Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan fitur upload data oleh masing-masing SKPD. 2. Penambahan fitur mekanisme persetujuan oleh Diskominfo untuk dipublikasikan. 3. Penambahan fitur grafik/chart jumlah berdasarkan bidang urusan pemerintahan. 4. Pengembangan berbasis CKAN agar dapat terintegrasi dengan Portal Data Nasional (https://data.go.id). 5. Melakukan monev atas kekurangan Open Data. 	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Indikator 44 terkait Layanan JDIH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan fitur pengajuan draft regulasi oleh SKPD. 2. Penambahan fitur mekanisme penelaahan, reviu, persetujuan draft dan status monitoring. 3. Penambahan fitur grafik/chart jumlah regulasi berdasarkan jenis. 4. Integrasi dengan JDIH Nasional (https://jdih.go.id). 5. Melakukan monev atas kekurangan JDIH. 	Sekretariat Daerah Bagian Hukum

2.1. Inisiatif Strategis SPBE

Berdasarkan telaah visi misi TIK dan analisa hasil survei diperoleh sebelas inisiatif sebagai prioritas pengembangan Layanan SPBE di Kabupaten Tapin yaitu:

1. Pembentukan Komite/Forum Manajemen SPBE;
2. Peningkatan kualifikasi dan jumlah SDM dengan kualifikasi TI secara terencana dan berkesinambungan;
3. Pengembangan Sistem Informasi guna mendukung implementasi layanan SPBE, antara lain:
 - a. Sistem Informasi Perencanaan
 - b. Sistem Informasi Penganggaran
 - c. Sistem Informasi Keuangan

- d. Sistem Informasi Pengadaan
- e. Sistem Informasi Kepegawaian
- f. Sistem Informasi Kearsipan
- g. Sistem Informasi Barang Milik Daerah
- h. Sistem Informasi Pengawasan Internal Pemerintah
- i. Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- j. Sistem Informasi Kinerja Pegawai
- k. Sistem Informasi Pengaduan Publik
- l. Sistem Informasi Data Terbuka
- m. Sistem Informasi Administrasi Internal lainnya
- n. Sistem Informasi Publik Sektor

Sistem Informasi ini minimal harus memenuhi syarat indeks layanan SPBE di level 4 (empat), dimana sistem informasi harus dapat terintegrasi dengan sistem informasi lain lain baik yang dikelola oleh internal pemda maupun yang dikelola oleh kementerian.

1. Melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan manajemen kinerja, layanan pengaduan publik, layanan perizinan, dan pelayanan publik lainnya yang berbasis elektronik, baik integrasi internal pemerintah daerah maupun integrasi dengan pemerintah pusat;
2. Melakukan analisis kelayakan operasional dan keamanan TIK;
3. Pengembangan platform integrasi aplikasi-aplikasi yang telah berjalan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta keterpaduan data primer (data utama milik unit kerja);
4. Menyediakan kebijakan implementasi TIK yang menyeluruh dan menjangkau seluruh SKPD seperti: SOP Pembangunan Aplikasi oleh pihak ketiga;
5. Penambahan dan peremajaan perangkat komputer dan perangkat pendukung.

Bab III

Analisa Kondisi

Eksisting SPBE

3.1. Kebijakan & Management

A. Kebijakan

Kabupaten Tapin telah menerapkan beberapa layanan untuk administrasi pemerintah maupun layanan publik sektoral, akan tetapi dalam pengembangan layanan SPBE selama ini belum didukung oleh kebijakan internal hal ini juga terlihat pada hasil evaluasi SPBE Kab. Tapin tahun 2021 untuk domain kebijakan indeksnya masih di angka 1.89 sehingga penilaian pengelolaan layanannya dinilai masih kurang maksimal. Atas dasar inilah dilakukan pemetaan mengenai pemenuhan kebijakan yang perlu ada dalam penerapan SPBE yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Mandatory Kebijakan SPBE Daerah

#	Mandatory	Keterangan
1	Kebijakan Tim koordinasi SPBE	Belum ada
2	Kebijakan Manajemen Data	Belum ada
3	Kebijakan Arsitektur SPBE	Belum ada
4	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Sudah ada
5	Kebijakan Layanan Pusat Data	Sudah ada
6	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Sudah ada
7	Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Belum ada
8	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Belum ada
9	Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi	Sudah ada
10	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Belum ada

Berdasarkan dari 10 Mandatory kebijakan SPBE yang perlu disusun saat ini baru terdapat 4 kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, Oleh karena itu kedepannya perlu menyusun kebijakan SPBE yang belum terakomodir.

B. Manajemen

Dalam pengembangan dan penerapan SPBE tentunya harus diimbangi juga dengan penerapan manajemennya guna memastikan operasional SPBE dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan ekspektasi, layanan SPBE tanpa adanya penerapan manajemen yang benar bisa berimplikasi pada pelayanan yang buruk meskipun sudah didukung oleh pemanfaatan teknologi

informasi. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi SPBE yakni: SDM (*people*) -> Manajemen (*process*) -> Layanan IT (*technology*). Atas dasar inilah dilakukan pemetaan mengenai pemenuhan penerapan manajemen yang perlu ada dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Mandatory Manajemen SPBE Daerah

	Mandatory	Keterangan
	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Belum Dilakukan
	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Belum Dilakukan
	Penerapan Manajemen Data	Belum Dilakukan
	Penerapan Manajemen Aset TIK	Belum Dilakukan
	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Belum Dilakukan
	Penerapan Manajemen Pengetahuan	Belum Dilakukan
	Penerapan Manajemen Perubahan	Belum Dilakukan
	Penerapan Manajemen Layanan Indikator SPBE	Belum Dilakukan

Berdasarkan dari 8 Mandatory Manajemen SPBE yang perlu dilakukan saat ini belum seluruhnya diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, Oleh karena itu kedepannya perlu menerapkan seluruh domain manajemen SPBE. Hal ini dirasa wajar dikarenakan saat ini belum seluruh domain manajemen ditetapkan pedomannya oleh instansi pusat terkait, dari 8 manajemen tersebut baru 4 manajemen yang sudah ditetapkan pedoman manajemen SPBE-nya, yaitu: Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan, Manajemen Perubahan dan Manajemen Data.

3.2. **Arsitektur Proses Bisnis**

Arsitektur Proses bisnis menggambarkan kondisi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah sesuai ketugasan dan fungsi berdasarkan dokumen SOTK. pemetaan proses bisnis di masing-masing Perangkat Daerah ini selanjutnya dianalisis untuk dipetakan ke dalam taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis SPBE Nasional. Arsitektur Proses Bisnis ini terdiri atas: Katalog Proses Bisnis dan Matriks Proses Bisnis x Aktor yang ditunjukkan sebagai berikut ini.

A. Katalog Proses Bisnis

Katalog Proses Bisnis ini berisi deskripsi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi bupati. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap peta proses bisnis pemerintah kabupaten Tapin. Dimana untuk Level 1 & 2 nya mengacu pada kodefikasi arsitektur proses bisnis SPBE nasional dan untuk level 3 hingga level 6 mengacu pada proses bisnis daerah.

Tabel 3.2.1 Daftar Proses Bisnis yang dikelola oleh SKPD di Kabupaten Tapin

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-01.01.01.02. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.01. Pengelolaan PAUD	TPN-01.01.01.02. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.01.03. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.01. Pengelolaan PAUD	TPN-01.01.01.03. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.01.04. Pengadaan Perlengkapan PAUD	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.01. Pengelolaan PAUD	TPN-01.01.01.04. Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.01.05. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.01. Pengelolaan PAUD	TPN-01.01.01.05. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.01.06. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.01. Pengelolaan PAUD	TPN-01.01.01.06. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Dinas Pendidikan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-01.01.01.07. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.01. Pengelolaan PAUD	TPN-01.01.01.07. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.01.08. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.01. Pengelolaan PAUD	TPN-01.01.01.08. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.01.09. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.01. Pengelolaan PAUD	TPN-01.01.01.09. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.01.10. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.01. Pengelolaan PAUD	TPN-01.01.01.10. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.01.11. Pengelolaan Dana BOP PAUD	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.01. Pengelolaan PAUD	TPN-01.01.01.11. Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.02.01. Penambahan Ruang Kelas Baru	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.02. Pengelolaan Pendidikan SD, SMP	TPN-01.01.02.01. Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.02.02. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.02. Pengelolaan Pendidikan SD, SMP	TPN-01.01.02.02. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-01.01.02.03. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.02. Pengelolaan Pendidikan SD, SMP	TPN-01.01.02.03. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.02.04. Pembangunan Perpustakaan Sekolah	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.02. Pengelolaan Pendidikan SD, SMP	TPN-01.01.02.04. Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.02.05. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.02. Pengelolaan Pendidikan SD, SMP	TPN-01.01.02.05. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.02.06. Pengadaan Perlengkapan Sekolah	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.02. Pengelolaan Pendidikan SD, SMP	TPN-01.01.02.06. Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.02.07. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.02. Pengelolaan Pendidikan SD, SMP	TPN-01.01.02.07. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.02.08. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.02. Pengelolaan Pendidikan SD, SMP	TPN-01.01.02.08. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.02.09. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.02. Pengelolaan Pendidikan SD, SMP	TPN-01.01.02.09. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.02.10. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.02. Pengelolaan Pendidikan SD, SMP	TPN-01.01.02.10. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Satuan Pendidikan							
TPN-01.01.02.11. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.02. Pengelolaan Pendidikan SD, SMP	TPN-01.01.02.11. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.02.12. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.02. Pengelolaan Pendidikan SD, SMP	TPN-01.01.02.12. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan
TPN-01.01.02.13. Pengelolaan Dana BOS Sekolah	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	TPN-01.01.02. Pengelolaan Pendidikan SD, SMP	TPN-01.01.02.13. Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Dinas Pendidikan
TPN-01.02.01.01. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.01. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	TPN-01.02.01.01. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
TPN-01.02.01.02. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.01. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	TPN-01.02.01.02. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
TPN-01.02.01.03. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.01. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	TPN-01.02.01.03. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-01.02.01.04. Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitas SDM Unggul	TPN-01.02.01. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	TPN-01.02.01.04. Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
TPN-01.02.01.05. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitas SDM Unggul	TPN-01.02.01. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	TPN-01.02.01.05. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
TPN-01.02.01.06. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitas SDM Unggul	TPN-01.02.01. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	TPN-01.02.01.06. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
TPN-01.02.01.07. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitas SDM Unggul	TPN-01.02.01. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	TPN-01.02.01.07. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
TPN-01.02.01.08. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitas SDM Unggul	TPN-01.02.01. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	TPN-01.02.01.08. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
TPN-01.02.02.01. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitas SDM Unggul	TPN-01.02.02. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	TPN-01.02.02.01. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
TPN-01.02.02.02. Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.02. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	TPN-01.02.02.02. Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
TPN-01.02.03.01. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.03. Pembinaan Perpustakaan	TPN-01.02.03.01. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
TPN-01.02.03.02. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.03. Pembinaan Perpustakaan	TPN-01.02.03.02. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
TPN-01.02.03.03. Pengembangan Bahan Pustaka	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.03. Pembinaan Perpustakaan	TPN-01.02.03.03. Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
TPN-01.02.03.04. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.03. Pembinaan Perpustakaan	TPN-01.02.03.04. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
TPN-01.02.03.05. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.03. Pembinaan Perpustakaan	TPN-01.02.03.05. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-01.02.03.06. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01. Pendidikan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.03. Pembinaan Perpustakaan	TPN-01.02.03.06. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
TPN-01.02.05.01. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.05. Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	TPN-01.02.05.01. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
TPN-01.02.05.01. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.05. Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	TPN-01.02.05.01. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
TPN-01.02.05.01. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.05. Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	TPN-01.02.05.01. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Tenaga Kerja
TPN-01.02.06.01. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.06. Penempatan Tenaga Kerja	TPN-01.02.06.01. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja
TPN-01.02.06.02. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.06. Penempatan Tenaga Kerja	TPN-01.02.06.02. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Dinas Tenaga Kerja
TPN-01.02.06.03. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.06. Penempatan Tenaga Kerja	TPN-01.02.06.03. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Tenaga Kerja

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-01.02.06.04. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.06. Penempatan Tenaga Kerja	TPN-01.02.06.04. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja
TPN-01.02.06.05. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.06. Penempatan Tenaga Kerja	TPN-01.02.06.05. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Tenaga Kerja
TPN-01.02.06.06. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.06. Penempatan Tenaga Kerja	TPN-01.02.06.06. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja
TPN-01.02.06.07. Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.06. Penempatan Tenaga Kerja	TPN-01.02.06.07. Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Tenaga Kerja
TPN-01.02.06.08. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.06. Penempatan Tenaga Kerja	TPN-01.02.06.08. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Dinas Tenaga Kerja
TPN-01.02.06.09. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.06. Penempatan Tenaga Kerja	TPN-01.02.06.09. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Dinas Tenaga Kerja
TPN-01.02.07.01. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.07. Hubungan Industrial	TPN-01.02.07.01. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian	Dinas Tenaga Kerja

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
TPN-01.02.07.02. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.07. Hubungan Industrial	TPN-01.02.07.02. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja
TPN-01.02.07.03. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.07. Hubungan Industrial	TPN-01.02.07.03. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dinas Tenaga Kerja
TPN-01.02.07.04. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.07. Hubungan Industrial	TPN-01.02.07.04. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja
TPN-01.02.07.05. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.07. Hubungan Industrial	TPN-01.02.07.05. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	Dinas Tenaga Kerja

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
(satu) Daerah Kabupaten/Kota						(satu) Daerah Kabupaten/Kota	
TPN-01.02.07.06. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02. Ketenagakerjaan	TPN-01. Peningkatan aksesibilitas kualitas pendidikan dan SDM yang unggul	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	TPN-01.02.07. Hubungan Industrial	TPN-01.02.07.06. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja
TPN-02.01.01.01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.02. Pembangunan Puskesmas	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.02. Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.03. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.03. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.04. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.04. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-02.01.01.05. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.05. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.06. Pengadaan Obat, Vaksin	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.06. Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.07. Pengadaan Bahan Habis Pakai	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.07. Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.08. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.08. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.09. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.09. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-02.01.01.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-02.01.01.19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.22. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.22. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.23. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.23. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.24. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.24. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.25. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.25. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-02.01.01.26. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.26. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.27. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.27. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.28. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.28. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.29. Operasional Pelayanan Puskesmas	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.29. Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.30. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.30. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.31. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.31. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.32. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.32. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-02.01.01.33. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.33. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.01.34. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.01.34. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.02.01. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.02. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	TPN-02.01.02.01. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.02.02. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.02. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	TPN-02.01.02.02. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.03.01. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.03. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	TPN-02.01.03.01. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-02.01.03.02. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.03. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	TPN-02.01.03.02. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.03.03. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.03. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	TPN-02.01.03.03. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
TPN-02.01.03.04. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-02. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-02.01.03. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	TPN-02.01.03.04. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
TPN-03.01.01.01. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	TPN-03.01.01.01. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Umum Daerah
TPN-03.01.01.01. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	TPN-03.01.01.01. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rumah Sakit Umum Daerah
TPN-03.01.01.02. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01.02. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Rumah Sakit Umum Daerah

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
TPN-03.01.01.02. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01.02. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
TPN-03.01.01.02. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01.02. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
TPN-03.01.01.02. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01.02. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
TPN-03.01.01.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Umum Daerah
TPN-03.01.01.02. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01.02. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rumah Sakit Umum Daerah
TPN-03.01.01.02. Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01.02. Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-03.01.01.02. Penyelenggaraan Sistem Informasi	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01.02. Penyelenggaraan Sistem Informasi	Rumah Sakit Umum Daerah
TPN-03.01.01.02. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01. Kesehatan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TPN-03.01.01.02. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Rumah Sakit Umum Daerah
TPN-03.02.01.01. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.02. Peningkatan Perekonomian Masyarakat	TPN-03.02.01. Pelayanan Penanaman Modal	TPN-03.02.01.01. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
TPN-03.02.01.02. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.02. Peningkatan Perekonomian Masyarakat	TPN-03.02.01. Pelayanan Penanaman Modal	TPN-03.02.01.02. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
TPN-03.02.01.03. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.02. Peningkatan Perekonomian Masyarakat	TPN-03.02.01. Pelayanan Penanaman Modal	TPN-03.02.01.03. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-03.02.01.04. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.02. Peningkatan Perekonomian Masyarakat	TPN-03.02.01. Pelayanan Penanaman Modal	TPN-03.02.01.04. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
TPN-03.02.01.05. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.02. Peningkatan Perekonomian Masyarakat	TPN-03.02.01. Pelayanan Penanaman Modal	TPN-03.02.01.05. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
TPN-03.02.02.01. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.02. Peningkatan Perekonomian Masyarakat	TPN-03.02.02. Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	TPN-03.02.02.01. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
TPN-03.02.02.02. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.02. Peningkatan Perekonomian Masyarakat	TPN-03.02.02. Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	TPN-03.02.02.02. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
TPN-03.02.03.01. Pembuatan Peta Potensi Investasi	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.02. Peningkatan	TPN-03.02.03. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	TPN-03.02.03.01. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Kabupaten/Kota				Perekonomian Masyarakat			
TPN-03.02.03.02. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.02. Peningkatan Perekonomian Masyarakat	TPN-03.02.03. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	TPN-03.02.03.02. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
TPN-03.02.04.01. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.02. Peningkatan Perekonomian Masyarakat	TPN-03.02.04. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	TPN-03.02.04.01. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
TPN-03.02.04.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.02. Peningkatan Perekonomian Masyarakat	TPN-03.02.04. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	TPN-03.02.04.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
TPN-03.02.04.03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.02. Peningkatan Perekonomian Masyarakat	TPN-03.02.04. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	TPN-03.02.04.03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
TPN-03.02.04.04. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.02. Peningkatan Perekonomian Masyarakat	TPN-03.02.04. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	TPN-03.02.04.04. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
TPN-03.02.05.01. Penyelenggaraan Promosi Penanaman	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.02. Peningkatan	TPN-03.02.05. Promosi Penanaman Modal	TPN-03.02.05.01. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Perekonomian Masyarakat		menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
TPN-03.02.05.02. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.08. Investasi	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.02. Peningkatan Perekonomian Masyarakat	TPN-03.02.05. Promosi Penanaman Modal	TPN-03.02.05.02. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
TPN-03.03.01. Perencanaan Dan Pembangunan Industri	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.01. Industri	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.03. Pengelolaan Perindustrian	TPN-03.03.01. Perencanaan Dan Pembangunan Industri	.	Dinas Perindustrian
TPN-03.03.02. Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.01. Industri	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.03. Pengelolaan Perindustrian	TPN-03.03.02. Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	.	Dinas Perindustrian
TPN-03.03.03. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.01. Industri	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.03. Pengelolaan Perindustrian	TPN-03.03.03. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	.	Dinas Perindustrian
TPN-03.04.01. Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.02. Perdagangan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.04. Pengelolaan Perdagangan	TPN-03.04.01. Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	.	Dinas Perdagangan
TPN-03.04.02. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.02. Perdagangan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.04. Pengelolaan Perdagangan	TPN-03.04.02. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	.	Dinas Perdagangan
TPN-03.04.03. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.02. Perdagangan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.04. Pengelolaan Perdagangan	TPN-03.04.03. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	.	Dinas Perdagangan
TPN-03.04.04. Pengembangan Ekspor	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.02. Perdagangan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.04. Pengelolaan Perdagangan	TPN-03.04.04. Pengembangan Ekspor	.	Dinas Perdagangan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-03.04.05. Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.02. Perdagangan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.04. Pengelolaan Perdagangan	TPN-03.04.05. Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	.	Dinas Perdagangan
TPN-03.04.06. Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.02. Perdagangan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.04. Pengelolaan Perdagangan	TPN-03.04.06. Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	.	Dinas Perdagangan
TPN-03.05.01. Pengelolaan Retribusi Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.05. Pengelolaan Pendapatan Daerah	TPN-03.05.01. Pengelolaan Retribusi Daerah	.	Badan Pendapatan Daerah
TPN-03.05.02. Pengelolaan Pajak Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.05. Pengelolaan Pendapatan Daerah	TPN-03.05.02. Pengelolaan Pajak Daerah	.	Badan Pendapatan Daerah
TPN-03.06.01.01. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.01. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.01.02. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.02. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.01.03. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.03. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.01.04. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.04. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
TPN-03.06.01.05. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.05. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.01.06. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.06. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.01.07. Pengendalian Program KKBPK	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.07. Pengendalian Program KKBPK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.01.08. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.08. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.01.09. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.09. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.01.10. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.10. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-03.06.01.11. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.11. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.01.12. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.12. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.01.13. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.13. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.01.14. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.14. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.01.15. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.15. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-03.06.01.16. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.16. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.01.17. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.17. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.01.18. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.18. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.01.19. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.19. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.01.20. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.20. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
TPN-03.06.01.21. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.21. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.01.22. Pembinaan Terpadu Kampung KB	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.01. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TPN-03.06.01.22. Pembinaan Terpadu Kampung KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.02.01. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.02. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	TPN-03.06.02.01. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.02.02. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.02. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	TPN-03.06.02.02. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-03.06.02.03. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.02. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	TPN-03.06.02.03. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.02.04. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.02. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	TPN-03.06.02.04. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.02.05. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.02. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	TPN-03.06.02.05. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.02.06. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.02. Pemberdayaan Dan	TPN-03.06.02.06. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
TPN-03.06.02.07. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.02. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	TPN-03.06.02.07. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.02.08. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.02. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	TPN-03.06.02.08. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.02.09. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.02. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	TPN-03.06.02.09. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						Kesejahteraan Keluarga	
TPN-03.06.02.10. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.02. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	TPN-03.06.02.10. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.02.11. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.02. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	TPN-03.06.02.11. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPN-03.06.02.12. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	TPN-03.06.02. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	TPN-03.06.02.12. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-03.07.01.01. Administrasi Tata Pemerintahan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.07. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	TPN-03.07.01. Pengelolaan Kesejahteraan Sosial	TPN-03.07.01.01. Administrasi Tata Pemerintahan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
TPN-03.07.01.02. Penataan Administrasi Pemerintahan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.07. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	TPN-03.07.01. Pengelolaan Kesejahteraan Sosial	TPN-03.07.01.02. Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
TPN-03.07.01.03. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.07. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	TPN-03.07.01. Pengelolaan Kesejahteraan Sosial	TPN-03.07.01.03. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
TPN-03.07.01.04. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.07. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	TPN-03.07.01. Pengelolaan Kesejahteraan Sosial	TPN-03.07.01.04. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
TPN-03.07.01.05. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.07. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	TPN-03.07.01. Pengelolaan Kesejahteraan Sosial	TPN-03.07.01.05. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
TPN-03.07.01.06. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.07. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	TPN-03.07.01. Pengelolaan Kesejahteraan Sosial	TPN-03.07.01.06. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesejahteraan Rakyat
TPN-03.07.01.07. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-03. Peningkatan derajat kesehatan dan perekonomian masyarakat	TPN-03.07. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	TPN-03.07.01. Pengelolaan Kesejahteraan Sosial	TPN-03.07.01.07. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat
TPN-04.01.01.01. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.09. Koperasi	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.01. Peningkatan	TPN-04.01.01. Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	TPN-04.01.01.01. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,	Dinas Perindustrian

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				Kesejahteraan Masyarakat		Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
TPN-04.01.01.02. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.09. Koperasi	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.01. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	TPN-04.01.01. Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	TPN-04.01.01.02. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian
TPN-04.01.02.01. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.09. Koperasi	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.01. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	TPN-04.01.02. Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	TPN-04.01.02.01. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian
TPN-04.01.02.02. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.09. Koperasi	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.01. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	TPN-04.01.02. Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	TPN-04.01.02.02. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Perindustrian
TPN-04.01.03.01. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.09. Koperasi	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.01. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	TPN-04.01.03. Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	TPN-04.01.03.01. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	Dinas Perindustrian

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
dalam Daerah Kabupaten/Kota						dalam Daerah Kabupaten/Kota	
TPN-04.01.03.02. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.09. Koperasi	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.01. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	TPN-04.01.03. Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	TPN-04.01.03.02. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian
TPN-04.01.04.01. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.02. Perdagangan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.01. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	TPN-04.01.04. Pengembangan UMKM	TPN-04.01.04.01. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Dinas Perindustrian
TPN-04.01.04.02. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.02. Perdagangan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.01. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	TPN-04.01.04. Pengembangan UMKM	TPN-04.01.04.02. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Perindustrian
TPN-04.02.01.01. Pengelolaan Kebudayaan yang	RAB 08. Budaya dan Agama	RAB 08.02. Kebudayaan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.02. Pelestarian Kebudayaan	TPN-04.02.01. Pengembangan Kebudayaan	TPN-04.02.01.01. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
TPN-04.02.01.02. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	RAB 08. Budaya dan Agama	RAB 08.02. Kebudayaan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.02. Pelestarian Kebudayaan	TPN-04.02.01. Pengembangan Kebudayaan	TPN-04.02.01.02. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN-04.02.01.03. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RAB 08. Budaya dan Agama	RAB 08.02. Kebudayaan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.02. Pelestarian Kebudayaan	TPN-04.02.01. Pengembangan Kebudayaan	TPN-04.02.01.03. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN-04.02.01.04. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	RAB 08. Budaya dan Agama	RAB 08.02. Kebudayaan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.02. Pelestarian Kebudayaan	TPN-04.02.01. Pengembangan Kebudayaan	TPN-04.02.01.04. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN-04.02.01.05. Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	RAB 08. Budaya dan Agama	RAB 08.02. Kebudayaan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.02. Pelestarian Kebudayaan	TPN-04.02.01. Pengembangan Kebudayaan	TPN-04.02.01.05. Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN-04.02.01.06. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya	RAB 08. Budaya dan Agama	RAB 08.02. Kebudayaan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.02. Pelestarian Kebudayaan	TPN-04.02.01. Pengembangan Kebudayaan	TPN-04.02.01.06. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
dalam Daerah Kabupaten/Kota						Daerah Kabupaten/Kota	
TPN-04.02.01.07. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	RAB 08. Budaya dan Agama	RAB 08.02. Kebudayaan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.02. Pelestarian Kebudayaan	TPN-04.02.01. Pengembangan Kebudayaan	TPN-04.02.01.07. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN-04.02.01.08. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	RAB 08. Budaya dan Agama	RAB 08.02. Kebudayaan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.02. Pelestarian Kebudayaan	TPN-04.02.01. Pengembangan Kebudayaan	TPN-04.02.01.08. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN-04.02.02.01. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	RAB 08. Budaya dan Agama	RAB 08.02. Kebudayaan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.02. Pelestarian Kebudayaan	TPN-04.02.02. Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	TPN-04.02.02.01. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN-04.02.02.02. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	RAB 08. Budaya dan Agama	RAB 08.02. Kebudayaan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.02. Pelestarian Kebudayaan	TPN-04.02.02. Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	TPN-04.02.02.02. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN-04.02.02.03. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	RAB 08. Budaya dan Agama	RAB 08.02. Kebudayaan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.02. Pelestarian Kebudayaan	TPN-04.02.02. Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	TPN-04.02.02.03. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN-04.02.02.04. Perlindungan Cagar Budaya	RAB 08. Budaya dan Agama	RAB 08.02. Kebudayaan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.02. Pelestarian Kebudayaan	TPN-04.02.02. Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	TPN-04.02.02.04. Perlindungan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN-04.03.01.01. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.11. Pariwisata	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.03. Peningkatan Pariwisata	TPN-04.03.01. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	TPN-04.03.01.01. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-04.03.01.02. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.11. Pariwisata	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.03. Peningkatan Pariwisata	TPN-04.03.01. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	TPN-04.03.01.02. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN-04.03.01.03. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.11. Pariwisata	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.03. Peningkatan Pariwisata	TPN-04.03.01. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	TPN-04.03.01.03. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN-04.03.01.04. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.11. Pariwisata	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.03. Peningkatan Pariwisata	TPN-04.03.01. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	TPN-04.03.01.04. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN-04.03.02.01. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.11. Pariwisata	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.03. Peningkatan Pariwisata	TPN-04.03.02. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	TPN-04.03.02.01. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN-04.03.02.02. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.11. Pariwisata	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.03. Peningkatan Pariwisata	TPN-04.03.02. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	TPN-04.03.02.02. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN-04.03.02.03. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.11. Pariwisata	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.03. Peningkatan Pariwisata	TPN-04.03.02. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	TPN-04.03.02.03. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-04.03.02.04. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.11. Pariwisata	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.03. Peningkatan Pariwisata	TPN-04.03.02. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	TPN-04.03.02.04. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TPN-04.04.01.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.01. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	TPN-04.04.01.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
TPN-04.04.01.02. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.01. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	TPN-04.04.01.02. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Pertanian
TPN-04.04.01.03. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.05. Peternakan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.01. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	TPN-04.04.01.03. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
TPN-04.04.01.04. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.01. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	TPN-04.04.01.04. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Pertanian
TPN-04.04.01.05. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.05. Peternakan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.01. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	TPN-04.04.01.05. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan	Dinas Pertanian

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
TPN-04.04.01.06. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.05. Peternakan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.01. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	TPN-04.04.01.06. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Dinas Pertanian
TPN-04.04.01.07. Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.05. Peternakan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.01. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	TPN-04.04.01.07. Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Dinas Pertanian
TPN-04.04.01.08. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.05. Peternakan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.01. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	TPN-04.04.01.08. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Dinas Pertanian
TPN-04.04.02.01. Pengembangan Prasarana Pertanian	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.02. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	TPN-04.04.02.01. Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
TPN-04.04.02.02. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.02. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	TPN-04.04.02.02. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dinas Pertanian
TPN-04.04.02.03. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.02. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	TPN-04.04.02.03. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Dinas Pertanian
TPN-04.04.02.04. Pembangunan Prasarana Pertanian	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan	TPN-04.04.02. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	TPN-04.04.02.04. Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
				Pertanian Perikanan Dan Peternakan			
TPN-04.04.02.05. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.02. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	TPN-04.04.02.05. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Pertanian
TPN-04.04.02.06. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.02. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	TPN-04.04.02.06. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Dinas Pertanian
TPN-04.04.02.07. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.02. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	TPN-04.04.02.07. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian
TPN-04.04.02.08. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.02. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	TPN-04.04.02.08. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Dinas Pertanian
TPN-04.04.02.09. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.02. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	TPN-04.04.02.09. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Pertanian
TPN-04.04.03.01. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.05. Peternakan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.03. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	TPN-04.04.03.01. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah	Dinas Pertanian

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Kabupaten/Kota						Kabupaten/Kota	
TPN-04.04.03.02. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.05. Peternakan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.03. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	TPN-04.04.03.02. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dinas Pertanian
TPN-04.04.03.03. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.05. Peternakan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.03. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	TPN-04.04.03.03. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
TPN-04.04.03.04. Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.05. Peternakan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.03. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	TPN-04.04.03.04. Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
TPN-04.04.03.05. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.05. Peternakan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.03. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	TPN-04.04.03.05. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
TPN-04.04.03.06. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.05. Peternakan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.03. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	TPN-04.04.03.06. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Dinas Pertanian
TPN-04.04.03.07. Penerapan dan Pengawasan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.05. Peternakan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan	TPN-04.04.03. Pengendalian Kesehatan	TPN-04.04.03.07. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan	Dinas Pertanian

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				Pertanian Perikanan Dan Peternakan	Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
TPN-04.04.03.08. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.05. Peternakan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.03. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	TPN-04.04.03.08. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Dinas Pertanian
TPN-04.04.04.01. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.04. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	TPN-04.04.04.01. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
TPN-04.04.04.02. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.04. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	TPN-04.04.04.02. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pertanian
TPN-04.04.05.01. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.05. Perizinan Usaha Pertanian	TPN-04.04.05.01. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
TPN-04.04.05.02. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.05. Perizinan Usaha Pertanian	TPN-04.04.05.02. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
TPN-04.04.06.01. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.06. Penyuluhan Pertanian	TPN-04.04.06.01. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-04.04.06.02. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.06. Penyuluhan Pertanian	TPN-04.04.06.02. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian
TPN-04.04.06.03. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.06. Penyuluhan Pertanian	TPN-04.04.06.03. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian
TPN-04.04.06.04. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.06. Penyuluhan Pertanian	TPN-04.04.06.04. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
TPN-04.04.07.01. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.07. Pengelolaan Perikanan Tangkap	TPN-04.04.07.01. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
TPN-04.04.07.02. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.07. Pengelolaan Perikanan Tangkap	TPN-04.04.07.02. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Perikanan
TPN-04.04.07.03. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan	TPN-04.04.07. Pengelolaan Perikanan Tangkap	TPN-04.04.07.03. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Tangkap				Pertanian Perikanan Dan Peternakan			
TPN-04.04.07.04. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.07. Pengelolaan Perikanan Tangkap	TPN-04.04.07.04. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
TPN-04.04.07.05. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.07. Pengelolaan Perikanan Tangkap	TPN-04.04.07.05. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan
TPN-04.04.08.01. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.08. Pengelolaan Perikanan Budidaya	TPN-04.04.08.01. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
TPN-04.04.08.02. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.08. Pengelolaan Perikanan Budidaya	TPN-04.04.08.02. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
TPN-04.04.08.03. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.08. Pengelolaan Perikanan Budidaya	TPN-04.04.08.03. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan
TPN-04.04.08.04. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.08. Pengelolaan Perikanan Budidaya	TPN-04.04.08.04. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
TPN-04.04.08.05. Penyediaan Ketersediaan Sarana	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan	TPN-04.04.08. Pengelolaan Perikanan Budidaya	TPN-04.04.08.05. Penyediaan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan	Dinas Perikanan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Pertanian Perikanan Dan Peternakan		Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
TPN-04.04.08.06. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.08. Pengelolaan Perikanan Budidaya	TPN-04.04.08.06. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
TPN-04.04.09.01. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.09. Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	TPN-04.04.09.01. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Dinas Perikanan
TPN-04.04.09.02. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.09. Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	TPN-04.04.09.02. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
TPN-04.04.10.01. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.10. Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	TPN-04.04.10.01. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan
TPN-04.04.10.02. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.10. Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	TPN-04.04.10.02. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	Dinas Perikanan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
TPN-04.04.10.03. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.10. Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	TPN-04.04.10.03. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan
TPN-04.04.10.04. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.10. Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	TPN-04.04.10.04. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan
TPN-04.04.10.05. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.10. Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	TPN-04.04.10.05. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
TPN-04.04.10.06. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.10. Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	TPN-04.04.10.06. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-04.04.10.07. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.06. Perikanan	TPN-04. Peningkatan sektor agribisnis, pariwisata, koperasi dan UKM	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	TPN-04.04.10. Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	TPN-04.04.10.07. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
TPN-05.01.01.01. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.01. Pemberdayaan Desa	TPN-05.01.01. Peningkatan Kerjasama Desa	TPN-05.01.01.01. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TPN-05.01.01.02. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.01. Pemberdayaan Desa	TPN-05.01.01. Peningkatan Kerjasama Desa	TPN-05.01.01.02. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TPN-05.01.02.01. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.01. Pemberdayaan Desa	TPN-05.01.02. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	TPN-05.01.02.01. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TPN-05.01.02.02. Peningkatan Kapasitas	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat	TPN-05.01. Pemberdayaan Desa	TPN-05.01.02. Pemberdayaan Lembaga	TPN-05.01.02.02. Peningkatan Kapasitas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			dan kemandirian pangan daerah		Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
TPN-05.01.02.03. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.01. Pemberdayaan Desa	TPN-05.01.02. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	TPN-05.01.02.03. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TPN-05.01.02.04. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.01. Pemberdayaan Desa	TPN-05.01.02. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	TPN-05.01.02.04. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TPN-05.01.02.05. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.01. Pemberdayaan Desa	TPN-05.01.02. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	TPN-05.01.02.05. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-05.02.01.01. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN-05.02.01. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	TPN-05.02.01.01. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
TPN-05.02.01.02. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN-05.02.01. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	TPN-05.02.01.02. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dinas Ketahanan Pangan
TPN-05.02.01.03. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN-05.02.01. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	TPN-05.02.01.03. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
TPN-05.02.01.04. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN-05.02.01. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	TPN-05.02.01.04. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan
TPN-05.02.01.05. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN-05.02.01. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	TPN-05.02.01.05. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
TPN-05.02.01.06. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN-05.02.01. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	TPN-05.02.01.06. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-05.02.01.07. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN-05.02.01. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	TPN-05.02.01.07. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
TPN-05.02.01.08. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN-05.02.01. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	TPN-05.02.01.08. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
TPN-05.02.01.09. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN-05.02.01. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	TPN-05.02.01.09. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan
TPN-05.02.01.10. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN-05.02.01. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	TPN-05.02.01.10. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dinas Ketahanan Pangan
TPN-05.02.01.11. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN-05.02.01. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	TPN-05.02.01.11. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
TPN-05.02.02.01. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN-05.02.02. Penanganan Kerawanan Pangan	TPN-05.02.02.01. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Kecamatan						Kecamatan	
TPN-05.02.02.02. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN-05.02.02. Penanganan Kerawanan Pangan	TPN-05.02.02.02. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
TPN-05.02.02.03. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN-05.02.02. Penanganan Kerawanan Pangan	TPN-05.02.02.03. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
TPN-05.02.02.04. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN-05.02.02. Penanganan Kerawanan Pangan	TPN-05.02.02.04. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
TPN-05.02.02.05. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN-05.02.02. Pengawasan Keamanan Pangan	TPN-05.02.02.05. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
TPN-05.02.02.06. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	RAB 02. Ekonomi dan Industri	RAB 02.03. Pertanian	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	TPN-05.02.02. Pengawasan Keamanan Pangan	TPN-05.02.02.06. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
TPN-05.03.01.01. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.05. Pemuda	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.01. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	TPN-05.03.01.01. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
TPN-05.03.01.02. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.05. Pemuda	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.01. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	TPN-05.03.01.02. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Dinas Pemuda dan Olahraga
TPN-05.03.01.03. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.05. Pemuda	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.01. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	TPN-05.03.01.03. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga
TPN-05.03.01.04. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.05. Pemuda	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.01. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	TPN-05.03.01.04. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan	Dinas Pemuda dan Olahraga

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Keputusan Program Strategis Kepemudaan						Program Strategis Kepemudaan	
TPN-05.03.01.05. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.05. Pemuda	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.01. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	TPN-05.03.01.05. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
TPN-05.03.01.06. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.05. Pemuda	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.01. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	TPN-05.03.01.06. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga
TPN-05.03.01.07. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.05. Pemuda	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.01. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	TPN-05.03.01.07. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Dinas Pemuda dan Olahraga
TPN-05.03.01.08. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.05. Pemuda	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.01. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	TPN-05.03.01.08. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga
TPN-05.03.01.09. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.05. Pemuda	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.01. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	TPN-05.03.01.09. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga
TPN-05.03.02.01. Pembinaan dan Pengembangan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.06. Olahraga	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.02. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	TPN-05.03.02.01. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			dan kemandirian pangan daerah			Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
TPN-05.03.02.02. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.06. Olahraga	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.02. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	TPN-05.03.02.02. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga
TPN-05.03.02.03. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.06. Olahraga	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.02. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	TPN-05.03.02.03. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga
TPN-05.03.02.04. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.06. Olahraga	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.02. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	TPN-05.03.02.04. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga
TPN-05.03.02.05. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.06. Olahraga	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.02. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	TPN-05.03.02.05. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Dinas Pemuda dan Olahraga
TPN-05.03.02.06. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.06. Olahraga	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.02. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	TPN-05.03.02.06. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Pemuda dan Olahraga

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-05.03.02.07. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.06. Olahraga	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.02. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	TPN-05.03.02.07. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga
TPN-05.03.02.08. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.06. Olahraga	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.02. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	TPN-05.03.02.08. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
TPN-05.03.02.09. Standarisasi Organisasi Keolahragaan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.06. Olahraga	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.02. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	TPN-05.03.02.09. Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
TPN-05.03.02.10. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.06. Olahraga	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.02. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	TPN-05.03.02.10. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
TPN-05.03.02.11. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.06. Olahraga	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.02. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	TPN-05.03.02.11. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
TPN-05.03.02.12. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.06. Olahraga	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.02. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	TPN-05.03.02.12. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Dinas Pemuda dan Olahraga
TPN-05.03.03.01. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.06. Olahraga	TPN-05. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan daerah	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	TPN-05.03.03. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	TPN-05.03.03.01. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.01.01.01. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.01. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	TPN-06.01.01.01. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.01.02. Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.01. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	TPN-06.01.01.02. Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.01.03. Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.01. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	TPN-06.01.01.03. Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.01.04. Normalisasi/Restorasi Sungai	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.01. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	TPN-06.01.01.04. Normalisasi/Restorasi Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.01.05. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.01. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	TPN-06.01.01.05. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.01.06. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.01. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	TPN-06.01.01.06. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.01.07. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.01. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	TPN-06.01.01.07. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.01.01.08. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.01. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	TPN-06.01.01.08. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.01.09. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.01. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	TPN-06.01.01.09. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.02.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.02. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	TPN-06.01.02.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.02.02. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.02. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	TPN-06.01.02.02. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.02.03. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.02. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	TPN-06.01.02.03. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.02.04. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.02. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	TPN-06.01.02.04. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.02.05. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.02. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	TPN-06.01.02.05. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.01.03.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.03. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	TPN-06.01.03.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.03.02. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.03. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	TPN-06.01.03.02. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.03.03. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.03. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	TPN-06.01.03.03. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.03.04. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.03. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	TPN-06.01.03.04. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.04.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.04. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	TPN-06.01.04.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.01.04.02. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.04. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	TPN-06.01.04.02. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.04.03. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.04. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	TPN-06.01.04.03. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.04.04. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.04. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	TPN-06.01.04.04. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.05.01. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.05. Penataan Bangunan Gedung	TPN-06.01.05.01. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.05.02. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.05. Penataan Bangunan Gedung	TPN-06.01.05.02. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.01.05.03. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.05. Penataan Bangunan Gedung	TPN-06.01.05.03. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.06.01. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.06. Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya	TPN-06.01.06.01. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.06.02. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.06. Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya	TPN-06.01.06.02. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.06.03. Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.06. Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya	TPN-06.01.06.03. Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.06.04. Penataan Bangunan dan Lingkungan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.06. Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya	TPN-06.01.06.04. Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.07.01. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.07. Penyelenggaraan Jalan	TPN-06.01.07.01. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.07.02. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.07. Penyelenggaraan Jalan	TPN-06.01.07.02. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
TPN-06.01.07.03. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.07. Penyelenggaraan Jalan	TPN-06.01.07.03. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.07.04. Survei Kondisi Jalan/Jembatan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.07. Penyelenggaraan Jalan	TPN-06.01.07.04. Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.07.05. Pembangunan Jalan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.07. Penyelenggaraan Jalan	TPN-06.01.07.05. Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.07.06. Pelebaran Jalan Menuju Standar	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.07. Penyelenggaraan Jalan	TPN-06.01.07.06. Pelebaran Jalan Menuju Standar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.07.07. Rekonstruksi Jalan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.07. Penyelenggaraan Jalan	TPN-06.01.07.07. Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.07.08. Rehabilitasi Jalan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.07. Penyelenggaraan Jalan	TPN-06.01.07.08. Rehabilitasi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.07.09. Pemeliharaan Rutin Jalan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.07. Penyelenggaraan Jalan	TPN-06.01.07.09. Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.07.10. Pembangunan Jembatan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.07. Penyelenggaraan Jalan	TPN-06.01.07.10. Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.01.07.11. Penggantian Jembatan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.07. Penyelenggaraan Jalan	TPN-06.01.07.11. Penggantian Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.07.12. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.07. Penyelenggaraan Jalan	TPN-06.01.07.12. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.08.01. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.08. Pengembangan Jasa Konstruksi	TPN-06.01.08.01. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.08.02. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.08. Pengembangan Jasa Konstruksi	TPN-06.01.08.02. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.08.03. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.08. Pengembangan Jasa Konstruksi	TPN-06.01.08.03. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.08.04. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.08. Pengembangan Jasa Konstruksi	TPN-06.01.08.04. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.09.01. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.09. Penyelenggaraan Tata Ruang	TPN-06.01.09.01. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.01.09.02. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.09. Penyelenggaraan Tata Ruang	TPN-06.01.09.02. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.09.03. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.09. Penyelenggaraan Tata Ruang	TPN-06.01.09.03. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.09.04. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.09. Penyelenggaraan Tata Ruang	TPN-06.01.09.04. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.09.05. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.09. Penyelenggaraan Tata Ruang	TPN-06.01.09.05. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.09.06. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.09. Penyelenggaraan Tata Ruang	TPN-06.01.09.06. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.09.07. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.09. Penyelenggaraan Tata Ruang	TPN-06.01.09.07. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
untuk Investasi dan Pembangunan Daerah						Pembangunan Daerah	
TPN-06.01.09.08. Sistem Informasi Penataan Ruang	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.09. Penyelenggaraan Tata Ruang	TPN-06.01.09.08. Sistem Informasi Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.09.09. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.09. Penyelenggaraan Tata Ruang	TPN-06.01.09.09. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.09.10. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01. Pekerjaan Umum	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.09. Penyelenggaraan Tata Ruang	TPN-06.01.09.10. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPN-06.01.10.01. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.01. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.02. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.02. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.03. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.03. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.04. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.04. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.01.10.05. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.05. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.06. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.06. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.07. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.07. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.08. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.08. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.09. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.09. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.01.10.10. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.10. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.11. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.11. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.12. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.12. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.13. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.13. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.14. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.14. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.15. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.15. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.01.10.16. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.16. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.17. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.17. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.18. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.18. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.19. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.19. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.20. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.20. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.21. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.21. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dinas Perhubungan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.01.10.22. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.22. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.23. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.23. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.24. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.24. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.10.25. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.10. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	TPN-06.01.10.25. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.11.01. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.11. Pengelolaan Pelayaran	TPN-06.01.11.01. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dinas Perhubungan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.01.11.02. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.11. Pengelolaan Pelayaran	TPN-06.01.11.02. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.11.03. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.11. Pengelolaan Pelayaran	TPN-06.01.11.03. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.11.04. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.11. Pengelolaan Pelayaran	TPN-06.01.11.04. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan
TPN-06.01.11.05. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03. Transportasi	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	TPN-06.01.11. Pengelolaan Pelayaran	TPN-06.01.11.05. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan
TPN-06.02.01.01. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.01. Perencanaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.01.01. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.01.01. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.01. Perencanaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.01.01. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dinas Lingkungan Hidup

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.02.01.01. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.01. Perencanaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.01.01. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.01.01. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.01. Perencanaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.01.01. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.01.02. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.02. Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.01.02. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.01.02. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.02. Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.01.02. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.01.02. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.02. Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.01.02. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Iklim							
TPN-06.02.01.02. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.02. Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.01.02. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.01.02. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.02. Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.01.02. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.01.02. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.02. Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.01.02. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.01.02. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.02. Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.01.02. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.01.02. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.02. Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.01.02. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.01. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.03. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	TPN-06.02.01. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.02.01. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.03. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	TPN-06.02.01. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.04.01. Penyimpanan Sementara Limbah B3	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.04. Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	TPN-06.02.04.01. Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.04.01. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.04. Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	TPN-06.02.04.01. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.04.01. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.04. Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	TPN-06.02.04.01. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.05.01. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.05. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	TPN-06.02.05.01. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh	Dinas Lingkungan Hidup

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
TPN-06.02.05.01. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.05. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	TPN-06.02.05.01. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.05.01. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	#REF!	TPN-06.02.05.01. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.06.01. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.06. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	TPN-06.02.06.01. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.06.01. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.06. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	TPN-06.02.06.01. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Lingkungan Hidup

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Kemasyarakatan							
TPN-06.02.07.01. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.07. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	TPN-06.02.07.01. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.07.01. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.07. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	TPN-06.02.07.01. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.08.01. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.08. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.08.01. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.08.01. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.08. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.08.01. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.09.01. Pengelolaan Sampah	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.09. Pengelolaan Persampahan	TPN-06.02.09.01. Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.02.09.01. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.09. Pengelolaan Persampahan	TPN-06.02.09.01. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.09.01. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.09. Pengelolaan Persampahan	TPN-06.02.09.01. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.09.01. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.09. Pengelolaan Persampahan	TPN-06.02.09.01. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.02.09.01. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	RAB 07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05. Lingkungan Hidup	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	TPN-06.02.09. Pengelolaan Persampahan	TPN-06.02.09.01. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
TPN-06.03.01.01. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.04. Perumahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pemanfaatan Tata Ruang	TPN-06.03.01. Pengembangan Perumahan	TPN-06.03.01.01. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Relokasi Program Kabupaten/Kota						Program Kabupaten/Kota	
TPN-06.03.01.02. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.04. Perumahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pemanfaatan Tata Ruang	TPN-06.03.01. Pengembangan Perumahan	TPN-06.03.01.02. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN-06.03.02.01. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.04. Perumahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pengelolaan Tata Ruang	TPN-06.03.02. Kawasan Permukiman	TPN-06.03.02.01. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN-06.03.02.02. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.04. Perumahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pengelolaan Tata Ruang	TPN-06.03.02. Kawasan Permukiman	TPN-06.03.02.02. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN-06.03.02.03. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.04. Perumahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pengelolaan Tata Ruang	TPN-06.03.02. Kawasan Permukiman	TPN-06.03.02.03. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN-06.03.02.04. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.04. Perumahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pengelolaan Tata Ruang	TPN-06.03.02. Kawasan Permukiman	TPN-06.03.02.04. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN-06.03.02.05. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.04. Perumahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pengelolaan Tata Ruang	TPN-06.03.02. Kawasan Permukiman	TPN-06.03.02.05. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Permukiman Kumuh							
TPN-06.03.03.01. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.04. Perumahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pengelolaan Tata Ruang	TPN-06.03.03. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kumuh	TPN-06.03.03.01. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN-06.03.03.02. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.04. Perumahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pengelolaan Tata Ruang	TPN-06.03.03. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kumuh	TPN-06.03.03.02. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN-06.03.03.03. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.04. Perumahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pengelolaan Tata Ruang	TPN-06.03.03. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kumuh	TPN-06.03.03.03. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN-06.03.04.01. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.04. Perumahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pengelolaan Tata Ruang	TPN-06.03.04. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	TPN-06.03.04.01. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.03.04.02. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.04. Perumahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pengelolaan Tata Ruang	TPN-06.03.04. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	TPN-06.03.04.02. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN-06.03.05.01. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.06. Pertanahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pengelolaan Tata Ruang	TPN-06.03.05. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	TPN-06.03.05.01. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN-06.03.05.02. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.06. Pertanahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pengelolaan Tata Ruang	TPN-06.03.06. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	TPN-06.03.05.02. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN-06.03.07.01. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.06. Pertanahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pengelolaan Tata Ruang	TPN-06.03.07. Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	TPN-06.03.07.01. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN-06.03.07.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.06. Pertanahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pengelolaan Tata Ruang	TPN-06.03.07. Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	TPN-06.03.07.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.03.08.01. Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.06. Pertanahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pengelolaan Tata Ruang	TPN-06.03.08. Penatagunaan Tanah	TPN-06.03.08.01. Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN-06.03.08.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.06. Pertanahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pengelolaan Tata Ruang	TPN-06.03.08. Penatagunaan Tanah	TPN-06.03.08.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN-06.03.08.03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.06. Pertanahan	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.03. Pengelolaan Tata Ruang	TPN-06.03.08. Penatagunaan Tanah	TPN-06.03.08.03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
TPN-06.04.01.01. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.04. Penyiapan Tangguh Bencana	TPN-06.04.01. Penanggulangan Bencana	TPN-06.04.01.01. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TPN-06.04.01.02. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.04. Penyiapan Tangguh Bencana	TPN-06.04.01. Penanggulangan Bencana	TPN-06.04.01.02. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TPN-06.04.01.03. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.04. Penyiapan Tangguh Bencana	TPN-06.04.01. Penanggulangan Bencana	TPN-06.04.01.03. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.04.01.04. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.04. Penyiapan Tangguh Bencana	TPN-06.04.01. Penanggulangan Bencana	TPN-06.04.01.04. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TPN-06.04.01.05. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.04. Penyiapan Tangguh Bencana	TPN-06.04.01. Penanggulangan Bencana	TPN-06.04.01.05. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TPN-06.04.01.06. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.04. Penyiapan Tangguh Bencana	TPN-06.04.01. Penanggulangan Bencana	TPN-06.04.01.06. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TPN-06.04.01.07. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.04. Penyiapan Tangguh Bencana	TPN-06.04.01. Penanggulangan Bencana	TPN-06.04.01.07. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TPN-06.04.01.08. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.04. Penyiapan Tangguh Bencana	TPN-06.04.01. Penanggulangan Bencana	TPN-06.04.01.08. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TPN-06.04.01.09. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.04. Penyiapan Tangguh Bencana	TPN-06.04.01. Penanggulangan Bencana	TPN-06.04.01.09. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-06.04.01.10. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.04. Penyiapan Tangguh Bencana	TPN-06.04.01. Penanggulangan Bencana	TPN-06.04.01.10. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TPN-06.04.01.11. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.04. Penyiapan Tangguh Bencana	TPN-06.04.01. Penanggulangan Bencana	TPN-06.04.01.11. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TPN-06.04.01.12. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-06. Pengelolaan infrastruktur dasar daerah dan lingkungan hidup	TPN-06.04. Penyiapan Tangguh Bencana	TPN-06.04.01. Penanggulangan Bencana	TPN-06.04.01.12. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-07. Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	TPN-07.01.01. Penetapan Pelayanan Publik		Bagian Organisasi
TPN-07.01.03.01. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-07. Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	TPN-07.01.03. Pendaftaran Penduduk	TPN-07.01.03.01. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TPN-07.01.03.02. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-07. Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	TPN-07.01.03. Pendaftaran Penduduk	TPN-07.01.03.02. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TPN-07.01.03.03. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-07. Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	TPN-07.01.03. Pendaftaran Penduduk	TPN-07.01.03.03. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-07.01.03.04. Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-07. Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	TPN-07.01.03. Pendaftaran Penduduk	TPN-07.01.03.04. Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TPN-07.01.04.01. Pelayanan Pencatatan Sipil	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-07. Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	TPN-07.01.04. Pencatatan Sipil	TPN-07.01.04.01. Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TPN-07.01.04.02. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-07. Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	TPN-07.01.04. Pencatatan Sipil	TPN-07.01.04.02. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TPN-07.01.04.03. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-07. Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	TPN-07.01.04. Pencatatan Sipil	TPN-07.01.04.03. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TPN-07.01.04.04. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-07. Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	TPN-07.01.04. Pencatatan Sipil	TPN-07.01.04.04. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TPN-07.01.05.01. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-07. Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	TPN-07.01.05. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	TPN-07.01.05.01. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-07.01.05.02. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-07. Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	TPN-07.01.05. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	TPN-07.01.05.02. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TPN-07.01.05.03. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-07. Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	TPN-07.01.05. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	TPN-07.01.05.03. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TPN-07.01.05.04. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-07. Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	TPN-07.01.05. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	TPN-07.01.05.04. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TPN-07.01.05.05. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-07. Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	TPN-07.01.05. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	TPN-07.01.05.05. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TPN-07.01.05.06. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-07. Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	TPN-07.01.05. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	TPN-07.01.05.06. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TPN-07.01.05.07. Pembinaan dan Pengawasan terkait	RAB 03. Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07. Kependudukan	TPN-07. Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	TPN-07.01.05. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	TPN-07.01.05.07. Pembinaan dan Pengawasan terkait	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
TPN-07.01.06. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-07. Peningkatan kualitas pelayanan publik	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	TPN-07.01.06. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	.	Bagian Organisasi
TPN-08.01.01. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.01. Peningkatan Tata Kelola Organisasi	TPN-08.01.01. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	.	Bagian Organisasi
TPN-08.01.02.01. Penataan Organisasi	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.01. Peningkatan Tata Kelola Organisasi	TPN-08.01.02. Pencapaian Reformasi Birokrasi	TPN-08.01.02.01. Penataan Organisasi	Bagian Organisasi
TPN-08.01.02.01. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.01. Peningkatan Tata Kelola Organisasi	TPN-08.01.02. Pencapaian Reformasi Birokrasi	TPN-08.01.02.01. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
TPN-08.02.01.01. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	TPN-08.02.01. Pengelolaan ASN	TPN-08.02.01.01. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
TPN-08.02.01.02. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	TPN-08.02.01. Pengelolaan ASN	TPN-08.02.01.02. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
TPN-08.02.01.03. Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	TPN-08.02.01. Pengelolaan ASN	TPN-08.02.01.03. Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
TPN-08.02.01.04. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	TPN-08.02.01. Pengelolaan ASN	TPN-08.02.01.04. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-08.02.01.05. Pengelolaan Data Kepegawaian	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	TPN-08.02.01. Pengelolaan ASN	TPN-08.02.01.05. Pengelolaan Data Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
TPN-08.02.01.06. Mutasi dan Promosi ASN	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	TPN-08.02.01. Pengelolaan ASN	TPN-08.02.01.06. Mutasi dan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
TPN-08.02.01.07. Pembinaan Disiplin ASN	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	TPN-08.02.01. Pengelolaan ASN	TPN-08.02.01.07. Pembinaan Disiplin ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
TPN-08.02.01.08. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	TPN-08.02.01. Pengelolaan ASN	TPN-08.02.01.08. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
TPN-08.02.01.09. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	TPN-08.02.01. Pengelolaan ASN	TPN-08.02.01.09. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
TPN-08.02.02.01. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	TPN-08.02.02. Pengembangan ASN	TPN-08.02.02.01. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
TPN-08.02.02.02. Pengembangan Kompetensi ASN	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	TPN-08.02.02. Pengembangan ASN	TPN-08.02.02.02. Pengembangan Kompetensi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
TPN-08.02.02.03. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	TPN-08.02.02. Pengembangan ASN	TPN-08.02.02.03. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
TPN-08.02.02.04. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	TPN-08.02.02. Pengembangan ASN	TPN-08.02.02.04. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
TPN-08.02.02.05. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	TPN-08.02.02. Pengembangan ASN	TPN-08.02.02.05. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Diklat							
TPN-08.02.02.06. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	TPN-08.02.02. Pengembangan ASN	TPN-08.02.02.06. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
TPN-08.02.02.07. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	TPN-08.02.02. Pengembangan ASN	TPN-08.02.02.07. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
TPN-08.02.02.08. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-08. Peningkatan Profesionalitas Organisasi dan Kepegawaian	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	TPN-08.02.02. Pengembangan ASN	TPN-08.02.02.08. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
TPN-09.01.01.01. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.01. Pemberdayaan Sosial	TPN-09.01.01.01. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
TPN-09.01.01.02. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.01. Pemberdayaan Sosial	TPN-09.01.01.02. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Dinas Sosial

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						Kabupaten/Kota	
TPN-09.01.01.03. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.01. Pemberdayaan Sosial	TPN-09.01.01.03. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
TPN-09.01.01.04. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.01. Pemberdayaan Sosial	TPN-09.01.01.04. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
TPN-09.01.01.05. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.01. Pemberdayaan Sosial	TPN-09.01.01.05. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dinas Sosial
TPN-09.01.02.01. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.02. Rehabilitasi Sosial	TPN-09.01.02.01. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Dinas Sosial

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						Pengemis di Luar Panti Sosial	
TPN-09.01.02.02. Penyediaan Permakanan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.02. Rehabilitasi Sosial	TPN-09.01.02.02. Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial
TPN-09.01.02.03. Penyediaan Sandang	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.02. Rehabilitasi Sosial	TPN-09.01.02.03. Penyediaan Sandang	Dinas Sosial
TPN-09.01.02.04. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.02. Rehabilitasi Sosial	TPN-09.01.02.04. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial
TPN-09.01.02.05. Pemberian Layanan Rujukan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.02. Rehabilitasi Sosial	TPN-09.01.02.05. Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial
TPN-09.01.02.06. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.02. Rehabilitasi Sosial	TPN-09.01.02.06. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
TPN-09.01.02.07. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.02. Rehabilitasi Sosial	TPN-09.01.02.07. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-09.01.03.01. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.03. Perlindungan Dan Jaminan Sosial	TPN-09.01.03.01. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
TPN-09.01.03.02. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.03. Perlindungan Dan Jaminan Sosial	TPN-09.01.03.02. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
TPN-09.01.03.03. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.03. Perlindungan Dan Jaminan Sosial	TPN-09.01.03.03. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
TPN-09.01.04.01. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.04. Penanganan Bencana	TPN-09.01.04.01. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
TPN-09.01.04.02. Penyediaan Makanan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.04. Penanganan Bencana	TPN-09.01.04.02. Penyediaan Makanan	Dinas Sosial
TPN-09.01.04.03. Penyediaan Sandang	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.04. Penanganan Bencana	TPN-09.01.04.03. Penyediaan Sandang	Dinas Sosial
TPN-09.01.04.04. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.04. Penanganan Bencana	TPN-09.01.04.04. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dinas Sosial
TPN-09.01.04.05. Penyelenggaraan Pemberdayaan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas	TPN-09.01.04. Penanganan Bencana	TPN-09.01.04.05. Penyelenggaraan Pemberdayaan	Dinas Sosial

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			kualitas kehidupan sosial keagamaan	Kehidupan Sosial Keagamaan		Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
TPN-09.01.04.06. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.04. Penanganan Bencana	TPN-09.01.04.06. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dinas Sosial
TPN-09.01.04.07. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.04. Penanganan Bencana	TPN-09.01.04.07. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial
TPN-09.01.05.01. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	TPN-09.01.05. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	TPN-09.01.05.01. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
TPN-09.02.01. Penegakan Peraturan Daerah	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.02. Keamanan	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.02. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	TPN-09.02.01. Penegakan Peraturan Daerah	.	SatpolPP
TPN-09.02.01. Penanggulangan Kebakaran	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.02. Keamanan	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.02. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	TPN-09.02.01. Penanggulangan Kebakaran	.	SatpolPP
TPN-09.02.02.01. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.02. Keamanan	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.02. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	TPN-09.02.02. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	TPN-09.02.02.01. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	SatpolPP

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
TPN-09.02.02.02. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.02. Keamanan	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.02. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	TPN-09.02.02. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	TPN-09.02.02.02. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	SatpolPP
TPN-09.02.02.03. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.02. Keamanan	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.02. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	TPN-09.02.02. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	TPN-09.02.02.03. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	SatpolPP
TPN-09.02.02.04. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.02. Keamanan	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.02. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	TPN-09.02.02. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	TPN-09.02.02.04. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	SatpolPP
TPN-09.02.02.05. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.02. Keamanan	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.02. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	TPN-09.02.02. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	TPN-09.02.02.05. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	SatpolPP
TPN-09.02.02.06. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.02. Keamanan	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.02. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	TPN-09.02.02. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	TPN-09.02.02.06. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	SatpolPP
TPN-09.02.02.07. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.02. Keamanan	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.02. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	TPN-09.02.02. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	TPN-09.02.02.07. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	SatpolPP

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-09.03.01.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.03. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN-09.03.01. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	TPN-09.03.01.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPN-09.03.01.02. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.03. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN-09.03.01. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	TPN-09.03.01.02. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPN-09.03.01.03. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.03. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN-09.03.01. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	TPN-09.03.01.03. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPN-09.03.02.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.03. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN-09.03.02. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	TPN-09.03.02.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-09.03.02.02. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.03. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN-09.03.02. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	TPN-09.03.02.02. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPN-09.03.02.03. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.03. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN-09.03.02. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	TPN-09.03.02.03. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPN-09.03.03.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.03. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN-09.03.03. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	TPN-09.03.03.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-09.03.03.02. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.03. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN-09.03.03. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	TPN-09.03.03.02. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPN-09.03.03.03. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.03. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN-09.03.03. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	TPN-09.03.03.03. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPN-09.03.04.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-09. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-09.03. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN-09.03.04. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	TPN-09.03.04.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPN-10.01.01.01. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.01. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN-10.01.01. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	TPN-10.01.01.01. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Kewaspadaan							
TPN-10.01.01.02. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.01. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN-10.01.01. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	TPN-10.01.01.02. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPN-10.01.01.03. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.01. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN-10.01.01. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	TPN-10.01.01.03. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-10.01.01.04. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.01. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN-10.01.01. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	TPN-10.01.01.04. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPN-10.01.01.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.01. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN-10.01.01. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	TPN-10.01.01.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPN-10.01.01.02. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.01. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN-10.01.01. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	TPN-10.01.01.02. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Politik Di Daerah							
TPN-10.01.01.03. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.01. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN-10.01.01. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	TPN-10.01.01.03. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPN-10.01.01.04. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.01. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	TPN-10.01.01. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	TPN-10.01.01.04. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPN-10.02.01.01. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.01. Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	TPN-10.02.01.01. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-10.02.01.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.01. Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	TPN-10.02.01.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.01.03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.01. Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	TPN-10.02.01.03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.01.04. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.01. Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	TPN-10.02.01.04. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.01.05. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.01. Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	TPN-10.02.01.05. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.01.06. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.01. Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	TPN-10.02.01.06. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.01.07. Sosialisasi Peningkatan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan	TPN-10.02. Perlindungan	TPN-10.02.01. Pengarusutamaan Gender	TPN-10.02.01.07. Sosialisasi Peningkatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			kualitas kehidupan sosial keagamaan	Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	Dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Perlindungan Anak
TPN-10.02.01.08. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.01. Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	TPN-10.02.01.08. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.01.09. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.01. Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	TPN-10.02.01.09. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.01.10. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.01. Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	TPN-10.02.01.10. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.01.11. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak	TPN-10.02.01. Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	TPN-10.02.01.11. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				Dan Penyetaraan Gender		Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
TPN-10.02.02.01. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.02. Perlindungan Perempuan	TPN-10.02.02.01. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.02.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.02. Perlindungan Perempuan	TPN-10.02.02.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.02.03. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.02. Perlindungan Perempuan	TPN-10.02.02.03. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.02.04. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.02. Perlindungan Perempuan	TPN-10.02.02.04. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-10.02.02.05. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.02. Perlindungan Perempuan	TPN-10.02.02.05. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.02.06. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.02. Perlindungan Perempuan	TPN-10.02.02.06. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.02.07. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.02. Perlindungan Perempuan	TPN-10.02.02.07. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.03.01. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.03. Peningkatan Kualitas Keluarga	TPN-10.02.03.01. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-10.02.03.02. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.03. Peningkatan Kualitas Keluarga	TPN-10.02.03.02. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.03.03. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.03. Peningkatan Kualitas Keluarga	TPN-10.02.03.03. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.03.04. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.03. Peningkatan Kualitas Keluarga	TPN-10.02.03.04. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.03.05. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.03. Peningkatan Kualitas Keluarga	TPN-10.02.03.05. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-10.02.03.06. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.03. Peningkatan Kualitas Keluarga	TPN-10.02.03.06. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.03.07. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.03. Peningkatan Kualitas Keluarga	TPN-10.02.03.07. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.03.08. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.03. Peningkatan Kualitas Keluarga	TPN-10.02.03.08. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.04.01. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.04. Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	TPN-10.02.04.01. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-10.02.04.02. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.04. Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	TPN-10.02.04.02. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.04.03. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.04. Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	TPN-10.02.04.03. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.05.01. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.05. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	TPN-10.02.05.01. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.05.02. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.05. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	TPN-10.02.05.02. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.05.03. Koordinasi dan Sinkronisasi	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak	TPN-10.02.05. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	TPN-10.02.05.03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			kualitas kehidupan sosial keagamaan	Dan Penyetaraan Gender		Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
TPN-10.02.05.04. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.05. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	TPN-10.02.05.04. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.05.05. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.05. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	TPN-10.02.05.05. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.05.06. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.05. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	TPN-10.02.05.06. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.05.07. Penguatan Jejaring antar Lembaga	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak	TPN-10.02.05. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	TPN-10.02.05.07. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			kualitas kehidupan sosial keagamaan	Dan Penyetaraan Gender		Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
TPN-10.02.06.01. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.06. Perlindungan Khusus Anak	TPN-10.02.06.01. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.06.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.06. Perlindungan Khusus Anak	TPN-10.02.06.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.06.03. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.06. Perlindungan Khusus Anak	TPN-10.02.06.03. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.06.04. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.06. Perlindungan Khusus Anak	TPN-10.02.06.04. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-10.02.06.05. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.06. Perlindungan Khusus Anak	TPN-10.02.06.05. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.06.06. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.06. Perlindungan Khusus Anak	TPN-10.02.06.06. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.06.07. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	TPN-10.02.06. Perlindungan Khusus Anak	TPN-10.02.06.07. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPN-10.02.06.08. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03. Pemberdayaan Perempuan	TPN-010. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak	TPN-10.02.06. Perlindungan Khusus Anak	TPN-10.02.06.08. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Dan Penyetaraan Gender		Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
.	RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02. Sosial	TPN-011. Pembangunan berkelanjutan antar sektor yang terpadu	TPN-11.01. Perekonomian Dan Pembangunan	.	.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
.	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.03. Ilmu Pengetahuan	TPN-011. Pembangunan berkelanjutan antar sektor yang terpadu	TPN-11.02. Penelitian Dan Pengembangan Daerah	.	.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
TPN-12.01.01.01. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-012. Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN-12.01. Pengelolaan Kearsipan	TPN-12.01.01. Pengelolaan Surat Menyurat	TPN-12.01.01.01. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-12.01.01.02. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-012. Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN-12.01. Pengelolaan Kearsipan	TPN-12.01.01. Pengelolaan Surat Menyurat	TPN-12.01.01.02. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-12.01.01.03. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-012. Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN-12.01. Pengelolaan Kearsipan	TPN-12.01.02. Pengelolaan Surat Menyurat	TPN-12.01.01.03. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-12.02.01. Pelayanan Fasilitas Kunjungan Tamu	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-012. Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN-12.02. Pengelolaan Kerumahtanggaan	TPN-12.02.01. Pelayanan Fasilitas Kunjungan Tamu	.	Bagian Umum dan Keuangan
TPN-12.02.02. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-012. Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN-12.02. Pengelolaan Kerumahtanggaan	TPN-12.02.02. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	.	Bagian Umum dan Keuangan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Bangunan Kantor							
TPN-12.02.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-012. Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN-12.02. Pengelolaan Kerumahtanggaan	TPN-12.02.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor		Bagian Umum dan Keuangan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-12.02.04. Penyediaan Makanan Dan Minuman	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-012. Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN-12.02. Pengelolaan Kerumahtanggaan	TPN-12.02.04. Penyediaan Makanan Dan Minuman		Bagian Umum dan Keuangan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-12.02.05. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-012. Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN-12.02. Pengelolaan Kerumahtanggaan	TPN-12.02.05. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Bagian Umum dan Keuangan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-12.02.06. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-012. Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN-12.02. Pengelolaan Kerumahtangaan	TPN-12.02.06. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bagian Umum dan Keuangan
TPN-12.03.01. Pengelolaan Pengadaan Tender	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-012. Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN-12.03. Pengadaan Barang Dan Jasa	TPN-12.03.01. Pengelolaan Pengadaan Tender		Bagian Umum dan Keuangan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-12.03.02. Pengelolaan Pengadaan Non Tender	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-012. Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	TPN-12.03. Pengadaan Barang Dan Jasa	TPN-12.03.02. Pengelolaan Pengadaan Non Tender		Bagian Umum dan Keuangan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-13.01.01.01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.04. Komunikasi	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.01. Pengelolaan Informasi	TPN-13.01.01. Informasi dan Komunikasi Publik	TPN-13.01.01.01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN-13.01.01.02. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.04. Komunikasi	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.01. Pengelolaan Informasi	TPN-13.01.01. Informasi dan Komunikasi Publik	TPN-13.01.01.02. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN-13.01.01.03. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.04. Komunikasi	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.01. Pengelolaan Informasi	TPN-13.01.01. Informasi dan Komunikasi Publik	TPN-13.01.01.03. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN-13.01.01.04. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.04. Komunikasi	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.01. Pengelolaan Informasi	TPN-13.01.01. Informasi dan Komunikasi Publik	TPN-13.01.01.04. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN-13.01.01.05. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.04. Komunikasi	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.01. Pengelolaan Informasi	TPN-13.01.01. Informasi dan Komunikasi Publik	TPN-13.01.01.05. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-13.01.01.06. Layanan Hubungan Media	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.03. Informasi	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.01. Pengelolaan Informasi	TPN-13.01.01. Informasi dan Komunikasi Publik	TPN-13.01.01.06. Layanan Hubungan Media	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN-13.01.01.07. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.03. Informasi	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.01. Pengelolaan Informasi	TPN-13.01.01. Informasi dan Komunikasi Publik	TPN-13.01.01.07. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN-13.02.01.01. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.03. Informasi	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.02. Pengelolaan Aplikasi	TPN-13.02.01. Pengelolaan Aplikasi Informatika	TPN-13.02.01.01. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN-13.02.01.02. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.03. Informasi	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.02. Pengelolaan Aplikasi	TPN-13.02.01. Pengelolaan Aplikasi Informatika	TPN-13.02.01.02. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN-13.02.01.03. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.03. Informasi	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.02. Pengelolaan Aplikasi	TPN-13.02.01. Pengelolaan Aplikasi Informatika	TPN-13.02.01.03. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN-13.02.01.04. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.02. Pengelolaan Aplikasi	TPN-13.02.01. Pengelolaan Aplikasi Informatika	TPN-13.02.01.04. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Kabupaten/Kota							
TPN-13.02.01.05. Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.03. Informasi	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.02. Pengelolaan Aplikasi	TPN-13.02.01. Pengelolaan Aplikasi Informatika	TPN-13.02.01.05. Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN-13.02.01.06. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.02. Pengelolaan Aplikasi	TPN-13.02.01. Pengelolaan Aplikasi Informatika	TPN-13.02.01.06. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN-13.02.01.07. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.04. Komunikasi	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.02. Pengelolaan Aplikasi	TPN-13.02.01. Pengelolaan Aplikasi Informatika	TPN-13.02.01.07. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN-13.02.02.01. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.03. Informasi	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.02. Pengelolaan Aplikasi	TPN-13.02.02. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	TPN-13.02.02.01. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN-13.02.02.02. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.03. Informasi	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.02. Pengelolaan Aplikasi	TPN-13.02.02. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	TPN-13.02.02.02. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan	Dinas Komunikasi dan Informatika

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Non Elektronik						Non Elektronik	
TPN-13.02.02.03. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.03. Informasi	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.02. Pengelolaan Aplikasi	TPN-13.02.02. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	TPN-13.02.02.03. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN-13.03.01.01. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.03. Informasi	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.03. Pengelolaan Satu Data Indonesia	TPN-13.03.01. Penyelenggaraan Statistik Sektoral	TPN-13.03.01.01. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN-13.03.01.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.03. Informasi	TPN-013. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	TPN-13.03. Pengelolaan Satu Data Indonesia	TPN-13.03.01. Penyelenggaraan Statistik Sektoral	TPN-13.03.01.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
TPN-14.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	TPN-014. Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN-14.01. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TPN-14.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
TPN-14.01.02. Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	TPN-014. Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN-14.01. Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	TPN-14.01.02. Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
TPN-14.01.03. Koordinasi Perubahan Dokumen Perencanaan	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	TPN-014. Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN-14.01. Koordinasi Dan Sinkronisasi	TPN-14.01.03. Koordinasi Perubahan Dokumen	.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
Perangkat Daerah				Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah		
TPN-14.01.04. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN-014. Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN-14.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TPN-14.01.04. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd		Badan Keuangan dan Aset Daerah
TPN-14.01.05. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN-014. Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN-14.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TPN-14.01.05. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn		Badan Keuangan dan Aset Daerah
TPN-14.01.06. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN-014. Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN-14.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TPN-14.01.06. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd		Badan Keuangan dan Aset Daerah
TPN-14.01.07. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN-014. Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN-14.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TPN-14.01.07. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd		Badan Keuangan dan Aset Daerah
TPN-14.01.08. Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN-014. Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN-14.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TPN-14.01.08. Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Badan Keuangan dan Aset Daerah
TPN-14.03.02. Inventarisasi Barang Milik Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN-014. Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN-14.03. Pengelolaan Barang Milik Daerah	TPN-14.03.02. Inventarisasi Barang Milik Daerah		Badan Keuangan dan Aset Daerah

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-14.03.03. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN-014. Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN-14.03. Pengelolaan Barang Milik Daerah	TPN-14.03.03. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	.	Badan Keuangan dan Aset Daerah
TPN-14.03.04. Penghapusan Barang Milik Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN-014. Pengelolaan akuntabilitas perencanaan dan keuangan	TPN-14.03. Pengelolaan Barang Milik Daerah	TPN-14.03.04. Penghapusan Barang Milik Daerah	.	Badan Keuangan dan Aset Daerah
TPN-15.01.01. Audit Program Pembangunan Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.02. Keuangan	TPN-015. Pengelolaan Peningkatan Sistem Manajemen Pengawasan	TPN-15.01. Penyelenggaraan Pengawasan	TPN-15.01.01. Audit Program Pembangunan Daerah	.	Inspektorat
TPN-15.01.02. Penegakan Disiplin Asn	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-015. Pengelolaan Peningkatan Sistem Manajemen Pengawasan	TPN-15.01. Penyelenggaraan Pengawasan	TPN-15.01.02. Penegakan Disiplin Asn	.	Inspektorat
TPN-15.02.01. Pendampingan Audit	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-015. Pengelolaan Peningkatan Sistem Manajemen Pengawasan	TPN-15.02. Pendampingan Dan Asistensi Administrasi Daerah	TPN-15.02.01. Pendampingan Audit	.	Inspektorat
TPN-15.02.02. Asistensi Administrasi Daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.06. Aparatur Negara	TPN-015. Pengelolaan Peningkatan Sistem Manajemen Pengawasan	TPN-15.02. Pendampingan Dan Asistensi Administrasi Daerah	TPN-15.02.02. Asistensi Administrasi Daerah	.	Inspektorat
TPN-15.03.01. Evaluasi Perencanaan dan Pendanaan	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	TPN-015. Pengelolaan Peningkatan Sistem Manajemen Pengawasan	TPN-15.03. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TPN-15.03.01. Evaluasi Perencanaan dan Pendanaan	.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
TPN-15.03.02. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB 09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	TPN-015. Pengelolaan Peningkatan Sistem Manajemen Pengawasan	TPN-15.03. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TPN-15.03.02. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
TPN-15.03.03.01. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-015. Pengelolaan Peningkatan Sistem Manajemen Pengawasan	TPN-15.03. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TPN-15.03.03. Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	TPN-15.03.03.01. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum

Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ RAB Level 5 (Dependency)	→ RAB Level 6 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
TPN-15.03.03.02. Fasilitasi Bantuan Hukum	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-015. Pengelolaan Peningkatan Sistem Manajemen Pengawasan	TPN-15.03. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TPN-15.03.04. Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	TPN-15.03.03.02. Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum
TPN-15.03.03.03. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	RAB 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01. Hukum	TPN-015. Pengelolaan Peningkatan Sistem Manajemen Pengawasan	TPN-15.03. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TPN-15.03.05. Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	TPN-15.03.03.03. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum

3.3. Arsitektur Data

A. Katalog Entitas Data

Data yang dikelola pada SPBE merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari obyek-obyek kerja untuk memberikan gambaran yang lebih luas terkait dengan suatu pelayanan maupun pengelolaan pemerintahan. Setiap data yang dikelola memungkinkan berupa data yang bersifat publik dan memungkinkan bersifat privat. Berdasarkan dari hasil survei yang dilaksanakan terhadap seluruh SKPD di Kabupaten Tapin. Selanjutnya daftar data yang ada selaraskan dengan referensi arsitektur data SPBE nasional. Berikut ini disajikan daftar data secara mendetail yang dikelola oleh SKPD di Kabupaten Tapin.

Tabel 3.3.1 Daftar Data yang dikelola oleh SKPD di Kabupaten Tapin

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data-001	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	Terbatas	Text	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	Layanan Profil Kepegawaian	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.06. Data Aparatur Sipil Negara
Data-002	Data Gaji	Data Gaji Pegawai	Terbatas	Text	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	Layanan Gaji Berkala	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.06. Data Aparatur Sipil Negara
Data-003	Data TPP	Data TPP	Terbatas	Text	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	Layanan TPP	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.06. Data Aparatur Sipil Negara
Data-004	Data Pelatihan	Data Pelatihan	Terbuka	Text	Harian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	Layanan Pelatihan ASN	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.06. Data Aparatur Sipil Negara

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data-005	Data Parpol	Data Parpol	Terbuka	Text	Bulanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TPN-09.03. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	Layanan Pendataan dan Permohonan SKT	RAD 05. Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD 05.02. Data Keamanan
Data-006	Data Ormas	Data Ormas	Terbuka	Text	Bulanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TPN-09.03. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	Layanan Pendataan dan Permohonan SKT	RAD 05. Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD 05.02. Data Keamanan
Data-007	Data Anggaran / Keuangan	Data Anggaran/keuangan daerah	Terbatas	Text	Bulanan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TPN-14.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan data anggaran	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.02. Data Keuangan
Data-008	Data Transaksi Tuntunan Bendahara	Data Transaksi Tuntunan Bendahara	Terbatas	Text	Harian	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TPN-14.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan Keuangan	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.02. Data Keuangan
Data-009	Data Perencanaan Keuangan	Data Perencanaan Keuangan	Terbatas	Text	Harian	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TPN-14.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.02. Data Keuangan
Data-010	Data Logistik	Data Logistik Bantuan	Terbuka	Text	Realtime	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TPN-06.04. Penyiapan Tangguh Bencana	Layanan Informasi dan Bantuan	RAD 10. Data Pendukung Umum	RAD 10.04. Data Dukung Lainnya
Data-011	Data Pajak Retribusi Daerah	Data Pajak Retribusi Daerah	Terbatas	Text	Harian	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	TPN-03.05. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan keuangan	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.02. Data Keuangan
Data-012	Data Penetapan dan Penerimaan Daerah	Data Penetapan dan Penerimaan Daerah	Terbatas	Text	Harian	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	TPN-03.05. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Retribusi Daerah	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.02. Data Keuangan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data-013	Data Informasi Pelayanan Masyarakat	Landing Page (Usulan Masyarakat, Layanan Pengaduan, Layanan Konsultasi)	Terbuka	Text	Realtime	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN-15.03. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Layanan Pengaduan Masyarakat	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data-014	Data Inovasi dan Berita Penelitian dan Pembangunan	Sistem Informasi Inovasi dan Berita Penelitian dan Pembangunan	Terbuka	Text	Realtime	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN-11.02. Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Layanan Data Inovasi	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data-015	Data Perencanaan dan Penganggaran	Data Perencanaan dan Penganggaran	Terbatas	Text	Realtime	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN-14.01. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data-016	Data Perencanaan Pembangunan Daerah RKP	Data Perencanaan Pembangunan Daerah RKP	Terbatas	Text	Realtime	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN-14.01. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data-017	Data Monitoring Evaluasi	Data Monitoring Evaluasi	Terbatas	Text	Realtime	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN-15.03. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	layanan evaluasi	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data-018	Data DAK Fisik	Sistem Informasi DAK Fisik	Terbatas	Text	Realtime	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN-15.03. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data-019	Data Informasi Pembangunan	Data Informasi Pembangunan	Terbatas	Text	Tahunan	Badan Perencanaan Pembangunan	TPN-15.03. Pengendalian Dan	Layanan Perencanaan Dan	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
	Daerah	Daerah				Penelitian dan Pengembangan	Evaluasi Pembangunan Daerah	Penganggaran		
Data-020	Data Informasi Pemerintahan	Data Informasi Pemerintahan	Terbuka	Text	Harian	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol		Layanan Informasi Pemerintahan	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.03. Data Informasi
Data-021	Data Sosial	Data Sosial	Terbuka	Text	Realtime	Bagian Kesejahteraan Rakyat	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	Layanan informasi pemerintahan, informasi sosial kemasyarakatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.02. Data Sosial
Data-022	Data Akuntabilitas Kinerja	Data Akuntabilitas Kinerja	Terbatas	Text	Realtime	Bagian Organisasi	TPN-08.01. Peningkatan Tata Kelola Organisasi	Layanan pelaporan dan akuntabilitas	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.06. Data Aparatur Sipil Negara
Data-023	Data Pengadaan Barang dan Jasa	Data Pengadaan Barang dan Jasa	Terbuka	Text	Realtime	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	TPN-12.03. Pengadaan Barang Dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD 10. Data Pendukung Umum	RAD 10.04. Data Dukung Lainnya
Data-024	Data Kebudayaan	Data Kebudayaan	Terbuka	Text	Realtime	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	TPN-04.02. Pelestarian Kebudayaan	Layanan Informasi, Kebudayaan, Wisata, Ekonomi Kreatif	RAD 08. Informasi Budaya dan Agama	RAD 08.02. Data Kebudayaan
Data-025	Data Pariwisata	Data Pariwisata				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	TPN-04.03. Peningkatan Pariwisata	Layanan Informasi, Kebudayaan, Wisata, Ekonomi Kreatif	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.11. Data Pariwisata
Data-026	Data Survey Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Publik	Terbuka	Text	Harian	Bagian Organisasi	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	Layanan pengaduan masyarakat	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.04. Data Komunikasi
Data-027	Data Kependudukan	Data Kependudukan	Terbuka	Text	Harian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	Layanan Kependudukan	RAD 03. Pembangunan Wilayah	RAD 03.07. Data Kependudukan
Data-028	Data Informasi, Layanan, Kesehatan	Data Informasi, Layanan, Kesehatan	Terbuka	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data-029	Data Stunting	Data Stunting	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-030	Data Gizi	Data Gizi	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-031	Data Malaria	Data Malaria	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-032	Data Ketersediaan Obat	Data Ketersediaan Obat	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-033	Data Penyakit	Data Penyakit	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-034	Data Imunisasi	Data Imunisasi	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-035	Data kesehatan Ibu dan Balita	Data kesehatan Ibu dan Balita	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-036	Data Covid	Data Covid	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Covid-19	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-037	Data Antigen dan PCR	Data Antigen dan PCR	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Covid-19	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-038	Data Kematian	Data Kematian	Terbatas	Text	Harian	Dinas Kesehatan	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	Layanan Kependudukan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-039	Data Harga Pangan	Data Harga Pangan	Terbuka	Text	Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan	TPN-05.02. Peningkatan	Layanan Informasi Data Harga Pangan,	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.03. Data Pertanian

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
							Kemandirian Pangan	Keamanan Pangan, Pengisian Lumbung Gabah, Dan Keamanan Pangan		
Data-040	Data Pembangunan Lumbung	Data Pembangunan Lumbung	Terbuka	Text	Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	Layanan Informasi Data Harga Pangan, Keamanan Pangan, Pengisian Lumbung Gabah, Dan Keamanan Pangan	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.03. Data Pertanian
Data-041	Data Pengisian Lumbung Gabah	Data Pengisian Lumbung Gabah	Terbuka	Text	Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	Layanan Informasi Data Harga Pangan, Keamanan Pangan, Pengisian Lumbung Gabah, Dan Keamanan Pangan	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.03. Data Pertanian
Data-042	Data Keamanan Pangan	Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Terbuka	Text	Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	Layanan Informasi Data Harga Pangan, Keamanan Pangan, Pengisian Lumbung Gabah, Dan Keamanan Pangan	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.03. Data Pertanian
Data-043	Data Pembinaan Kelompok Wanita Tani	Pembinaan Kelompok Wanita Tani	Terbuka	Text	Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	Layanan Pembinaan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.03. Data Pertanian
Data-044	Data Keanekaragaman Pangan	Data Keanekaragaman Pangan	Terbuka	Text	Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	Layanan Informasi Data Harga Pangan, Keamanan Pangan, Pengisian Lumbung Gabah, Dan Keamanan Pangan	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.03. Data Pertanian

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data-045	Data Aduan	Data Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat	Terbatas	Text	Harian	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPN-13.01. Pengelolaan Informasi	Layanan Pengaduan Masyarakat	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.04. Data Komunikasi
Data-046	Data Evaluasi SPBE	Data Evaluasi SPBE	Terbatas	Text	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPN-13.03. Pengelolaan Satu Data Indonesia	Layanan Evaluasi	RAD 10. Data Pendukung Umum	RAD 10.01. Kebijakan Pemerintah
Data-047	Data Identifikasi TIK	Data Identifikasi TIK	Terbuka	Text	Bulanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPN-13.01. Pengelolaan Informasi	Layanan Identifikasi Data	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.03. Data Informasi
Data-048	Data Profil Dinas, Kegiatan, Berita	Data Profil Dinas, Kegiatan, Berita	Terbuka	Text	Harian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TPN-13.01. Pengelolaan Informasi	Layanan Informasi Profil Dinas	RAD 10. Data Pendukung Umum	RAD 10.02. Data Manajemen Kegiatan
Data-049	Data Laporan Jalan dan Jembatan	Data Laporan Jalan dan Jembatan	Terbuka	Text	Harian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	Layanan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data-050	Data Informasi dan Keuangan	Data Perencanaan Keuangan	Terbatas	Text	Realtime	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TPN-14.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan Keuangan	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.02. Data Keuangan
Data-051	Data Perkawinan Usia Di Bawah Umur, Data Usaha Rumahan, Data Kekerasan Pada Perempuan	Data Perkawinan Usia Di Bawah Umur, Data Usaha Rumahan, Data Kekerasan Pada Perempuan	Terbuka	Text	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	TPN-10.02. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Penyetaraan Gender	Layanan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga	RAD 05. Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD 05.03. Data Hak Asasi Manusia
Data-052	Data Kepemudaan	Data Kepemudaan	Terbuka	Text	Realtime	Dinas Pemuda dan Olahraga	TPN-05.03. Pembinaan	Layanan Pembinaan Pengolahan Dan	RAD 08. Informasi Budaya dan Agama	RAD 08.03. Data Olahraga

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
	dan Olahraga	dan Olahraga					Kepemudaan	Pemasaran Hasil Pertanian		
Data-053	Data Perizinan OSS dan Non OSS	Data Perizinan OSS dan Non OSS	Terbatas	Text	Harian	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	TPN-03.02. Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Layanan Perizinan	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.07. Data Kesekretariatan Negara
Data-054	Data Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Data Pendidikan, Data SK, Data Guru	Terbuka	Text	Bulanan	Dinas Pendidikan	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	Layanan Kependidikan	RAD 06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD 06.01. Data Pendidikan
Data-055	Data Pendaftaran Siswa Baru	Data Pendaftaran Siswa Baru	Terbuka	Text	Harian	Dinas Pendidikan	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	Layanan Penerimaan Siswa Baru	RAD 06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD 06.01. Data Pendidikan
Data-056	Data Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran	Data Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran	Terbatas	Text	Realtime	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN-14.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan Data Anggaran	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.02. Data Keuangan
Data-057	Data Guru dan Siswa	Data Guru dan Siswa	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Pendidikan	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	Layanan Kependidikan	RAD 06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD 06.01. Data Pendidikan
Data-058	Data Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAK	Aplikasi Pelaporan, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAK	Terbuka	Text	Realtime	Bagian Perencanaan dan Keuangan	TPN-15.03. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Layanan Evaluasi	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.02. Data Keuangan
Data-059	Data Pencatatan Dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Data Pencatatan Dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	Layanan Keluarga Berencana	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.03. Data Pemberdayaan Perempuan

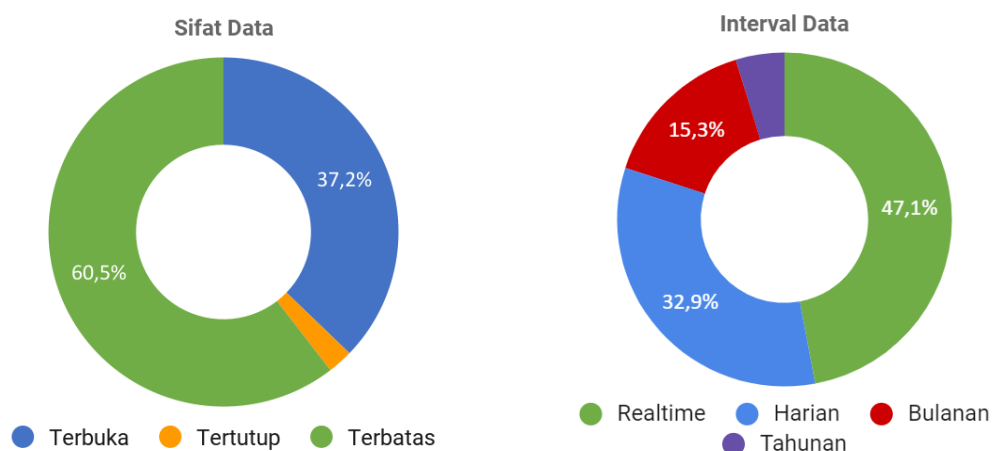
ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data-060	Data Keluarga Berencana	Data Keluarga Berencana	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	Layanan Keluarga Berencana	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data-061	Data Kinerja PKB/PLKB	Data Kinerja PKB/PLKB	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	Layanan Keluarga Berencana	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data-062	Data Kekeluargaan	Data Kekeluargaan	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	Layanan Konsultasi Keluarga	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data-063	Data Alat dan Obat Kontrasepsi	Data Alat dan Obat Kontrasepsi	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	Layanan Keluarga Berencana	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data-064	Data Kampung KB	Data Statistik Kampung KB	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	Layanan Keluarga Berencana	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data-065	Data Retribusi Pasar	Data Retribusi Pasar	Terbatas	Text	Harian	Dinas Perdagangan	TPN-03.04. Pengelolaan Perdagangan	Layanan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.02. Data Perdagangan
Data-066	Data informasi Lalu Lintas dan Angkutan	Data informasi Lalu Lintas dan Angkutan	Terbuka	Text	Realtime	Dinas Perhubungan	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	Layanan Informasi Lingkungan Perhubungan Dan Keselamatan	RAD 10. Data Pendukung Umum	RAD 10.03. Data Kewilayahan
Data-067	Data Perikanan	Data Budidaya Perikanan dan Usaha Perikanan	Terbatas	Text	Tahunan	Dinas Perikanan	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	Layanan Data Informasi Perikanan	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.06. Data Perikanan
Data-068	Data Perpustakaan dan Katalog	Data Perpustakaan dan Katalog	Terbatas	Text	Harian	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	Layanan Perpustakaan	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.07. Data Kesekretariatan Negara

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data-069	Data Arsip Statis dan Arsip Dinamis	Data Arsip Statis dan Arsip Dinamis	Terbatas	Text	Harian	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TPN-12.01. Pengelolaan Kearsipan	Layanan Surat Menyurat Dan Arsip Dinamis	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.07. Data Kesekretariatan Negara
Data-070	Data Pertanian	Data Pertanian	Terbuka	Text	Harian	Dinas Pertanian	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	Layanan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.03. Data Pertanian
Data-071	Data Perumahan dan Komplek	Data Perumahan dan Komplek	Terbuka	Text	Realtime	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	TPN-06.03. Pemanfaatan Tata Ruang	Layanan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	RAD 03. Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.04. Data Perumahan
Data-072	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Terbatas	Text	Bulanan	Dinas Sosial	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	Layanan DTKS(Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.02. Data Sosial
Data-073	Data Ketenagakerjaan	Data Ketenagakerjaan	Terbuka	Text	Realtime	Dinas Tenaga Kerja	TPN-01.02. Fasilitas SDM Unggul	Layanan Terpadu Ketenagakerjaan	RAD 06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD 06.02. Data Ketenagakerjaan
Data-074	Data Tindak Lanjut	Data Pelaporan ASN dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Terbatas	Text	Realtime	Inspektorat	TPN-15.01. Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pelaporan Dan Akuntabilitas	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data-075	Data Medis	Data Medis	Tertutup	Text	Bulanan	RSUD Datu Sanggul	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-076	Data Pasien	Data Pasien	Terbatas	Text	Realtime	RSUD Datu Sanggul	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Pendaftaran Pasien	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-077	Data Produk Hukum	Data Informasi Produk Hukum	Terbuka	Text	Realtime	Sekretariat DPRD	TPN-13.01. Pengelolaan Informasi	Layanan Informasi Produk Hukum	RAD 05. Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD 05.01. Data Hukum
Data-078	Data TTD Elektronik	Data TTD Elektronik	Terbatas/Tertutup	Text	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPN-13.03. Pengelolaan Satu Data	Layanan Identifikasi Data	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.03. Data Informasi

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
							Indonesia			
Data-079	Data Informasi Keluarga	Data Informasi Keluarga	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	Layanan Konsultasi Keluarga	RAD 03. Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.07. Data Kependudukan
Data-080	Data Harta Kekayaan ASN	Data Harta Kekayaan ASN	Terbatas	Text	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	Layanan Profil Kepegawaian	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.06. Data Aparatur Sipil Negara
Data-081	Data Reformasi Birokrasi	Data Reformasi Birokrasi	Terbatas	Text	Realtime	Bagian Organisasi	TPN-08.01. Peningkatan Tata Kelola Organisasi	Layanan Informasi, Birokrasi Dan Tata Lakasana	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data-082	Data Industri	Data Industri	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Perindustrian	TPN-03.03. Pengelolaan Perindustrian	Layanan Produk UMKM	RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.01. Data Industri
Data-083	Data KKN	Data KKN	Terbatas	Text	Realtime	Inspektorat	TPN-15.01. Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pelaporan Dan Akuntabilitas	RAD 09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.06. Data Aparatur Sipil Negara
Data-084	Data Kesehatan Haji	Data Kesehatan Haji	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Kesehatan	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01. Data Kesehatan
Data-085	Data Ekonomi Sosial	Data Ekonomi Sosial	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Perindustrian	TPN-03.03. Pengelolaan Perindustrian	Layanan Informasi, Birokrasi Dan Tata Lakasana	RAD 04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.02. Data Sosial
Data-086	Data Pemerintahan Desa	Data Pemerintahan Desa	Terbatas	Text	Realtime	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	TPN-14.01. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Layanan Informasi Keuangan Desa	RAD 03. Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.05. Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal

B. Analisis Diagram Data

Analisa terhadap kondisi data eksisting dapat dijabarkan sebagai berikut :

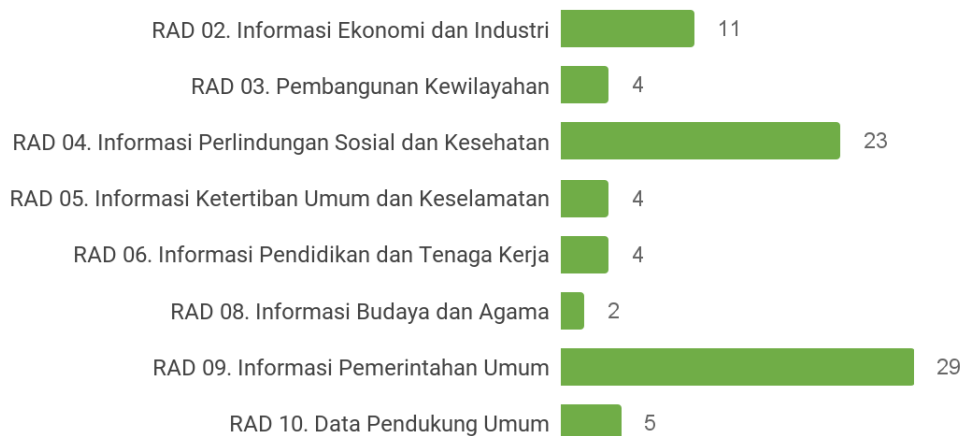


Grafik 3.3.1. Kondisi Data eksisting

Pada grafik 3.3.1 menunjukkan 2 diagram mengenai kondisi aplikasi eksisting sifat data dan interval data. Terdapat 86 data aplikasi eksisting yang berada di kabupaten Tapin. dari 86 data tersebut terbagi menjadi 3 sifat data dengan 37,2% (32 data) merupakan data yang bersifat terbuka atau dapat dilihat juga oleh publik, 2,3% (2 data) merupakan data yang bersifat tertutup atau rahasia, 60,5% (52 data) merupakan data yang bersifat terbatas.

Untuk Interval Update data eksisting di kabupaten Tapin menunjukkan 4 sifat interval data yaitu 47,1% (40 data) merupakan data dengan interval update realtime, 32,9% (28 data) merupakan data dengan interval update harian, 15,3% (13 data) merupakan data dengan interval update bulanan, dan 4,7% (4 data) merupakan data dengan interval update Tahunan.

RAD Level 1

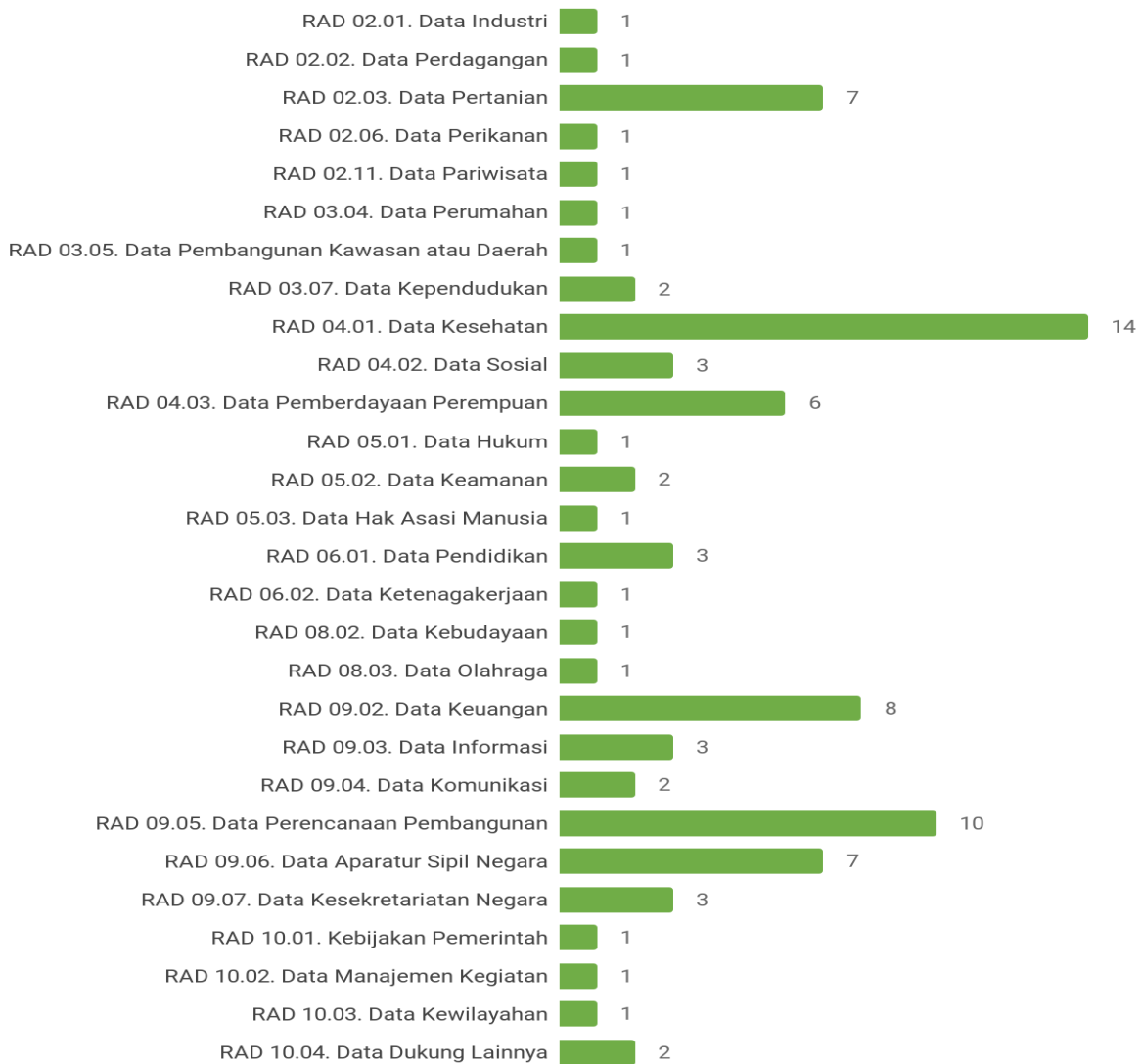


Grafik 3.3.2 RAD Level 1

Untuk Data Pokok penyesuaian dengan Standar Nasional. Dari total 82 data terbagi menjadi beberapa bagian dimana 11 Informasi Ekonomi dan Industri, 4 Informasi Ekonomi dan Industri, 23 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan, 4 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan, 4

Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja, 2 Informasi Budaya dan Agama, 29 Informasi Pemerintahan Umum, dan 5 merupakan Data Pendukung Umum.

RAD Level 2



Grafik 3.3.3 SKPD Penanggung Jawab Data

Pada Grafik 3.3.3 dapat dilihat SKPD penanggung jawab Data. Terdapat 1 Data Industri, 1 Data Perdagangan, 7 Data Pertanian, 1 Data perikanan, 1 Data Pariwisata, 1 Data Perumahan, 1 Data Pembangunan Kawasan dan Daerah Tertinggal, 2 Data Kependudukan, 14 Data Kesehatan, 3 Data Sosial, 6 Data Pemberdayaan Perempuan, 1 Data Hukum, 1 Data Hak Asasi Manusia, 3 Data pendidikan, 1 Data Ketenagakerjaan, 1 Dan Kebudayaan 1 Data Olahraga, 8 Data Keuangan, 3 Data Informasi, 2 Data Komunikasi, 10 Data Perencanaan Pembangunan Nasional, 7 Data Aparatur Sipil Negara, 3 Data Kesekretariatan Negara, 1 Data kebijakan Pemerintah, 1 Data Manajemen Kegiatan, 1 Data kewilayahan, dan 2 Data dukung lainnya.

3.4. **Arsitektur Layanan**

A. Diagram Layanan SPBE yang menjadi indikator dalam evaluasi

Diagram ini menjelaskan hubungan antara layanan, data, aplikasi di masing-masing SKPD khusus pada layanan yang di evaluasi oleh Kemenpan-RB dimulai dari indikator 32 hingga 47 dengan tujuan untuk memetakan mana saja proses yang perlu ditransformasi digitalkan dalam waktu dekat. Selain itu juga diagram ini menjelaskan layanan antar unit yang memiliki irisan dan memetakan kepemilikan data yg ada di masing-masing SKPD, sehingga terlihat jelas kedepan data-data mana saja yang bisa di berbagi pakaikan antar SKPD dan juga ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana integrasi antar sistem yang ada di Kabupaten Tapin. Berikut ini merupakan gambaran keterkaitan dari Layanan, Data, Aplikasi dan Teknologi.

1. Layanan Perencanaan

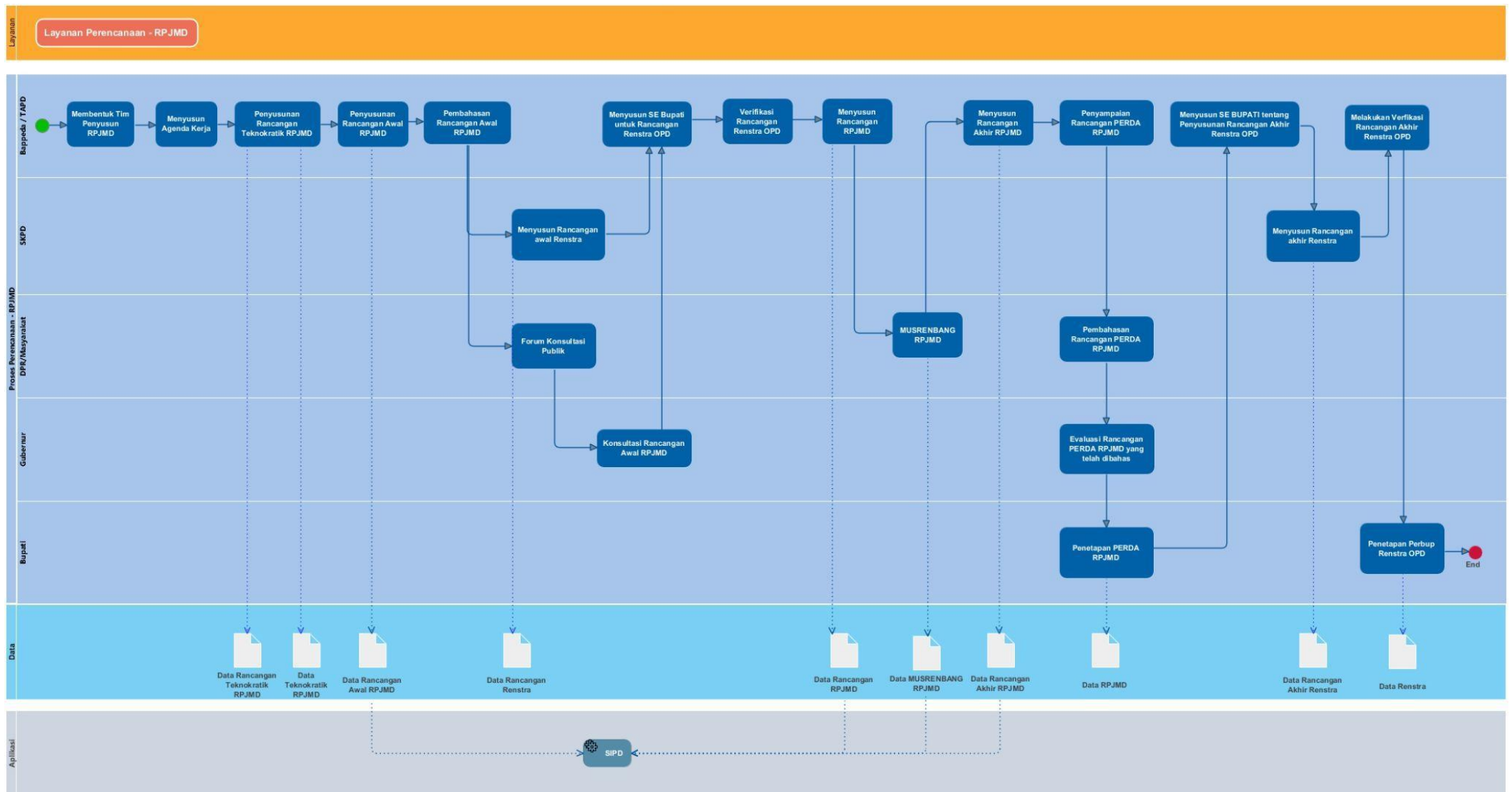
Dalam menunjang layanan perencanaan yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kab. Tapin yang mempunyai tugas melaksanakan di bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda melaksanakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
- d) Pelaksanaan tugas Bupati sebagai wakil pemerintah pusat di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- e) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

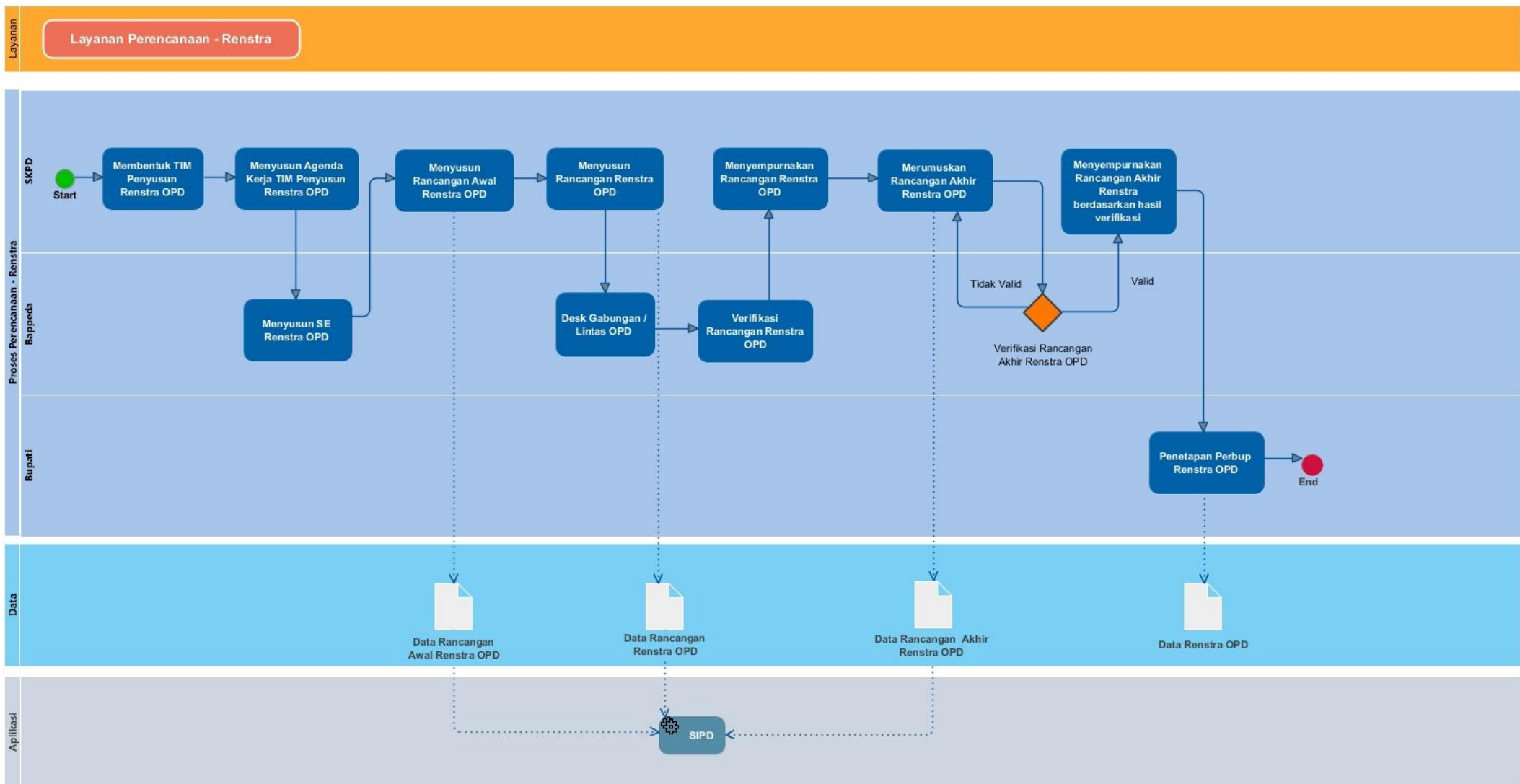
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan perencanaan yang terdapat di Bappeda adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.01 Perencanaan dan Program
3	Kategori Layanan	RAL.02.01.01 Layanan Penyusunan Dokumen RPJMD RAL.02.01.02 Layanan Penyusunan Dokumen Renstra RAL.02.01.03 Layanan Penyusunan Dokumen RKP

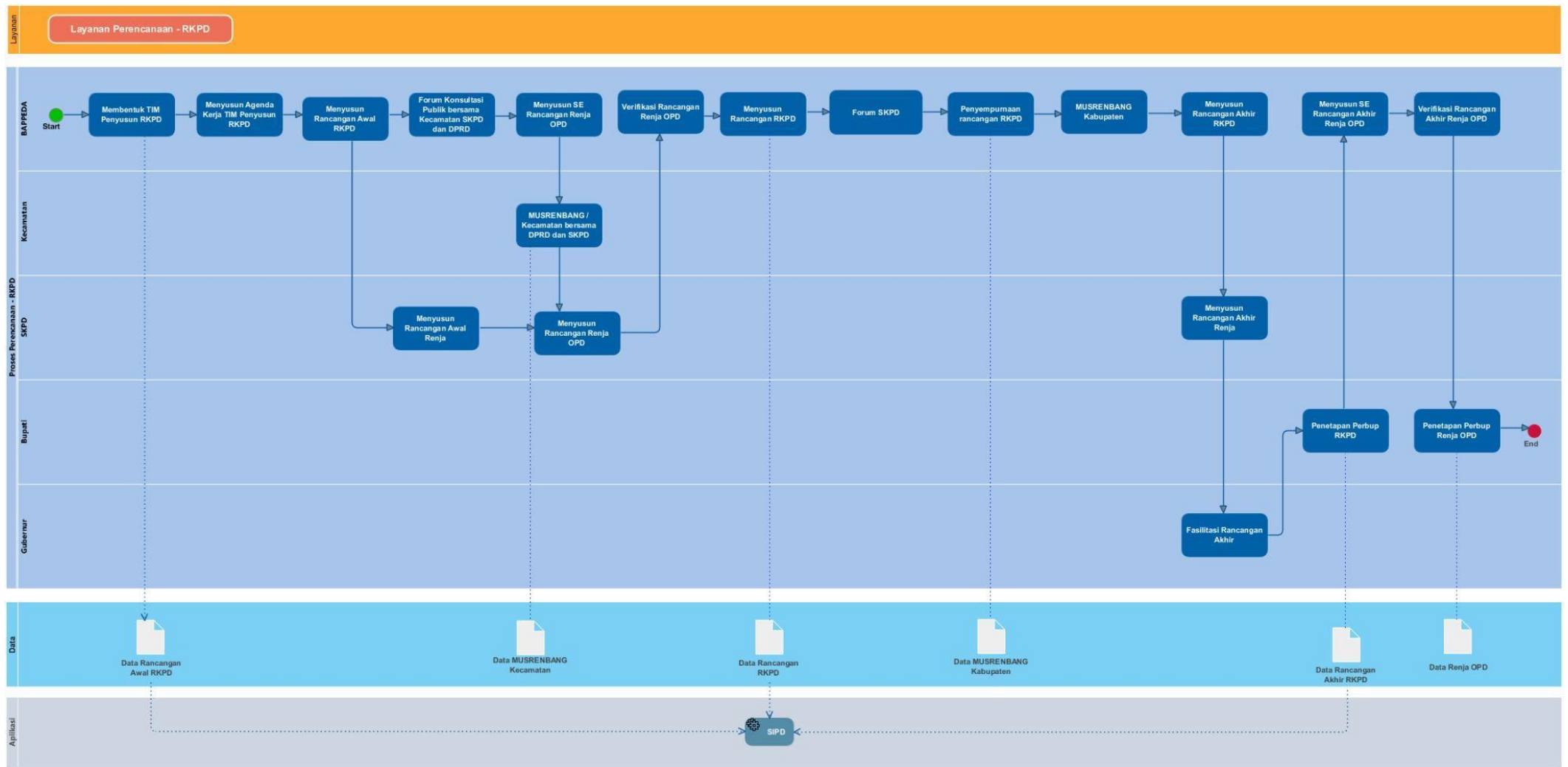
Bappeda memiliki 3 kategori layanan perencanaan yang melibatkan beberapa user seperti pada perencanaan RPJMD terdapat Bappeda/TAPD, SKPD terkait, DPR/Masyarakat, Gubernur, dan Bupati. Kemudian untuk Layanan Renstra terdapat SKPD Tapin, Bappeda, dan Bupati sebagai user. Yang terakhir adalah untuk layanan RKP terdapat Bappeda, Kecamatan, SKPD Tapin, Bupati, dan Gubernur sebagai user. Pada layanan perencanaan terdapat beberapa Aplikasi yang digunakan seperti SIKD dan SIPD.



Gambar 3.4.1 RAL.02.01.01 Layanan Penyusunan Dokumen RPJMD



Gambar 3.4.2 RAL.02.01.02 Layanan Penyusunan Dokumen Renstra



Gambar 3.4.3 RAL.02.01.03 Layanan Penyusunan Dokumen RKPD

2. Layanan Penganggaran

Dalam menunjang layanan penganggaran diampu oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mempunyai tugas penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

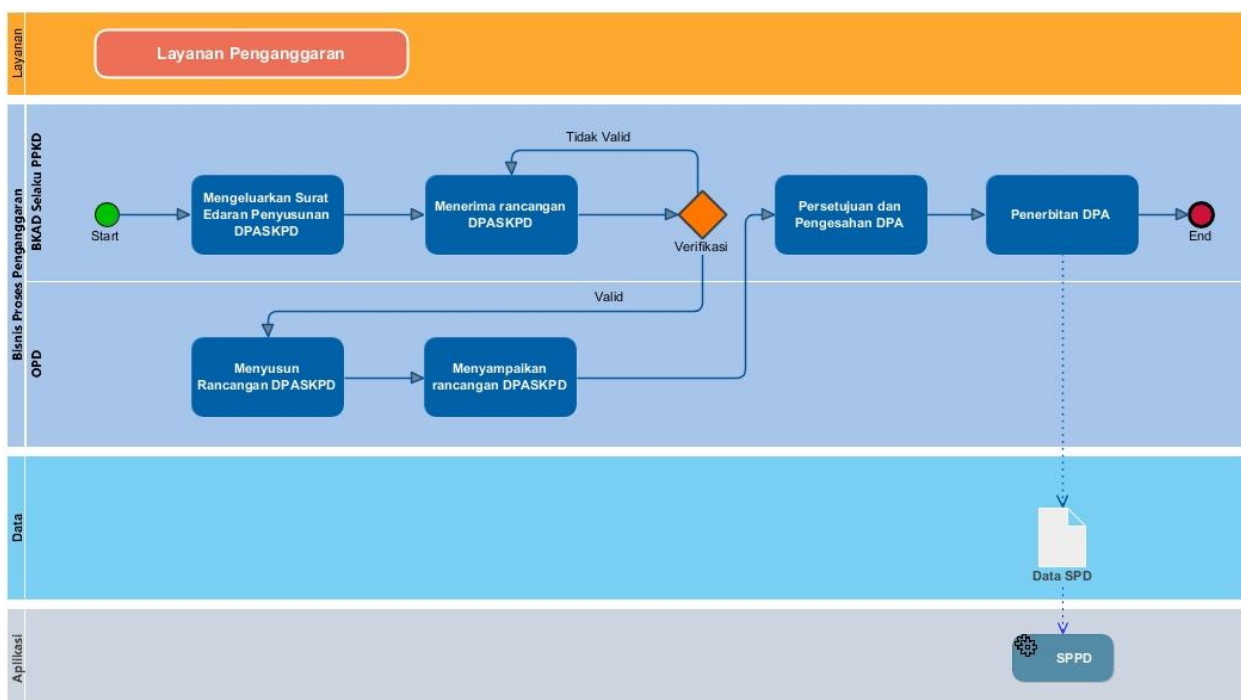
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, BKAD melaksanakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran; dan
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran.

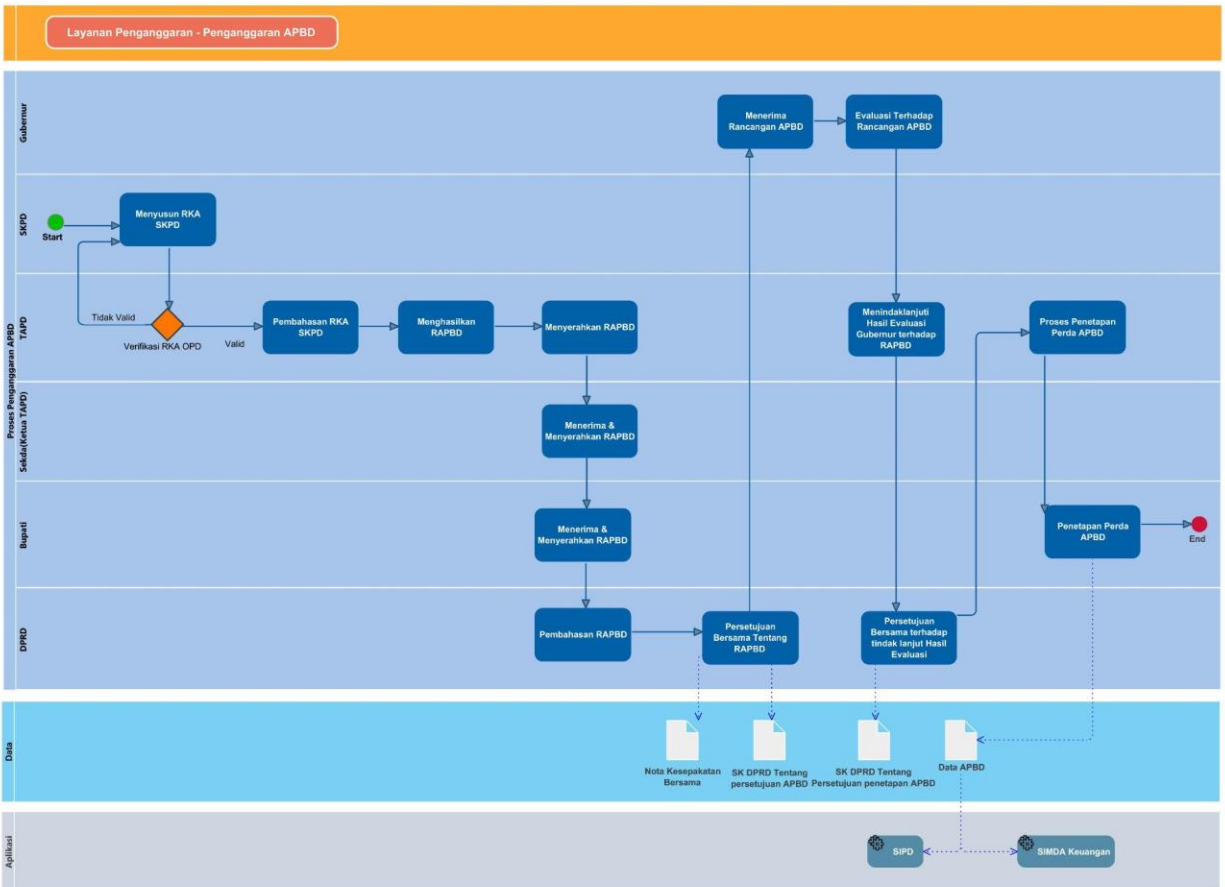
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan penganggaran yang terdapat di BKAD adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.02 Keuangan
3	Kategori Layanan	RAL.02.02.01 Layanan Penganggaran RAL.02.02.02 Layanan Perencanaan APBD RAL.02.02.03 Layanan Penganggaran APBD

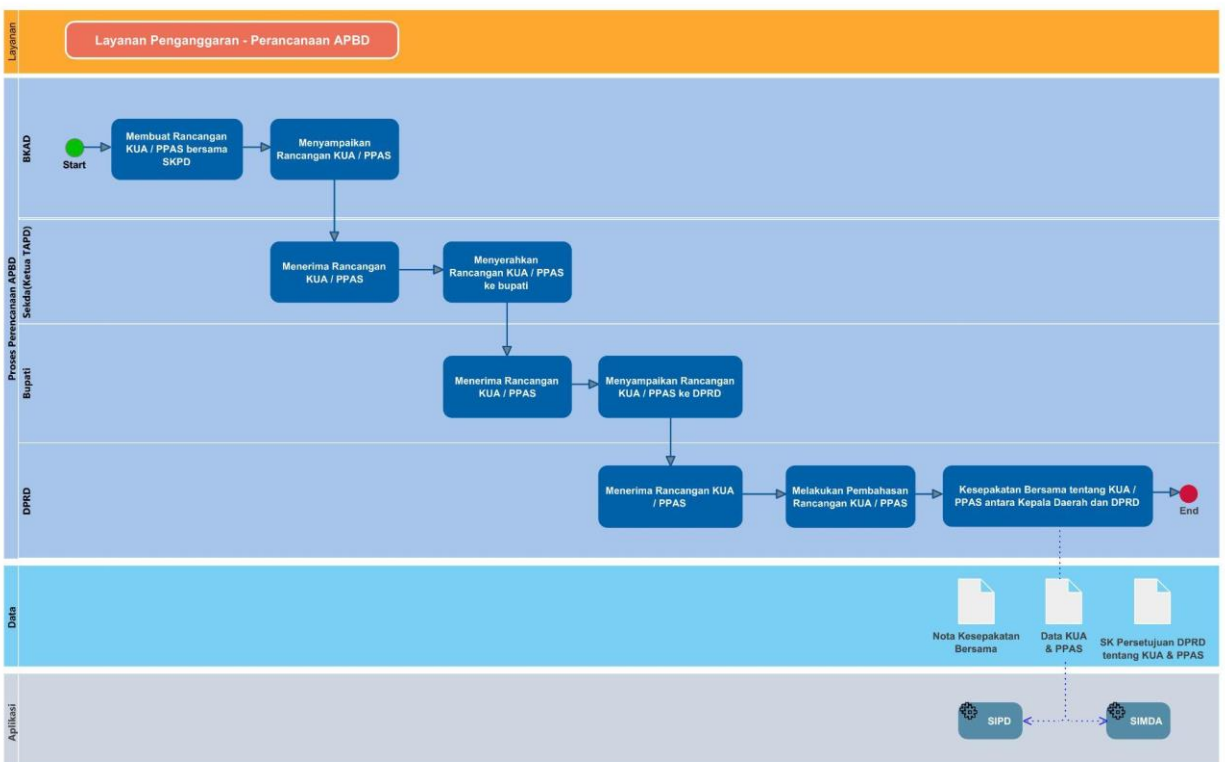
Badan Keuangan Dan Aset Daerah memiliki 3 kategori layanan penganggaran yaitu layanan penganggaran, perencanaan APBD, Penganggaran APBD yang melibatkan BKAD, SKPD, Sekda, Bupati, DPRD, Gubernur, TAPD. Pada layanan penganggaran ini terdapat beberapa Aplikasi yang digunakan Seperti SPPD pada layanan penganggaran kemudian SIPD dan SIMDA untuk layanan perencanaan dan penganggaran APBD .



Gambar 3.4.5 RAL.02.02.01 Layanan Penganggaran



Gambar 3.4.6 RAL.02.02.02 Layanan Penganggaran APBD



Gambar 3.4.5 RAL.02.02.01 Layanan Perencanaan APBD

3. Layanan Keuangan

Dalam menunjang layanan keuangan yang diampu oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mempunyai tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

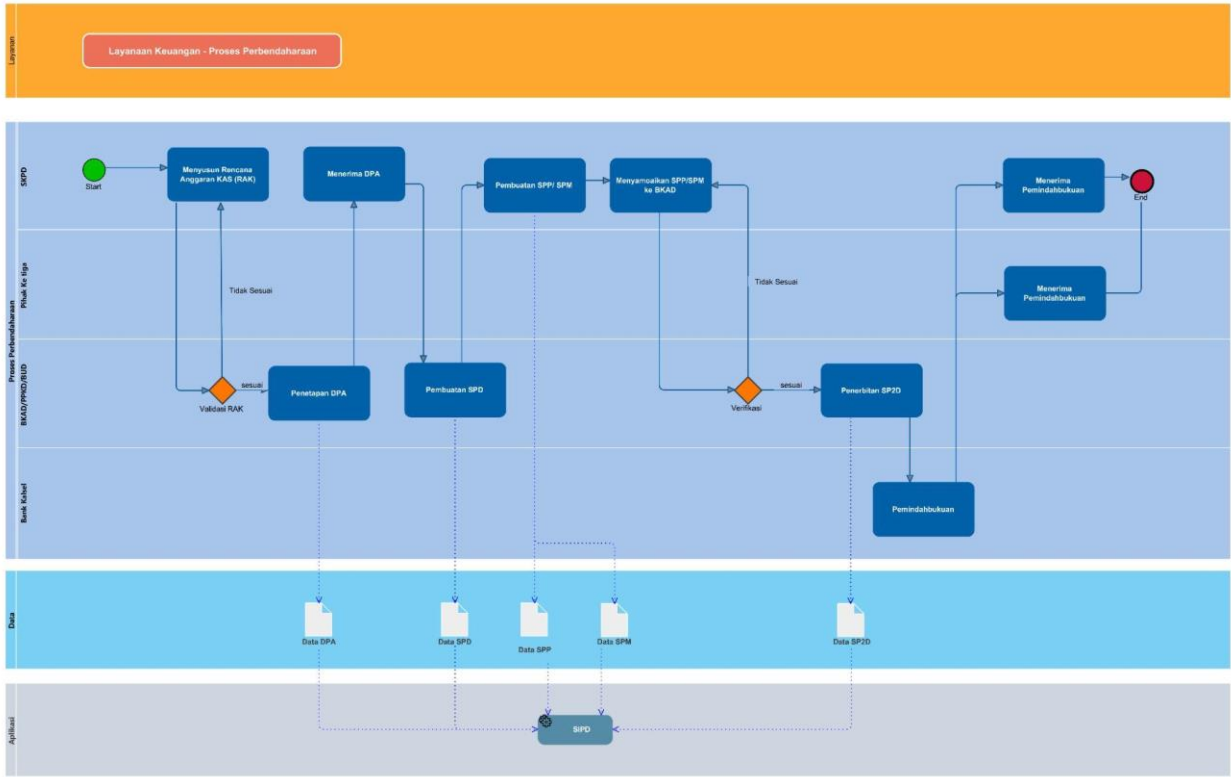
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKAD melaksanakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah.

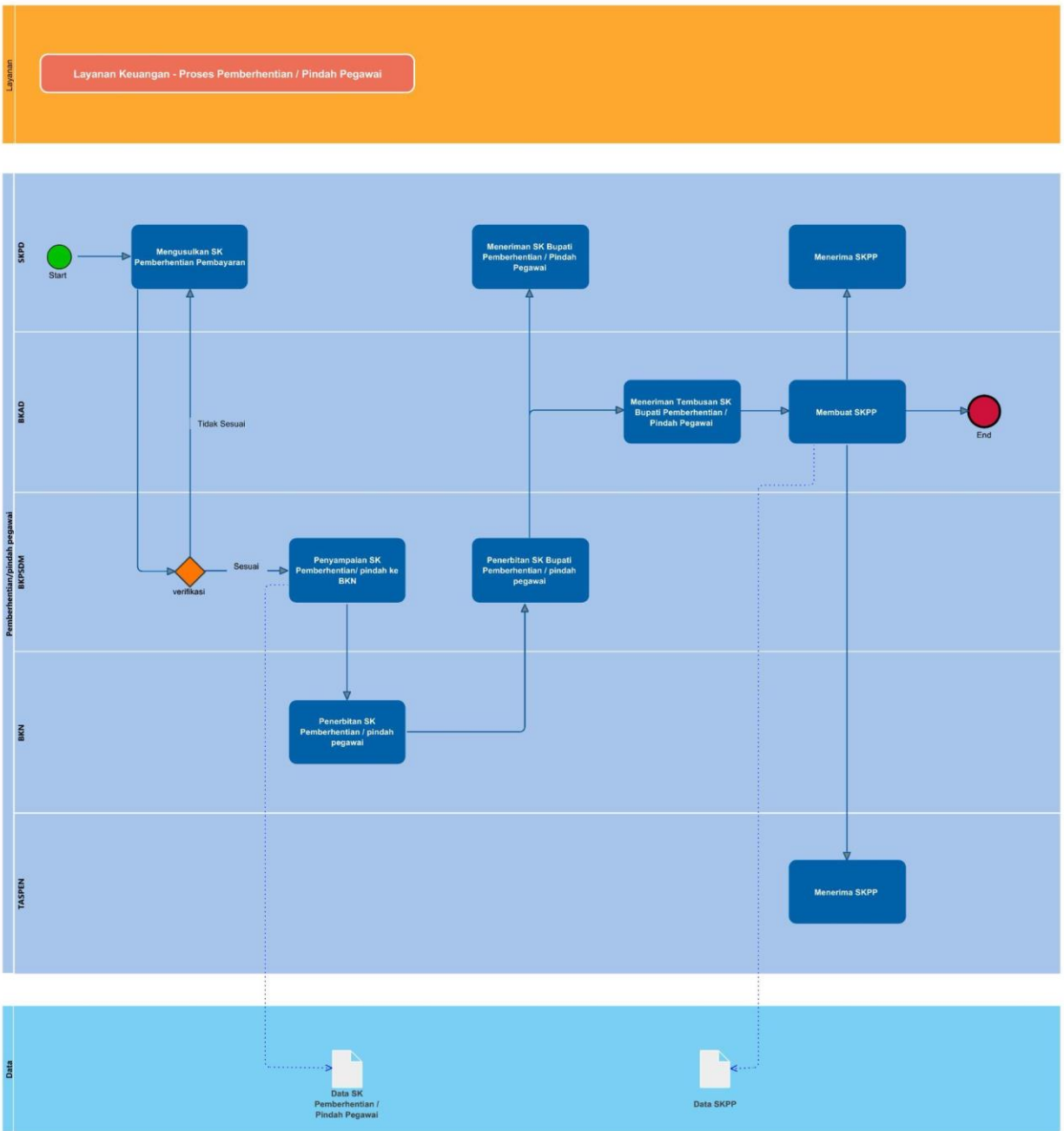
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan keuangan yang terdapat di BKAD adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.02 Keuangan
3	Kategori Layanan	RAL.02.02.01 Layanan Akuntansi RAL.02.02.02 Layanan Perbendaharaan

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah memiliki 2 kategori layanan keuangan yaitu layanan akuntansi dan layanan perbendaharaan yang melibatkan SKPD, BPKD/PPKD, TAPD, Bupati, DPRD, Gubernur untuk layanan akuntansi dan SKPD, Pihak ke-Tiga, BKAD/PPKD, BUD, Bank Kalsel untuk layanan perbendaharaan. Pada layanan keuangan ini Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi SIPD.



Gambar 3.4.7 RAL.02.02.03 Layanan Proses Perbendaharaan



Gambar 3.4.8 RAL.02.02.04 Layanan Proses pemberhentian/pindah pegawai

4. Layanan Pengelolaan Aset

Dalam menunjang layanan pengelolaan aset yang diampu oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang mempunyai tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

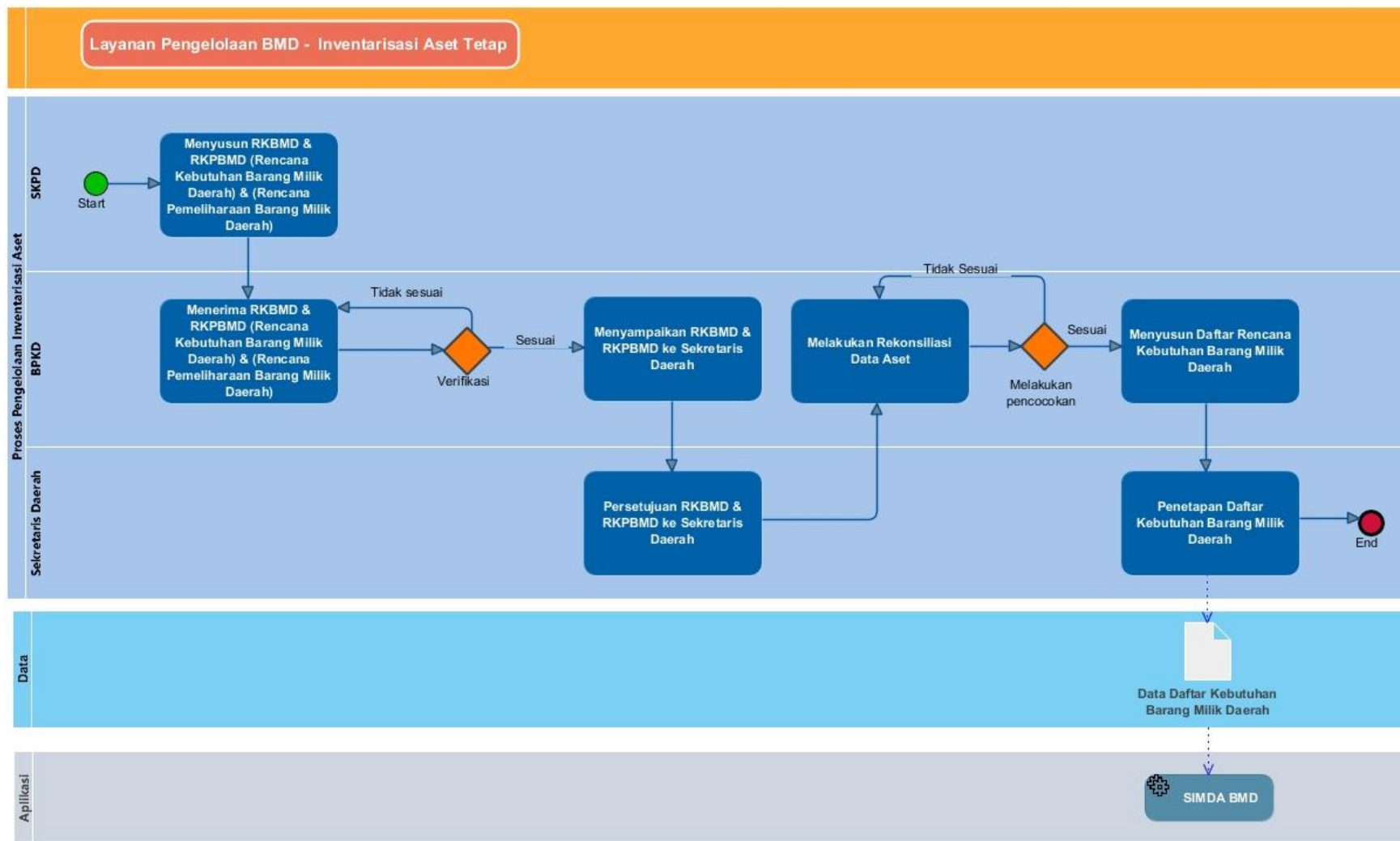
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKAD melaksanakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Aset Daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Aset Daerah;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Aset Daerah; dan
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Aset Daerah.

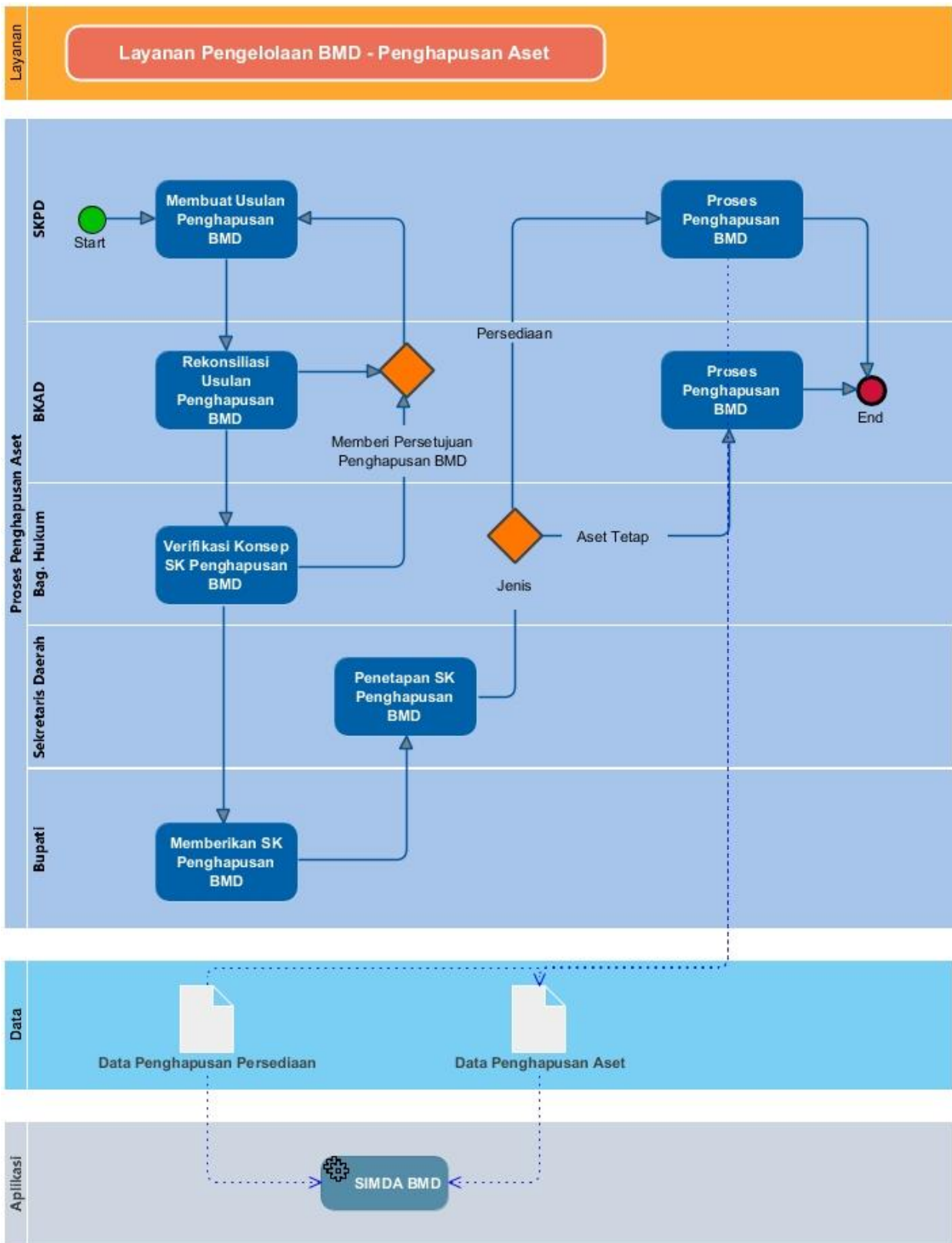
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan pengelolaan aset yang terdapat di BKAD adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.07 Dukungan Umum Organisasi
3	Kategori Layanan	RAL.02.07.01 Layanan Pelaporan BMD RAL.02.07.02 Layanan Pengelolaan Aset RAL.02.07.03 Layanan Penghapusan Aset

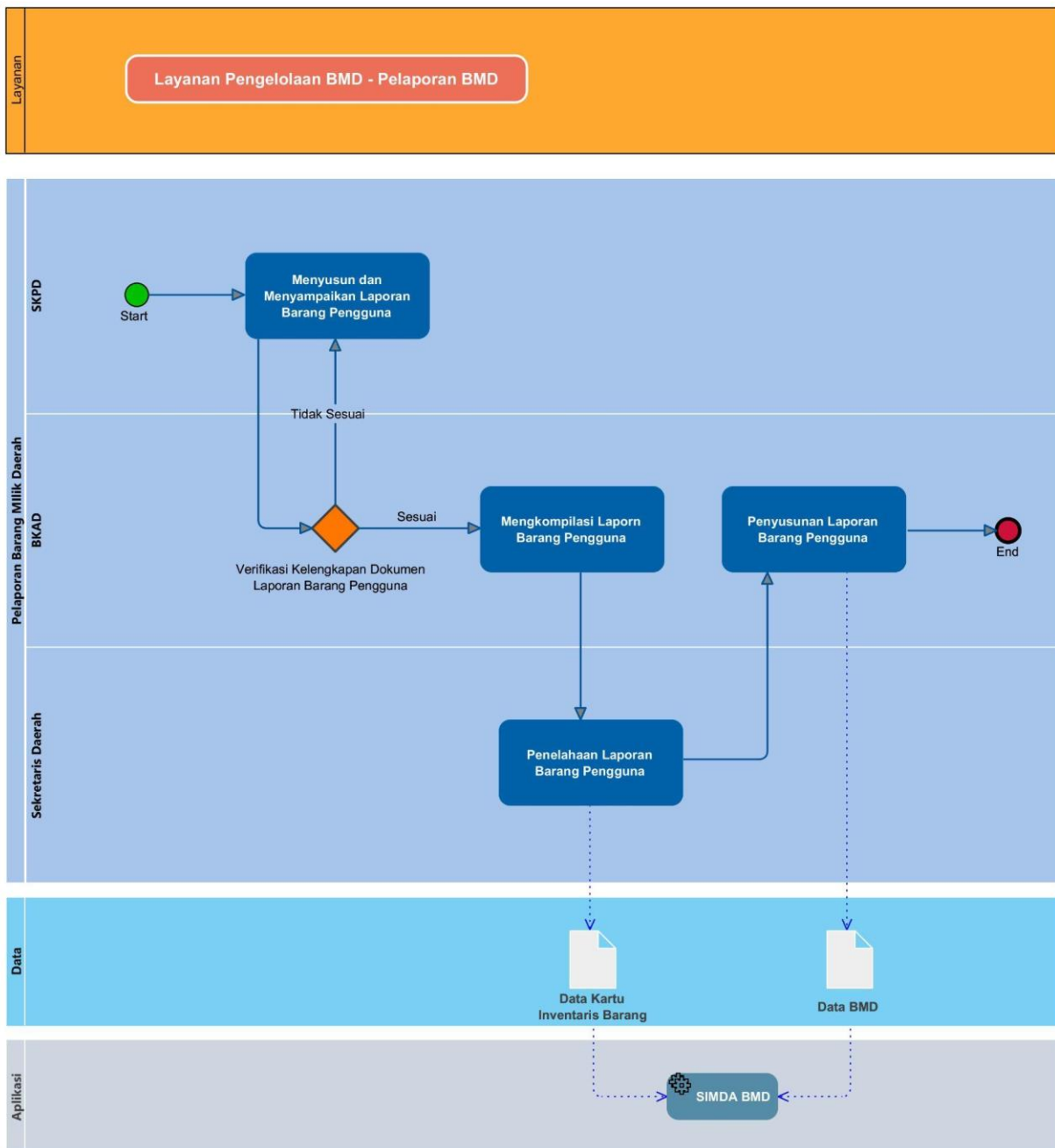
Badan Keuangan Dan Aset Daerah memiliki 3 kategori layanan pengelolaan aset yaitu Inventaris aset tetap, Penghapusan aset, dan pelaporan BMD yang melibatkan SKPD, BPKD, sekretariat Daerah, BKAD, Bag. Hukum, dan Bupati. Pada layanan pengelolaan aset ini Aplikasi yang digunakan adalah SIMDA BMD.



Gambar 3.4.11 RAL.02.07.01 Layanan Inventaris Aset Tetap



Gambar 3.4.12 RAL.02.07.01 Layanan Penghapusan Aset



Gambar 3.4.13 RAL.02.07.01 Layanan Pelaporan Barang Milik Daerah

5. Layanan Kepegawaian

Dalam menunjang layanan kepegawaian yang diampu oleh Badan Kepegawaian, dan Pengembangan SDM (BKPSDM) mempunyai tugas pokok fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.

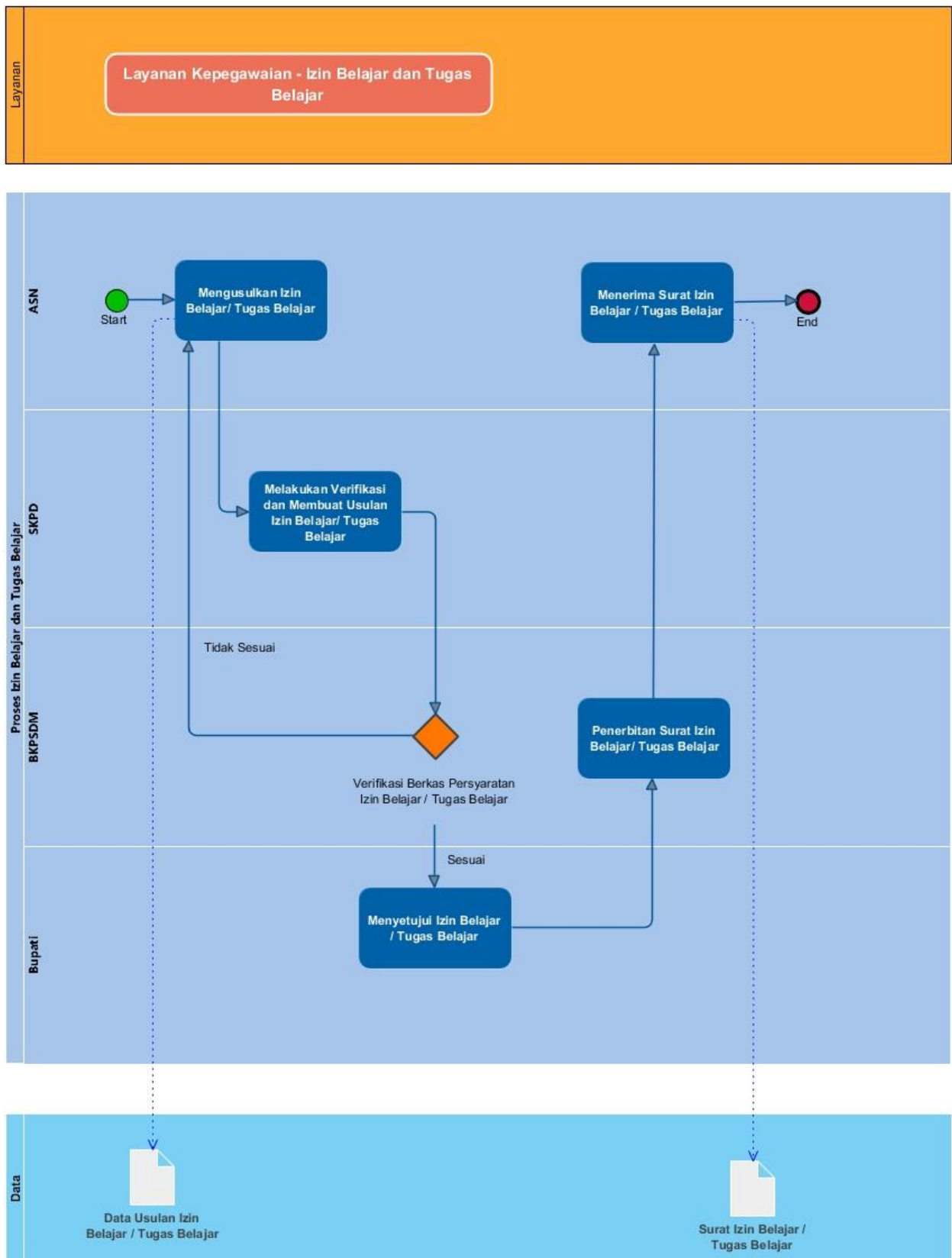
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tapin mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- b) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian;
- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; dan
- d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian.

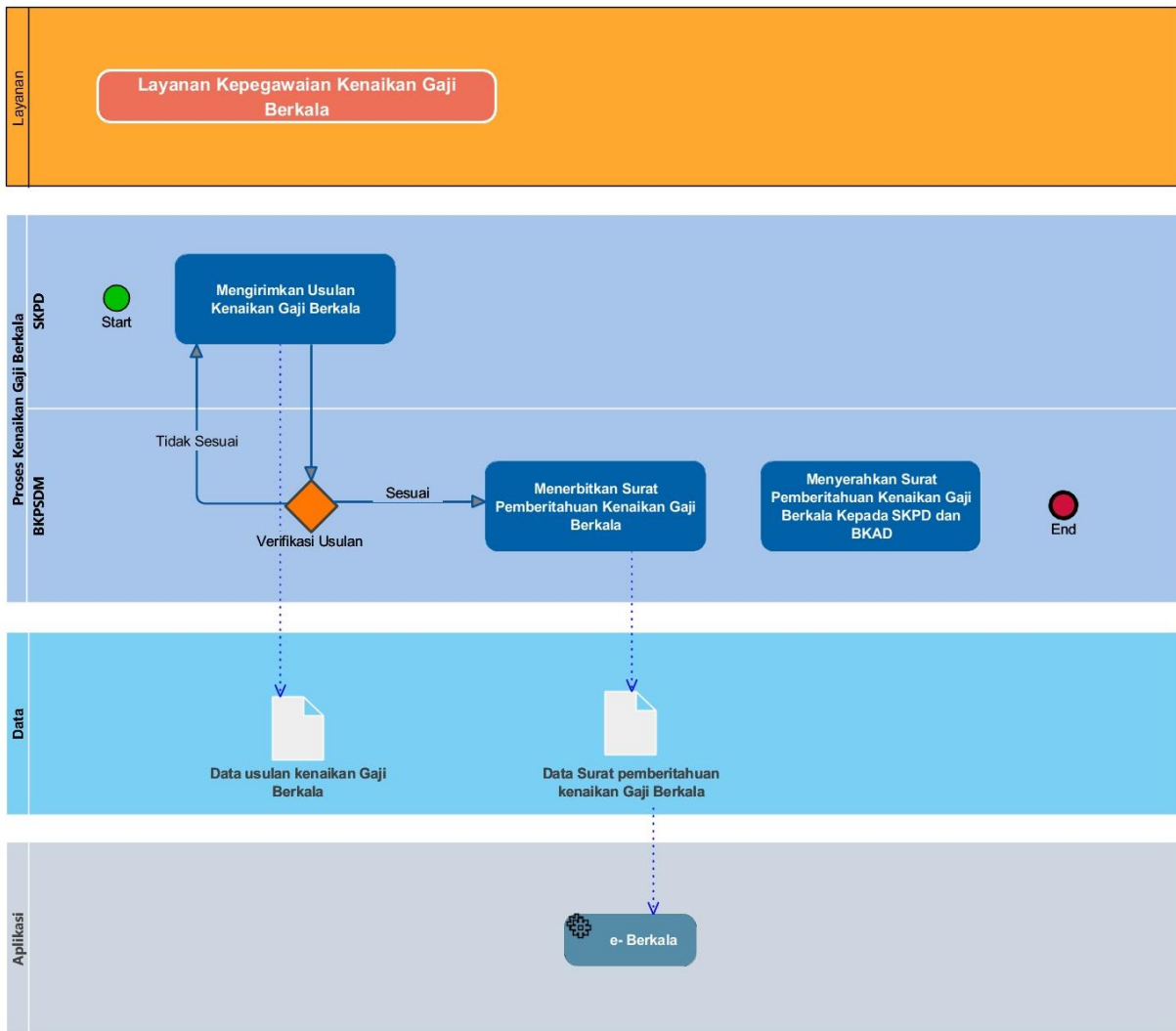
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan kepegawaian yang terdapat di BKPSDM adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.04 Sumber Daya Manusia
3	Kategori Layanan	RAL.02.04.01 Layanan Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan SDM RAL.02.04.02 Layanan Kenaikan Pangkat dan Jabatan RAL.02.04.03 Layanan Terpadu Satu Pintu RAL.02.04.04 Layanan Promosi dan Pola Karir RAL.02.04.05 Layanan Pengusulan Pensiun RAL.02.04.06 Layanan Kenaikan Gaji Berkala RAL.02.04.07 Layanan Izin Belajar dan Tugas Belajar

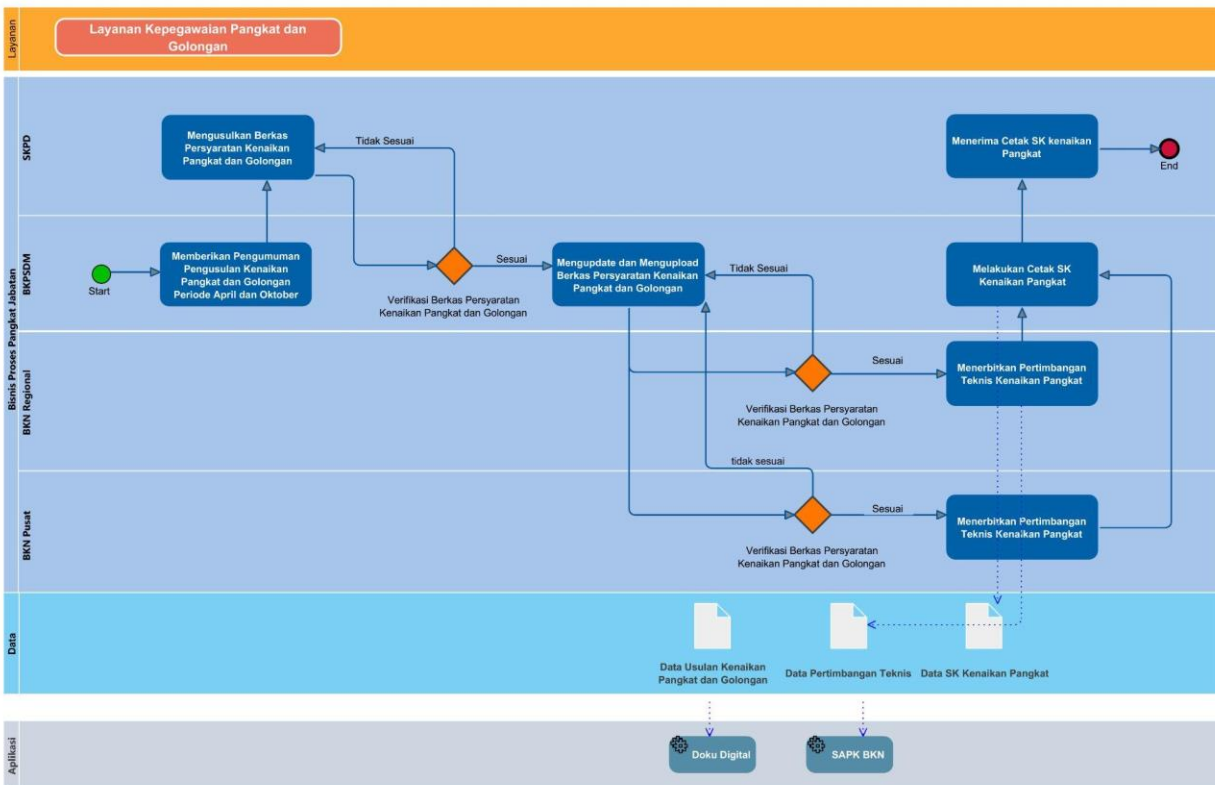
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM memiliki 7 kategori layanan kepegawaian yang melibatkan SKPD, BKPDSDM, Bag. Organisasi, BKN, Kemenpan RB, Bupati, Masyarakat, dan ASN. Terdapat beberapa aplikasi yang digunakan dalam layanan kepegawaian milik kab Tapin diantaranya adalah e-Formasi, SSCASN, dan SAPK yang digunakan pada layanan penyusunan dan penetapan kebutuhan SDM. kemudian Doku Digital dan SAPK BKN pada layanan kepegawaian pangkat dan Golongan dan proses pengusulan pegawai. dan yang terakhir e-berkala yang digunakan pada layanan kepegawaian kenaikan gaji berkala.



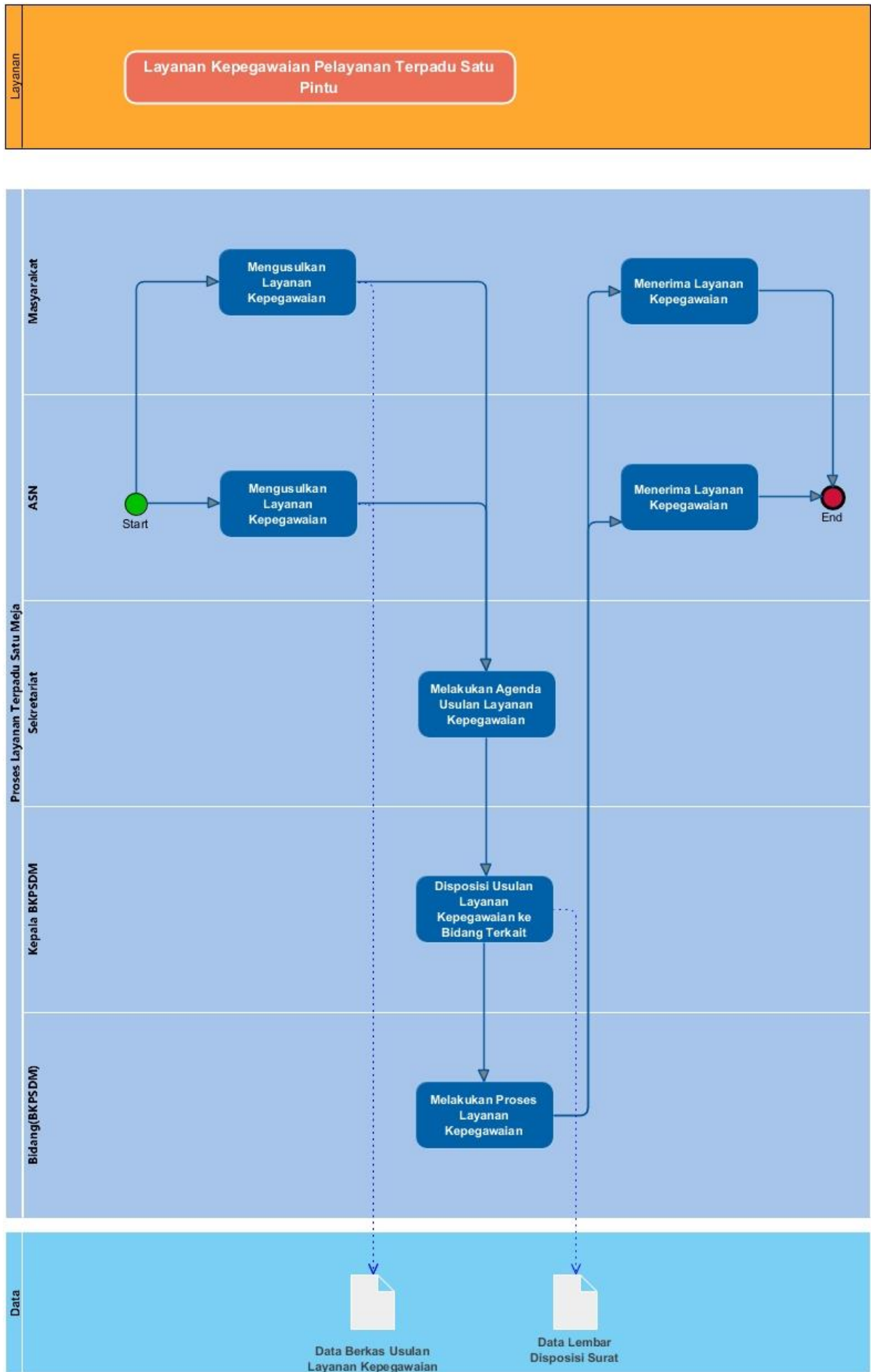
Gambar 3.4.14 RAL.02.04.01 Layanan Izin Belajar dan Tugas Belajar



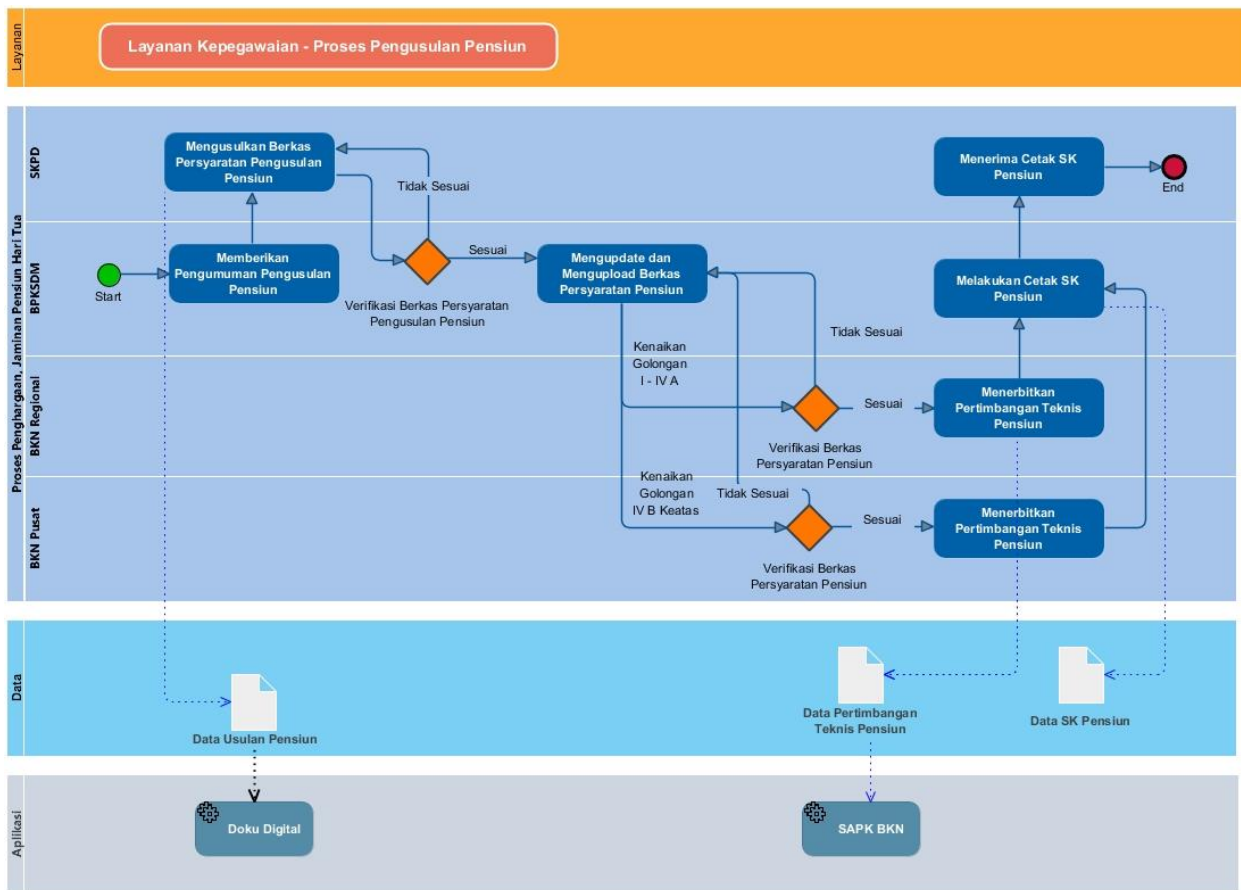
Gambar 3.4.15 RAL.02.04.01 Layanan Kenaikan Gaji Berkala



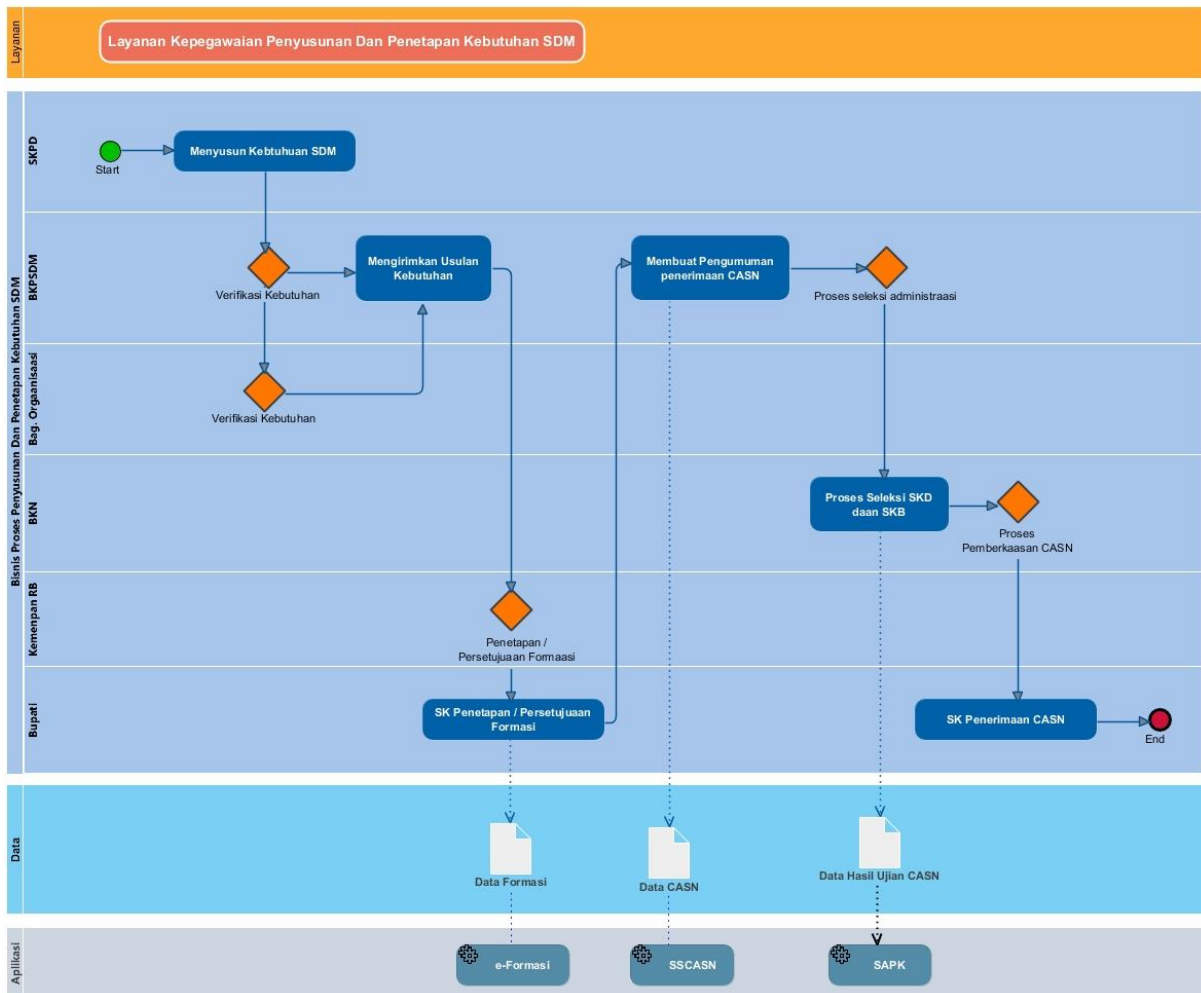
Gambar 3.4.16 RAL.02.04.01 Layanan Pangkat dan Golongan



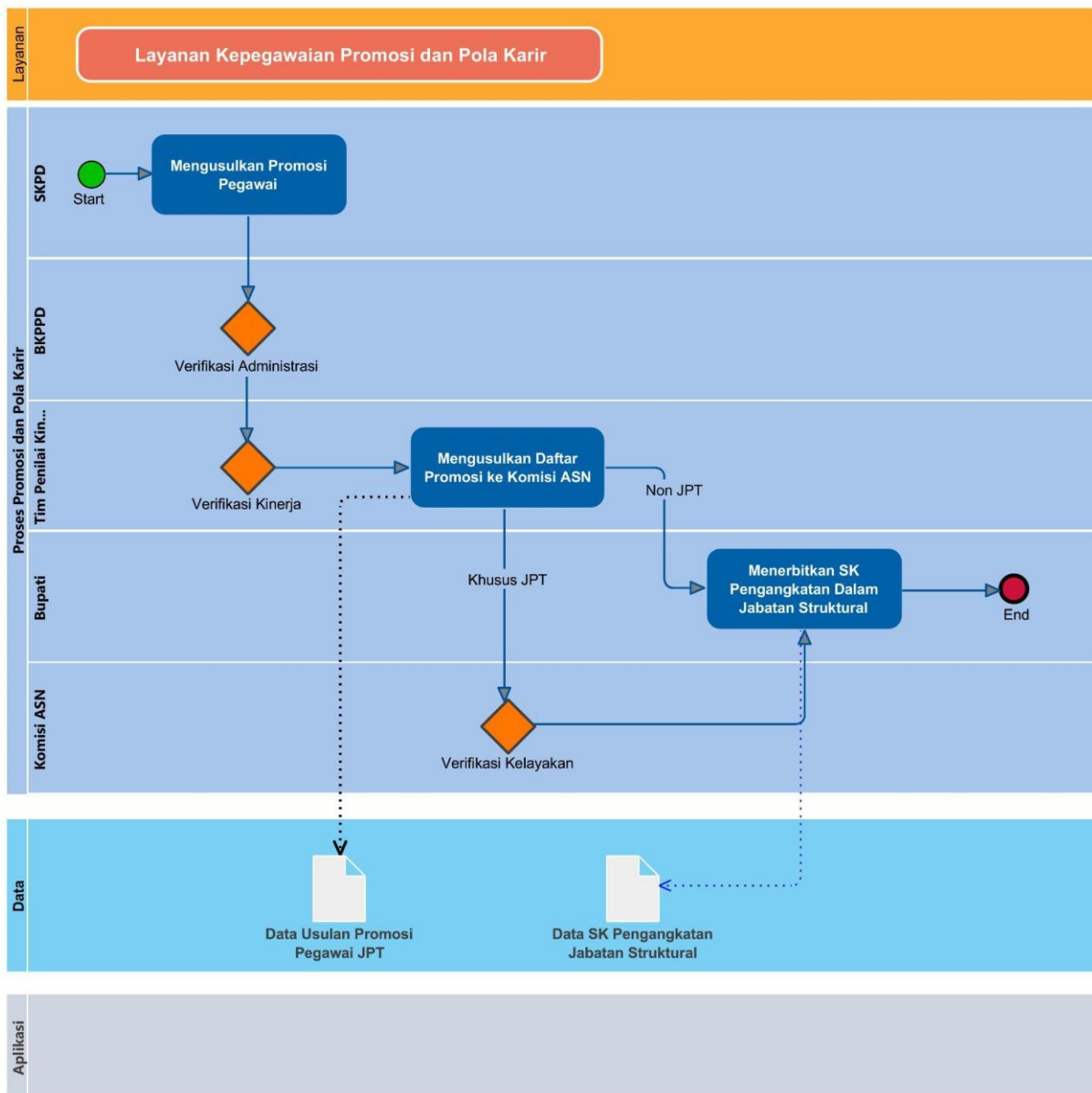
Gambar 3.4.17 RAL.02.04.01 Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gambar 3.4.18 RAL.02.04.01 Layanan Pengusulan Pensiun



Gambar 3.4.19 RAL.02.04.01 Layanan Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan SDM



Gambar 3.4.20 RAL.02.04.01 Layanan Promosi dan Pola Karir

6. Layanan Kinerja Pegawai

Dalam menunjang layanan Kinerja Pegawai yang diampu oleh Badan Kepegawaian, dan Pengembangan SDM (BKPSDM) mempunyai tugas pokok fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Kepegawaian, dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Tapin mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; dan

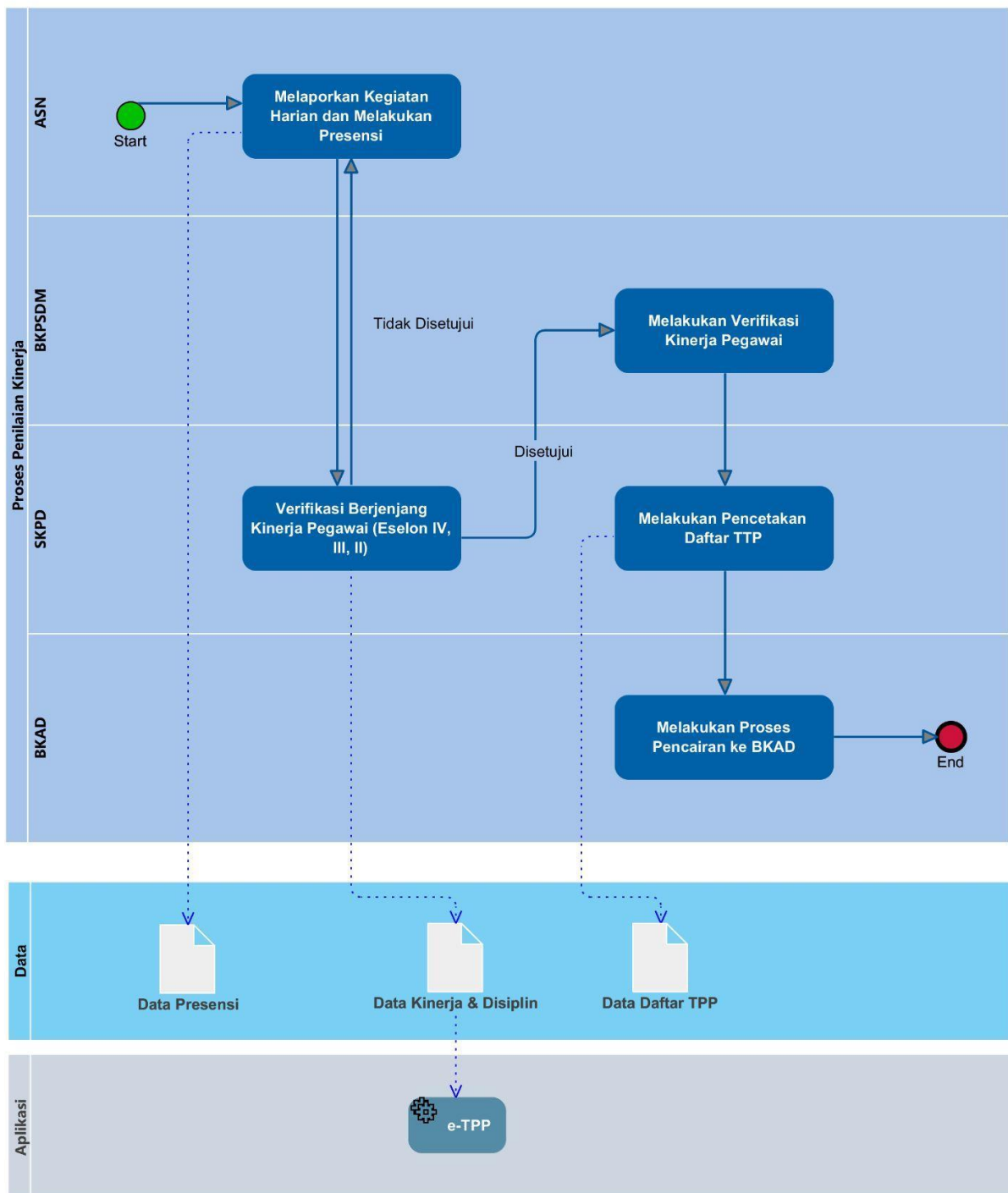
- d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan kepegawaian yang terdapat di BKPSDM adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.03 Sumber Daya Manusia
3	Kategori Layanan	RAL.02.03.01 Layanan Proses Kinerja

Badan Kepegawaian, dan Pengembangan SDM (BKPSDM) memiliki 2 kategori layanan kinerja pegawai yang melibatkan ASN, BKPSDM, SKPD, BKAD. Kemudian terdapat aplikasi yang digunakan dalam layanan kinerja pegawai yaitu e-TPP.

Layanan
Layanan Kinerja - Proses Penilaian Kinerja



Gambar 3.4.21 RAL.02.04.07 Layanan Proses Kinerja

7. Layanan Kearsipan Dinamis

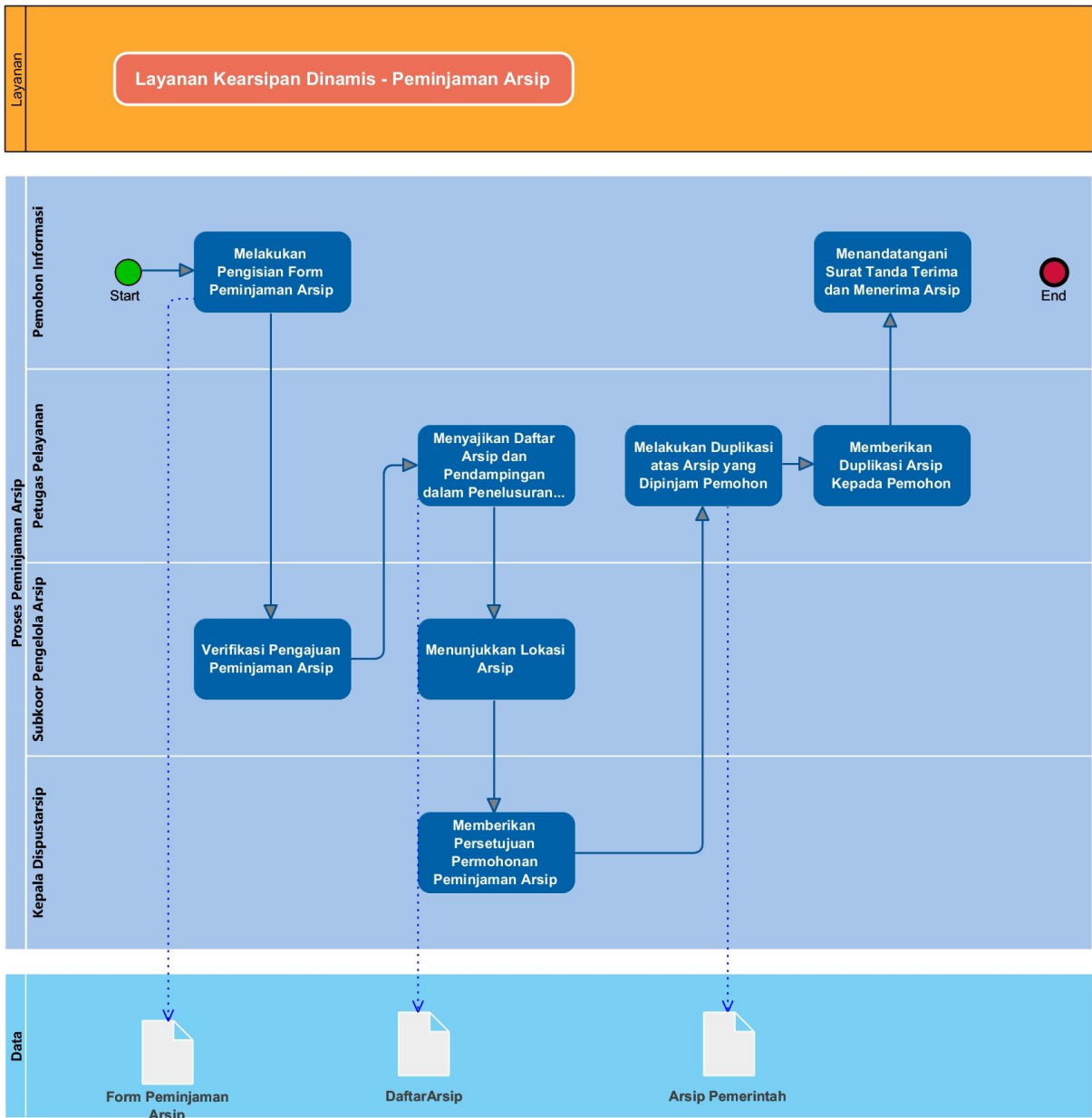
Dalam menunjang layanan kearsipan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c) Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
- d) Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan; dan
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan.

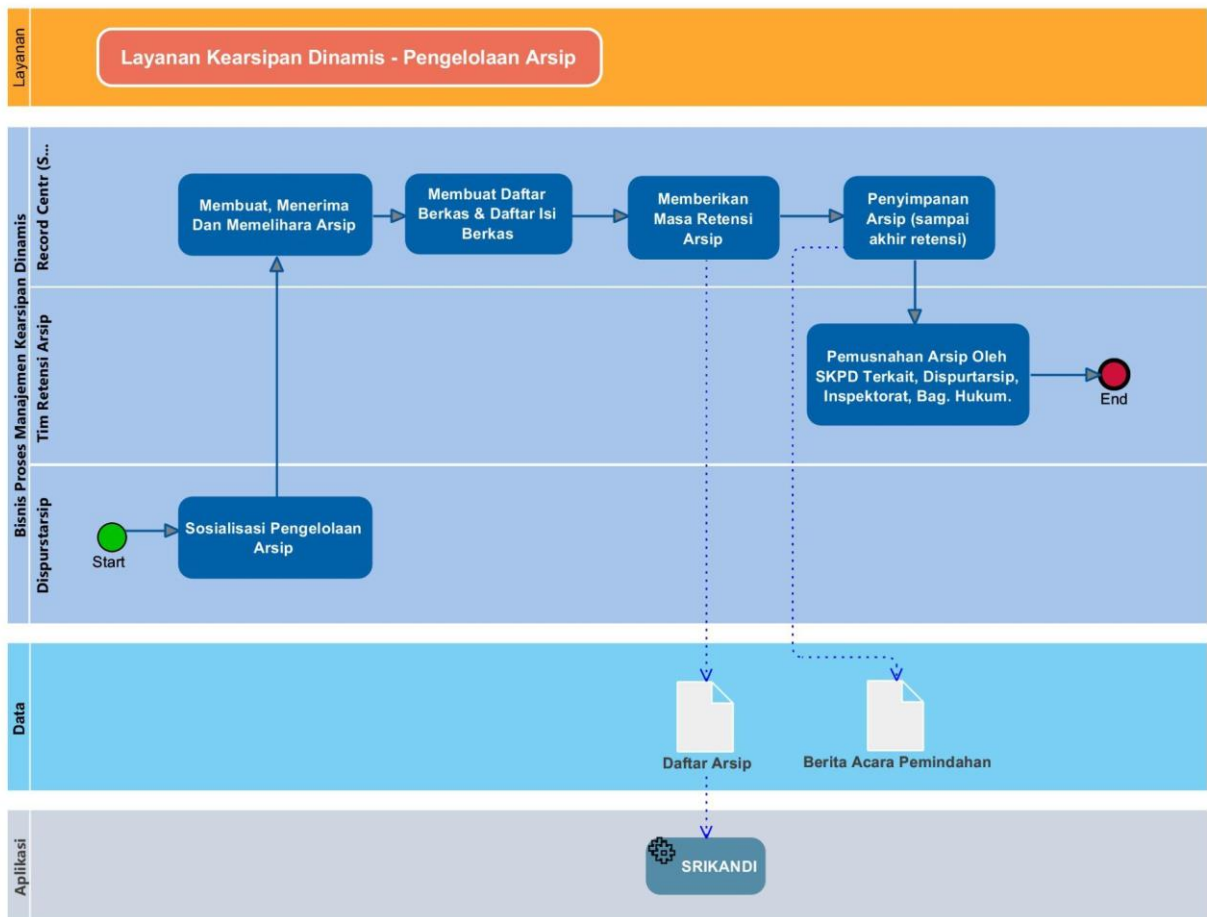
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan kearsipan yang terdapat di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi
3	Kategori Layanan	RAL.02.06.01 Layanan Peminjaman Arsip RAL.02.06.02 Layanan Pengelolaan Kearsipan RAL.02.06.03 Layanan Manajemen Surat Masuk RAL.02.06.04 Layanan Manajemen Surat Keluar

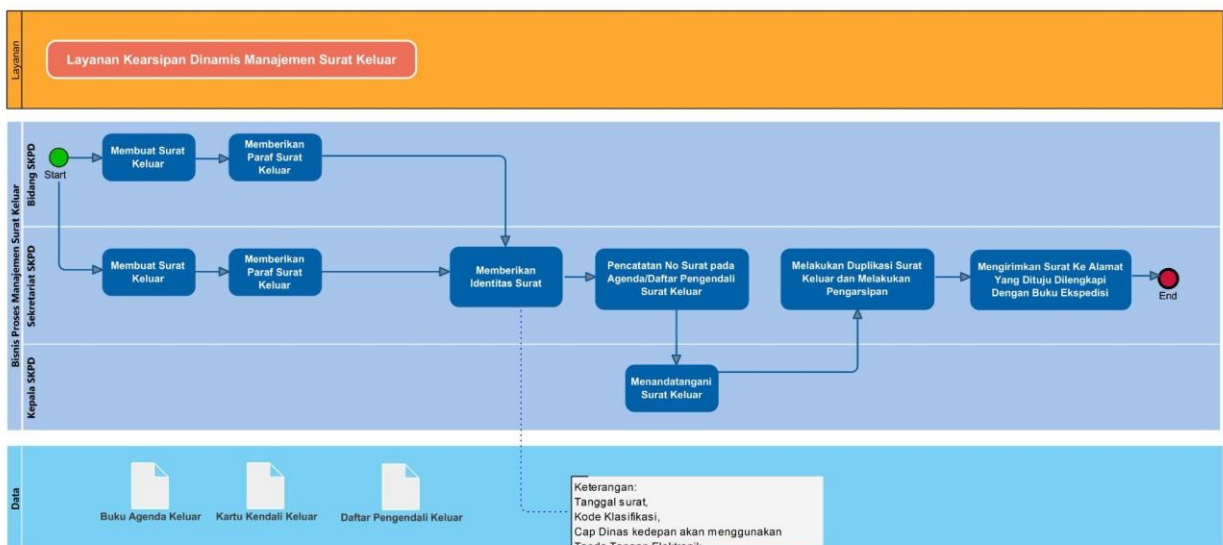
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki 4 kategori layanan kearsipan yang melibatkan SKPD terkait kab Tapin. Pada layanan kearsipan ini Aplikasi yang digunakan adalah SRIKANDI.



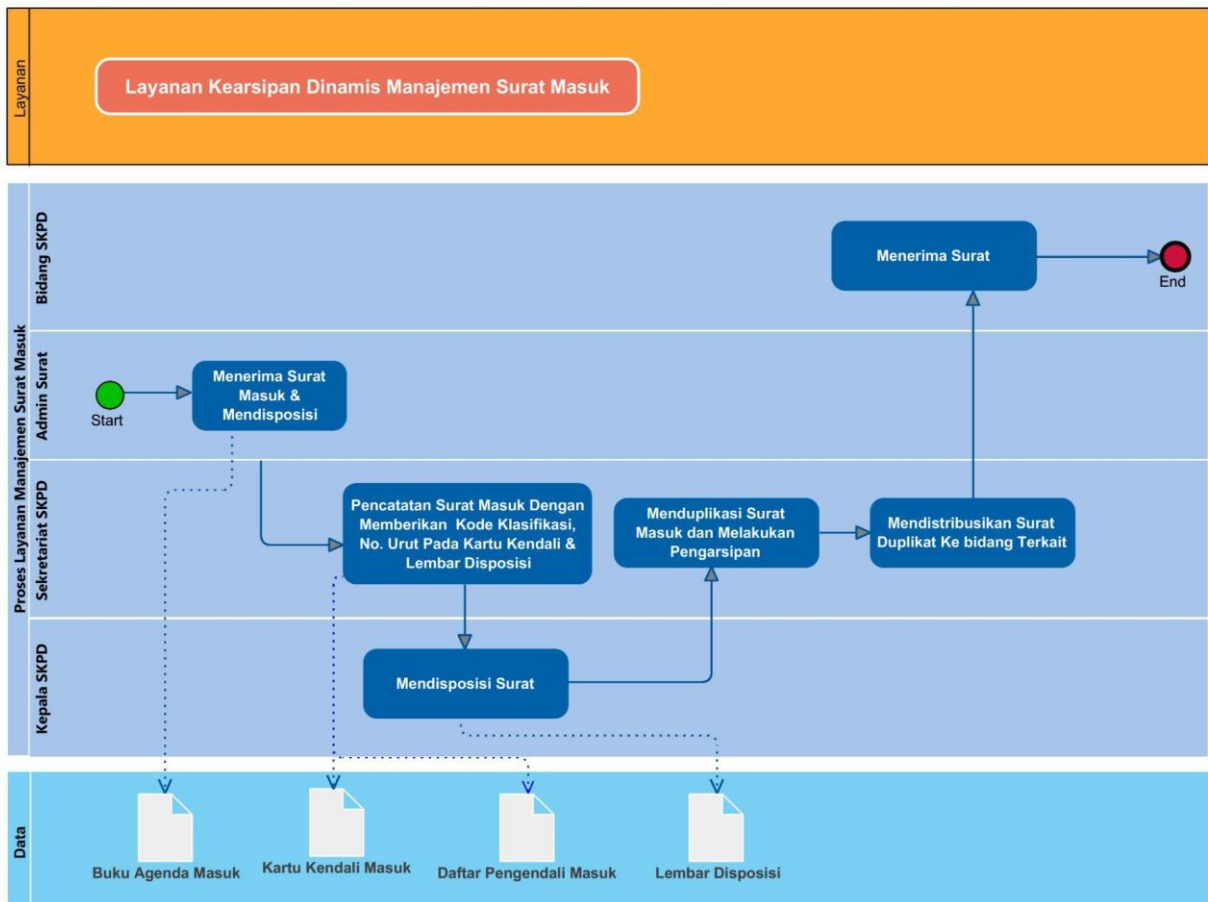
Gambar 3.4.22 RAL.02.06.01 Layanan Peminjaman Arsip



Gambar 3.4.23 RAL.02.06.01 Layanan Pengelolaan Arsip



Gambar 3.4.24 RAL.02.06.01 Layanan Manajemen Surat Keluar



Gambar 3.4.25 RAL.02.06.01 Layanan Manajemen Surat Masuk

8. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah

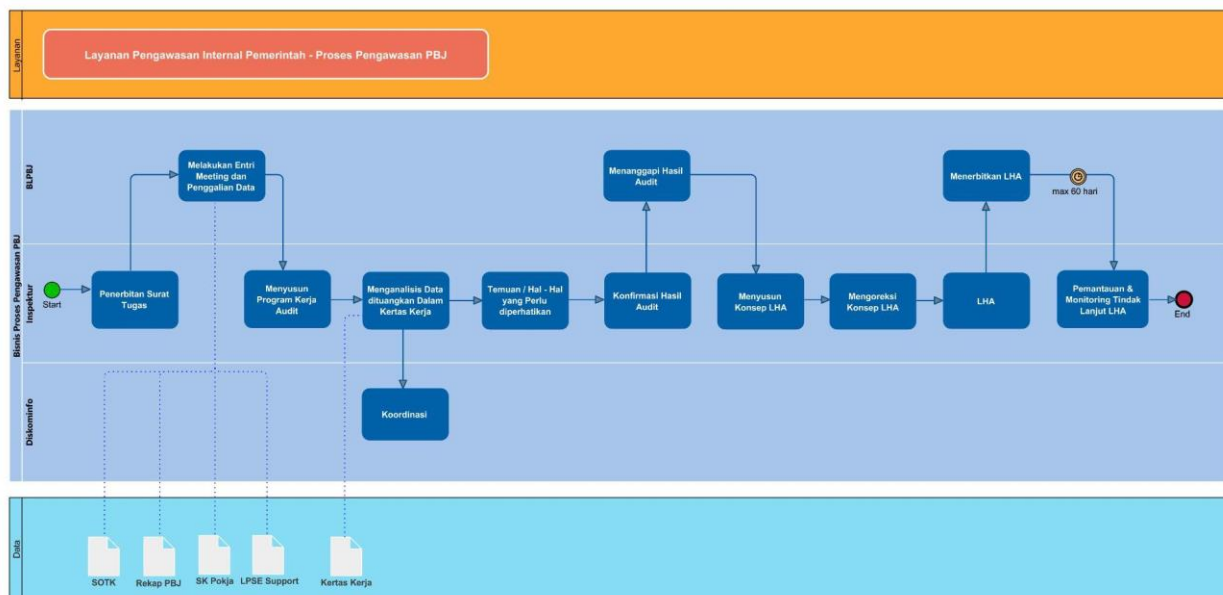
Dalam menunjang layanan pengawasan internal pemerintah (SPIP) yang diampu oleh Inspektorat dengan tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan program pengawasan;
- b) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Pembangunan, Pemerintahan, dan Masyarakat;
- c) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d) Evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan.

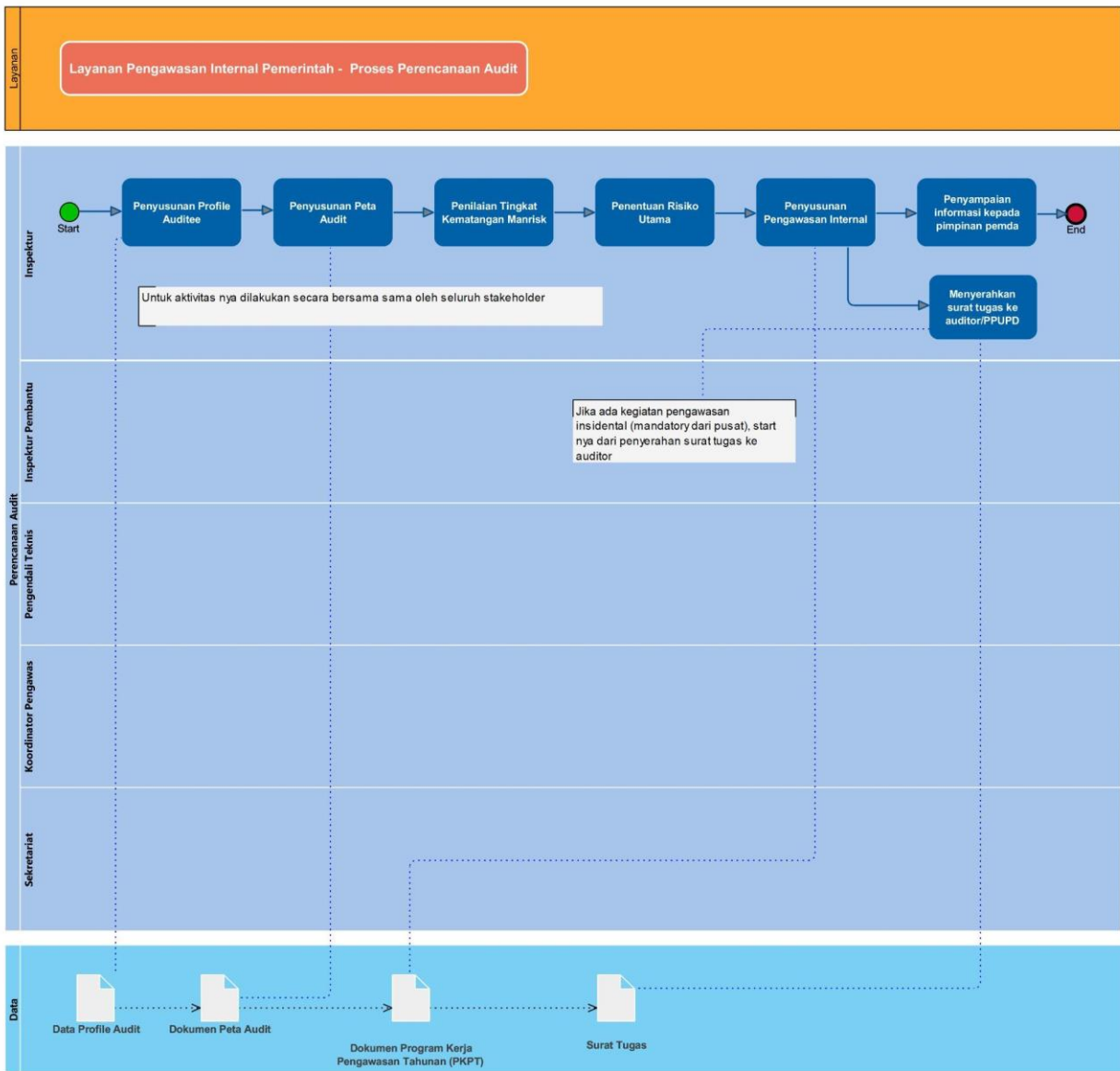
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan SPIP yang terdapat di Inspektorat adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.05 Kesekretariatan Negara
3	Kategori Layanan	RAL.02.05.01 Layanan Perencanaan Audit RAL.02.05.02 Layanan Pelaksanaan Audit RAL.02.05.03 Layanan Tindak Lanjut Audit RAL.02.05.04 Layanan Pengawasan PBJ

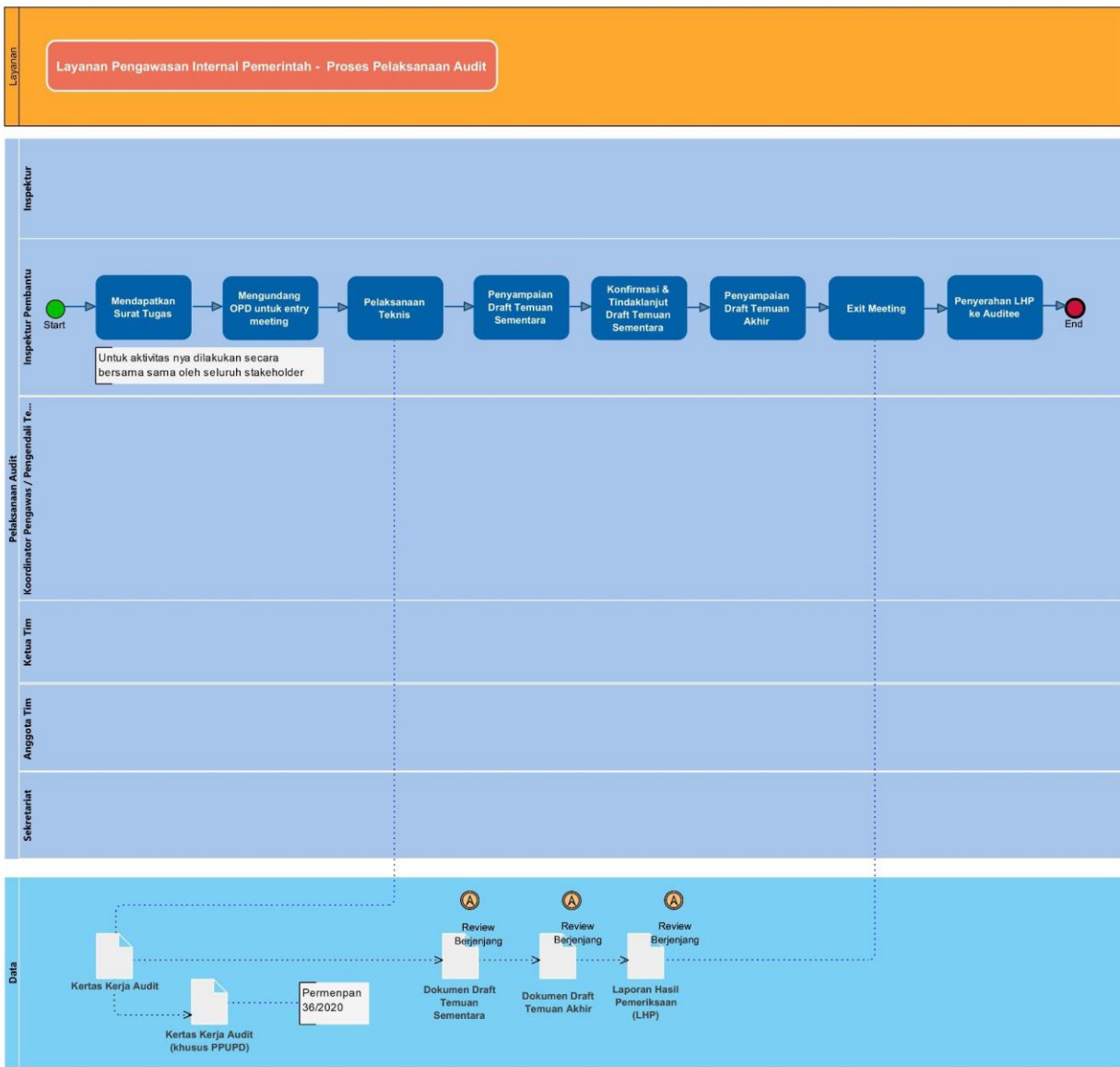
Inspektorat memiliki 5 kategori layanan SPIP yang melibatkan Inspektur, Pengendali Teknis, Ketua, koordinator pengawas, Sekretariat, Tim, Anggota Tim, Auditee .



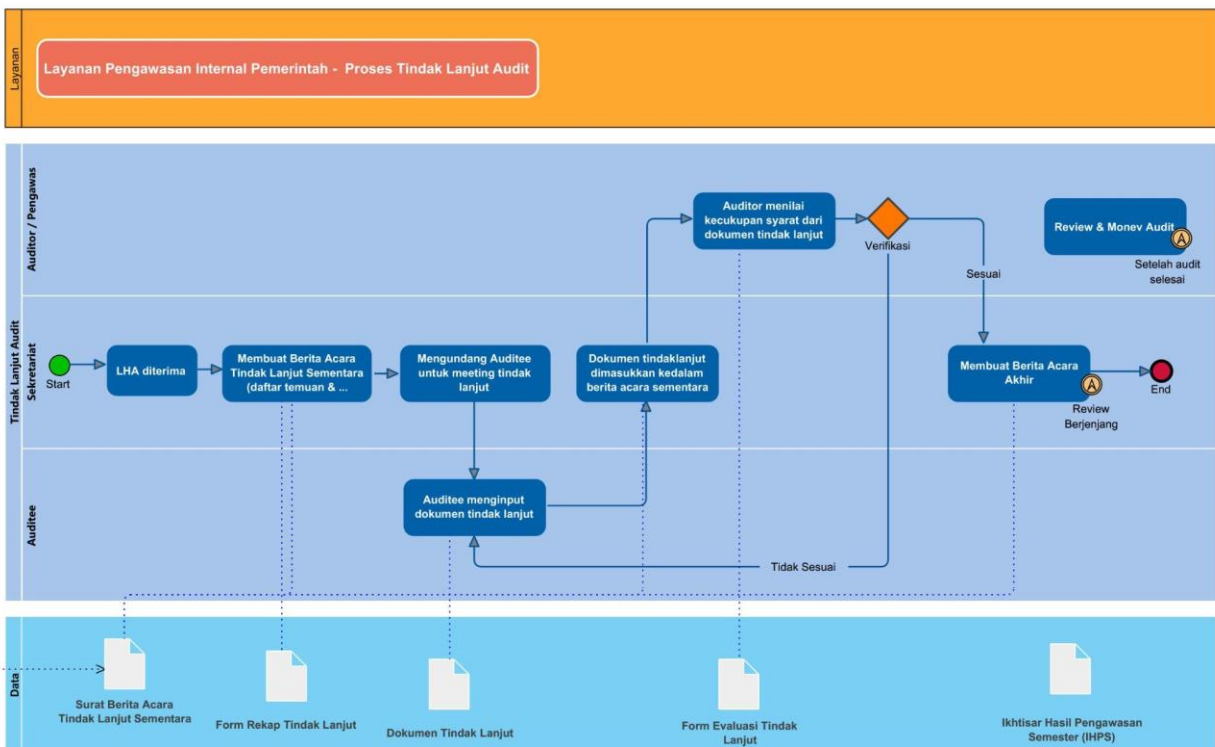
Gambar 3.4.26 RAL.02.05.02 Layanan Pengawasan PBJ



Gambar 3.4.26 RAL.02.05.01 Layanan Perencanaan Audit



Gambar 3.4.27 RAL.02.05.03 Layanan Pelaksanaan Audit



9. Layanan Pengaduan Publik

Dalam menunjang layanan pengaduan publik yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mempunyai Tugas untuk melaksanakan Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

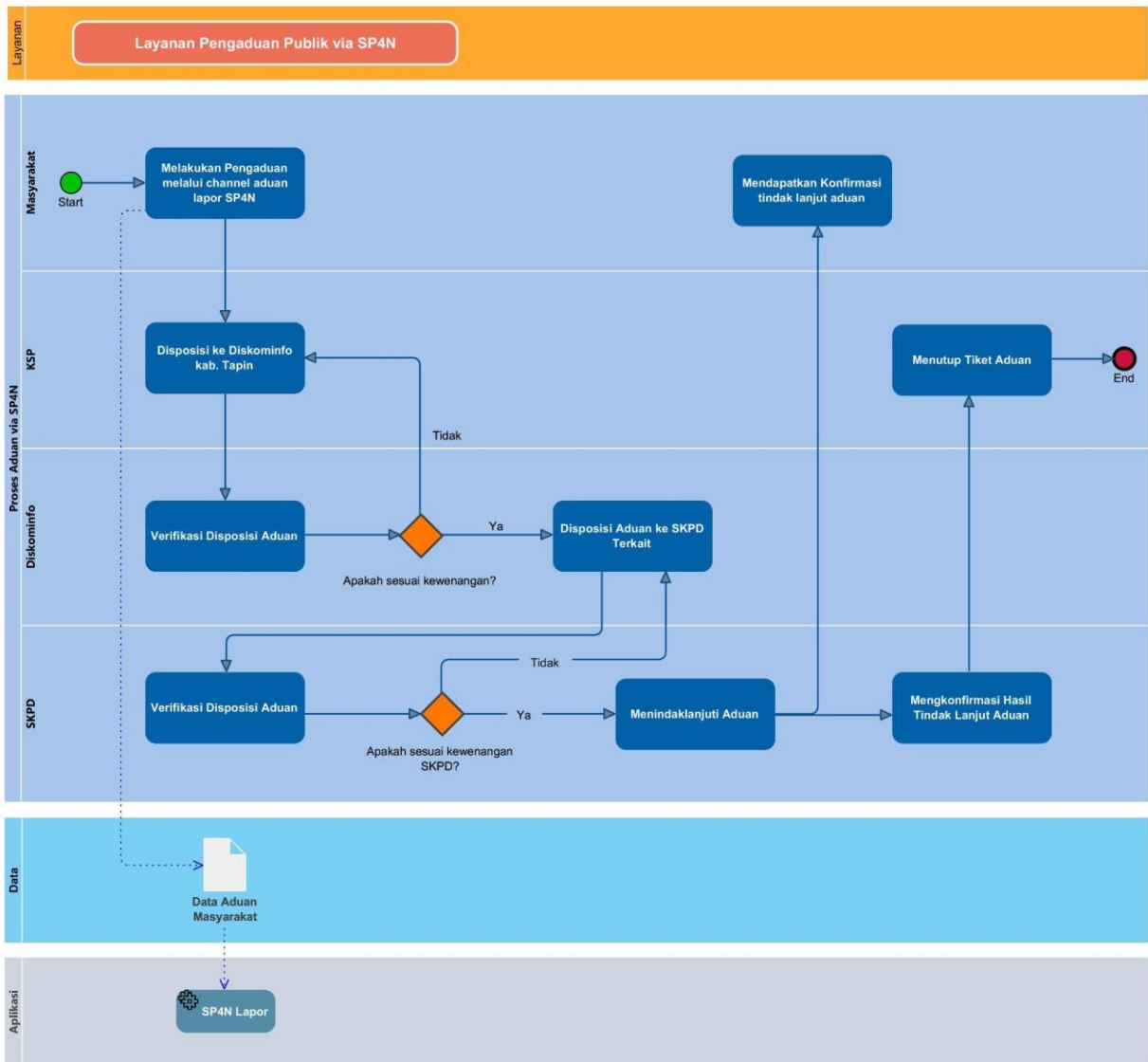
Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi Publik.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan pengaduan publik Diskominfo dijelaskan sebagai berikut

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.01 Layanan Publik
2	Area Layanan	RAL.01.44 Informasi
3	Kategori Layanan	RAL.01.44.01 Layanan Pengaduan Publik via SP4N Lapor

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 kategori layanan pengaduan publik yang melibatkan Masyarakat, KSP, Diskominfo, SKPD. Pada layanan pengaduan publik ini Aplikasi yang digunakan adalah SP4N Lapor.



Gambar 3.4.29 RAL.01.44.01 Layanan Pengaduan Publik via SP4N Lapor

10. Layanan Data Terbuka

Dalam menunjang layanan data terbuka yang diampu oleh Diskominfo yang mempunyai fungsi di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

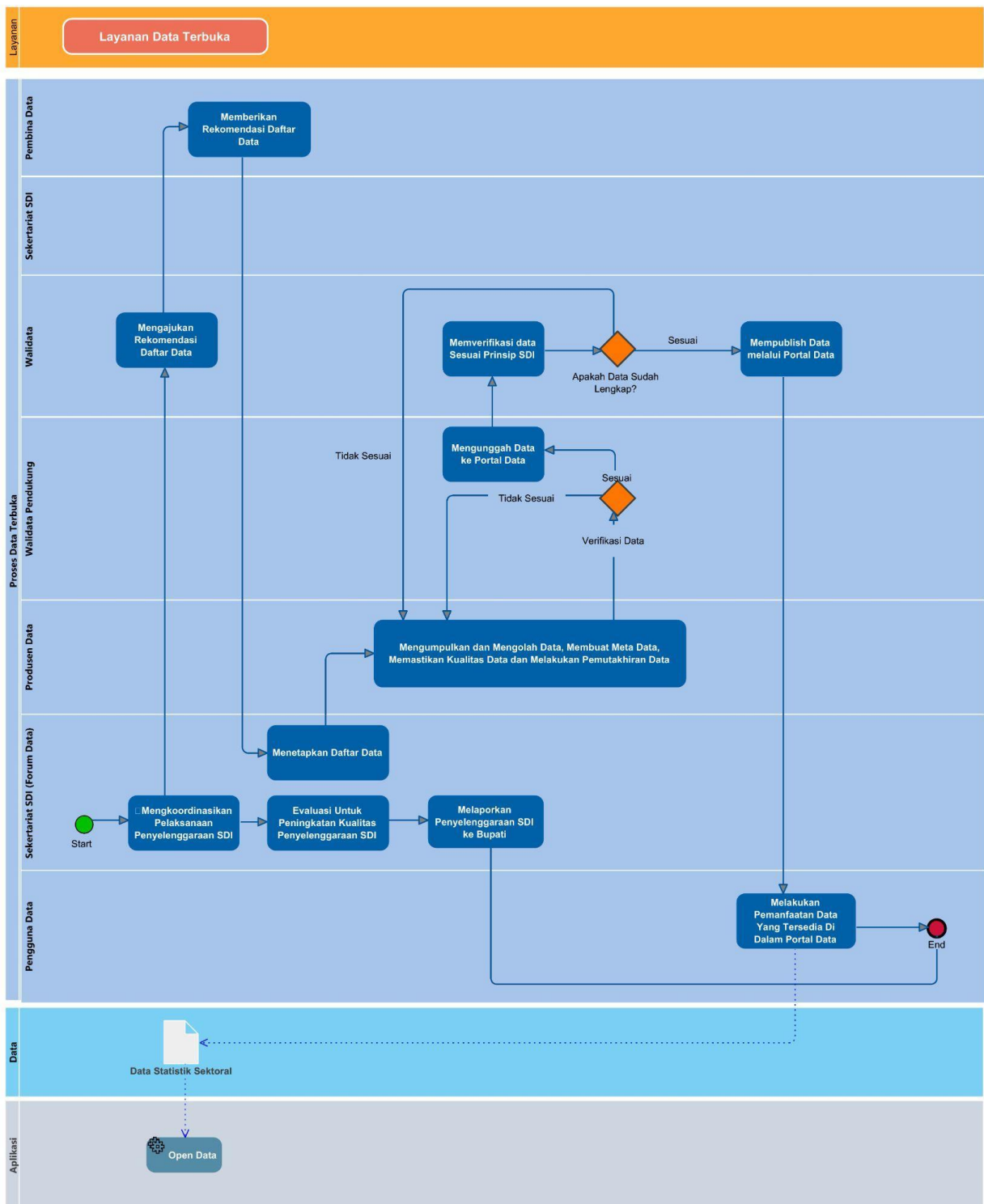
Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
- b) pelaksanaan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
- c) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Adapun berdasarkan fungsinya maka proses bisnis yang terdapat di Diskominfo adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan
3	Kategori Layanan	RAL.02.09.01 Pengumpulan Data Sektoral

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 kategori layanan data terbuka yang melibatkan Pembina Data, Sekretariat SDI, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data, Sekretariat SDI (Forum Data) dan Pengguna Data. Pada layanan penganggaran ini Aplikasi yang digunakan adalah Open Data.



Gambar 3.4.30 RAL.02.09.01 Layanan Data Terbuka

11. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Dalam menunjang layanan akuntabilitas kinerja organisasi yang diampu oleh Bag. Organisasi mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi.

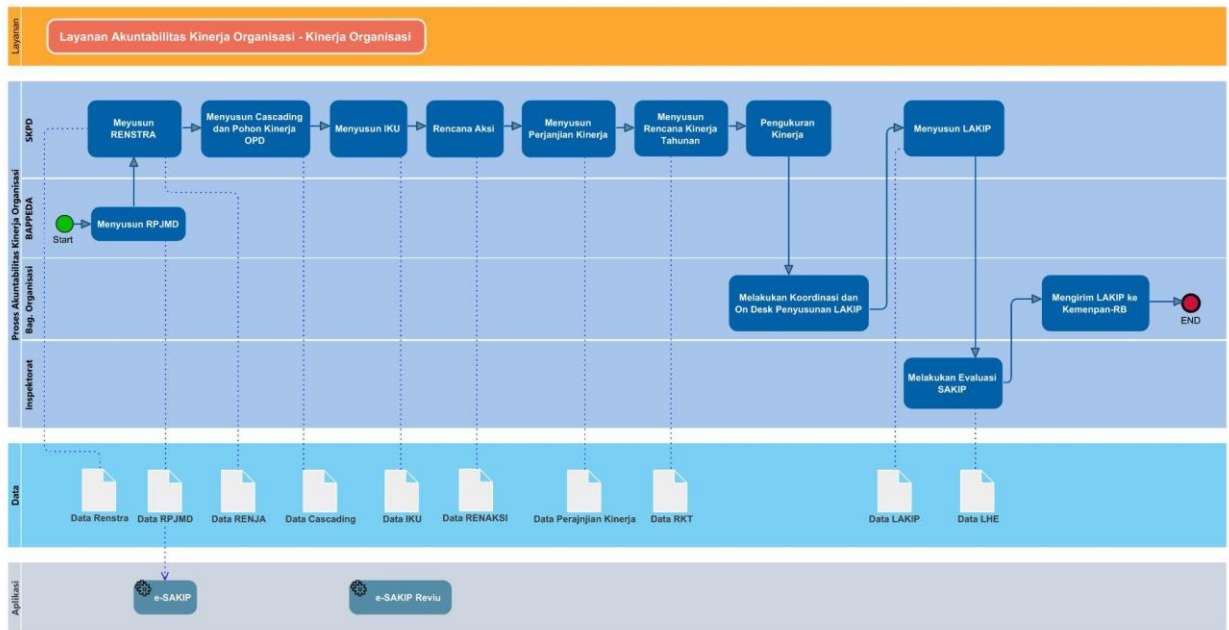
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bag. Organisasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bag. Organisasi;
- b. penyiapan bahan kebijakan bidang kelembagaan dan tatalaksana, standardisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- c. penyiapan bahan koordinasi bidang kelembagaan dan tatalaksana, standardisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- d. perumusan kebijakan strategis, perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan bidang kelembagaan Pemerintah Daerah;
- e. penataan kelembagaan dan tatalaksana, standardisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- f. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan akuntabilitas kinerja organisasi yang terdapat di Bagian Organisasi adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.07 Akuntabilitas Kinerja
3	Kategori Layanan	RAL.02.07.01 Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Bagian Organisasi memiliki 1 kategori layanan akuntabilitas kinerja organisasi yang melibatkan SKPD, BAPPEDA, Bag. Organisasi, Inspektorat. Pada layanan penganggaran ini Aplikasi yang digunakan adalah e-SAKIP dan e-SAKIP reviu.



Gambar 3.4.31 RAL.02.07.01 Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

12. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam menunjang layanan pengadaan barang dan jasa yang diampu oleh Bag. Pengadaan Barang & Jasa yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengkajian dan standarisasi, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

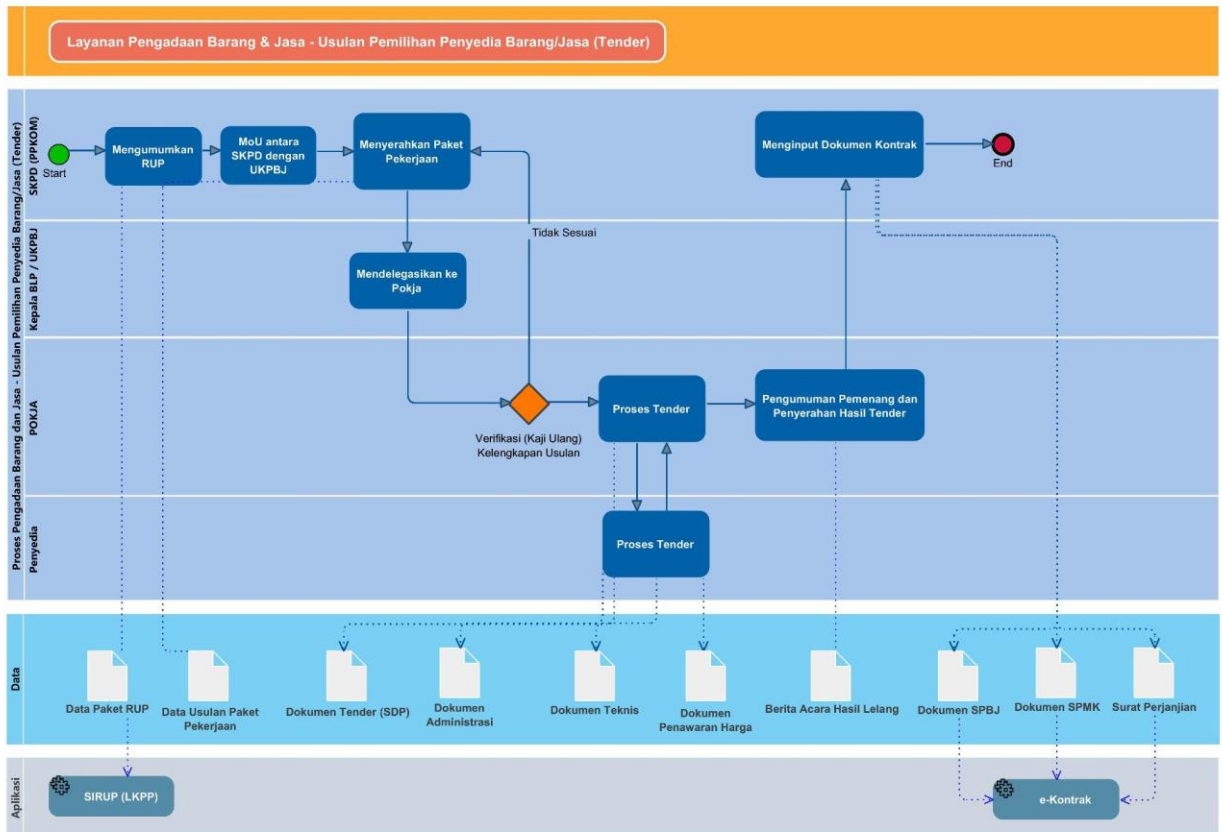
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan pelayanan di bidang pengkajian dan standarisasi pengadaan barang/jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan pelayanan di bidang perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan pelayanan dibidang pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

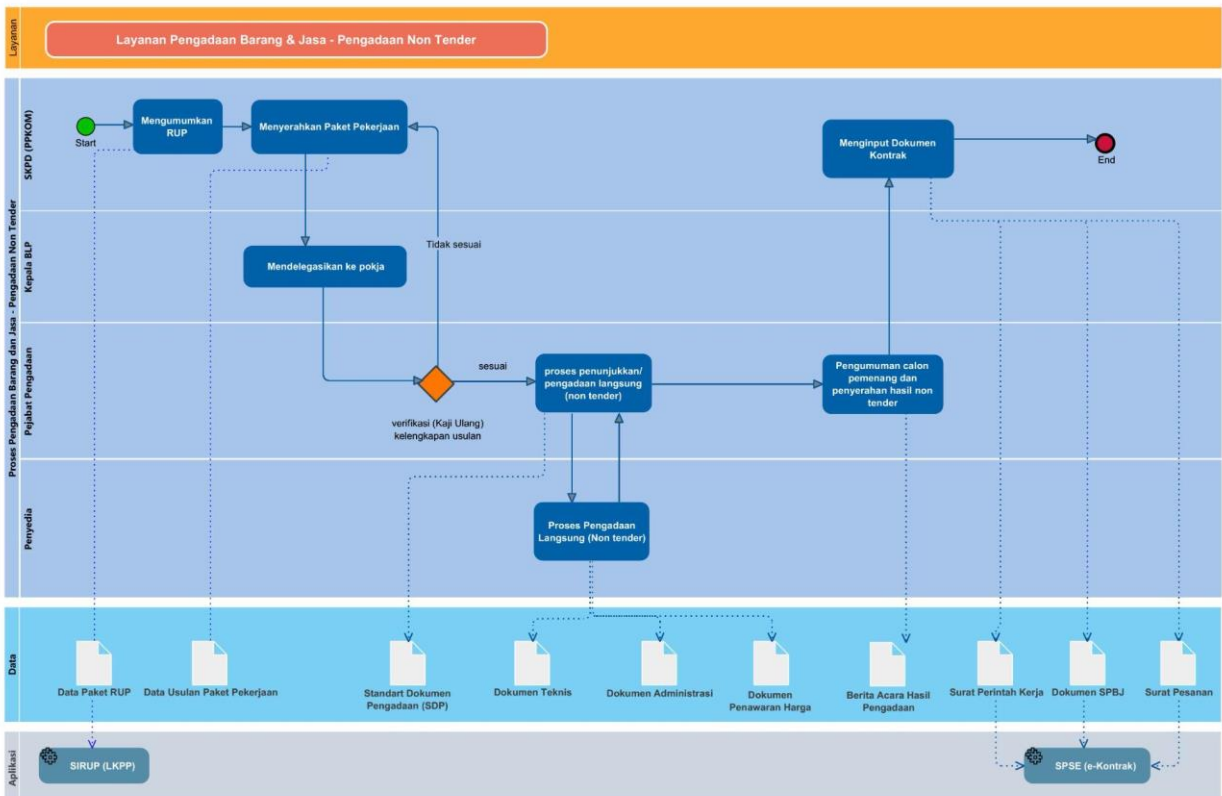
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan pengadaan barang dan jasa yang terdapat di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi
3	Kategori Layanan	RAL.02.06.01 Layanan Usulan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Tender) RAL.02.06.02 Layanan Usulan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Non - Tender)

Bagian Administrasi Pengadaan Barang & Jasa memiliki 2 kategori layanan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan SKPD, Kepala BLP/UKPBJ, POKJA, Penyedia, dan Pejabat Pengadaan. Pada layanan penganggaran ini Aplikasi yang digunakan adalah SIRUP(LKPP) dan SPSE(e-Kontrak).



Gambar 3.4.32 RAL.02.06.01 Layanan Usulan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Tender)



Gambar 3.4.34 RAL.02.06.02 Layanan Reviu Usulan Pemeliharaan Penyedia(Non Tender)

13. Layanan JDIH

Dalam menunjang layanan JDIH yang diampu oleh Bag. Hukum melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, sebagai wakil pemerintah pusat bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan Jaringan Dokumentasi serta Informasi Hukum.

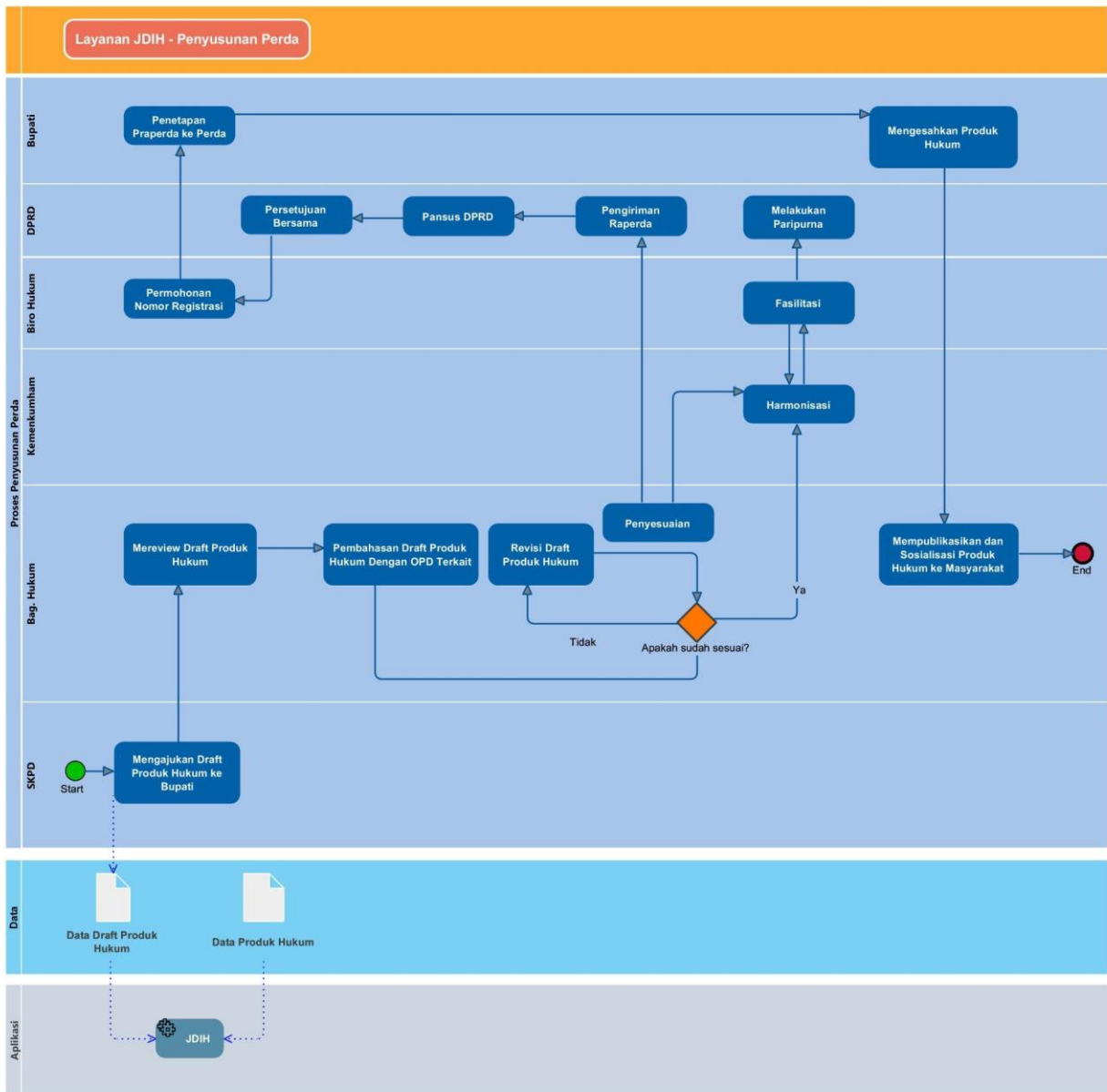
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Hukum melaksanakan fungsi:

- a) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum; dan
- e) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

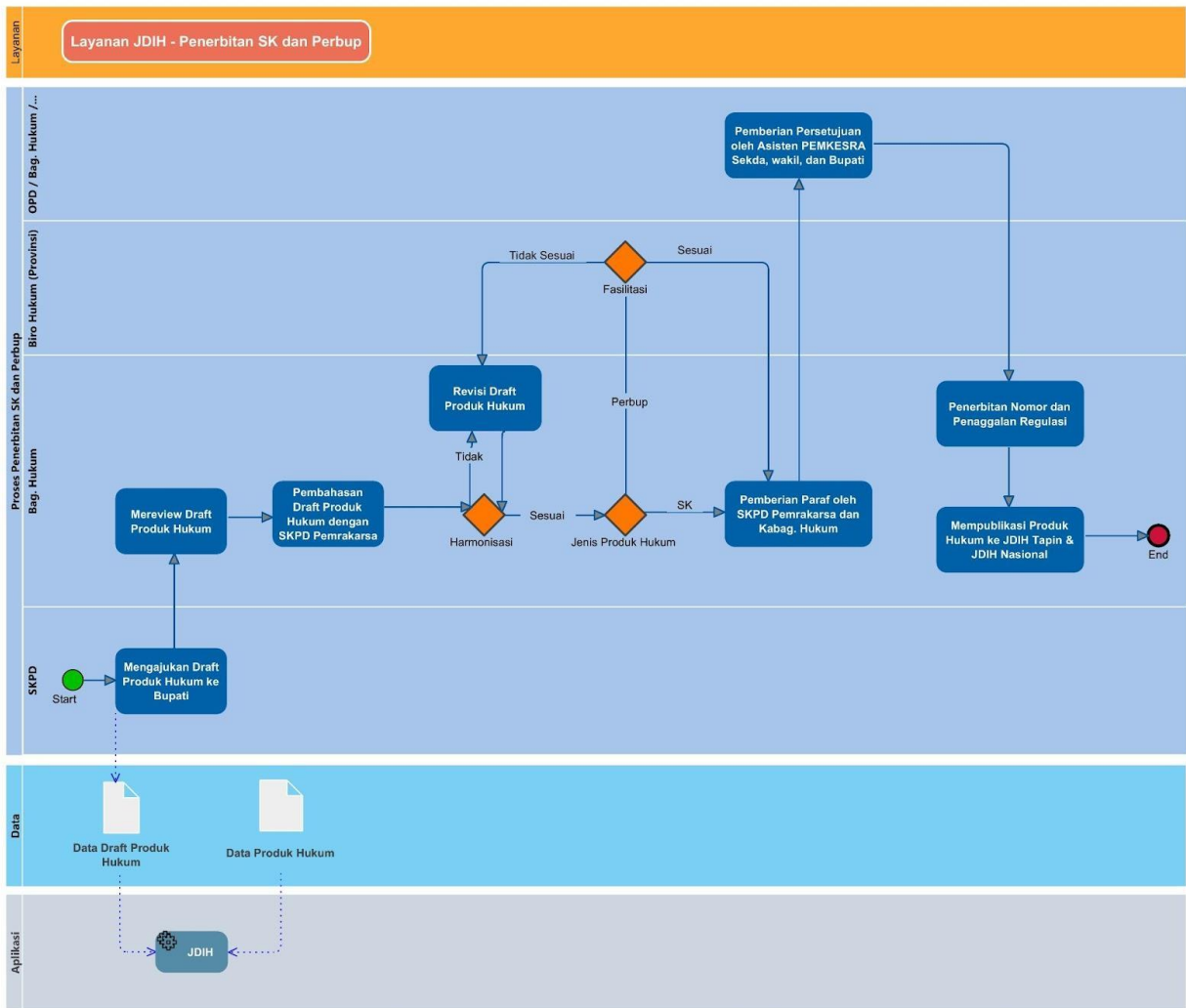
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan JDIH yang terdapat di Bagian Hukum adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.01 Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.01.28 Hukum
3	Kategori Layanan	RAL.01.28.01 Layanan JDIH

Bagian Hukum memiliki 2 kategori layanan JDIH yang melibatkan Bupati, DPRD, Bagian Hukum, Kemenkumham, Bag. Hukum, SKPD. Pada layanan JDIH ini Aplikasi yang digunakan adalah JDIH.



Gambar 3.4.35 RAL.01.28.01 Layanan JDIIH Penyusunan Perda



Gambar 3.4.36 RAL01.28.01 Layanan Penyusunan SK dan Perbup

14. Layanan Perizinan

Dalam menunjang layanan Perizinan yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

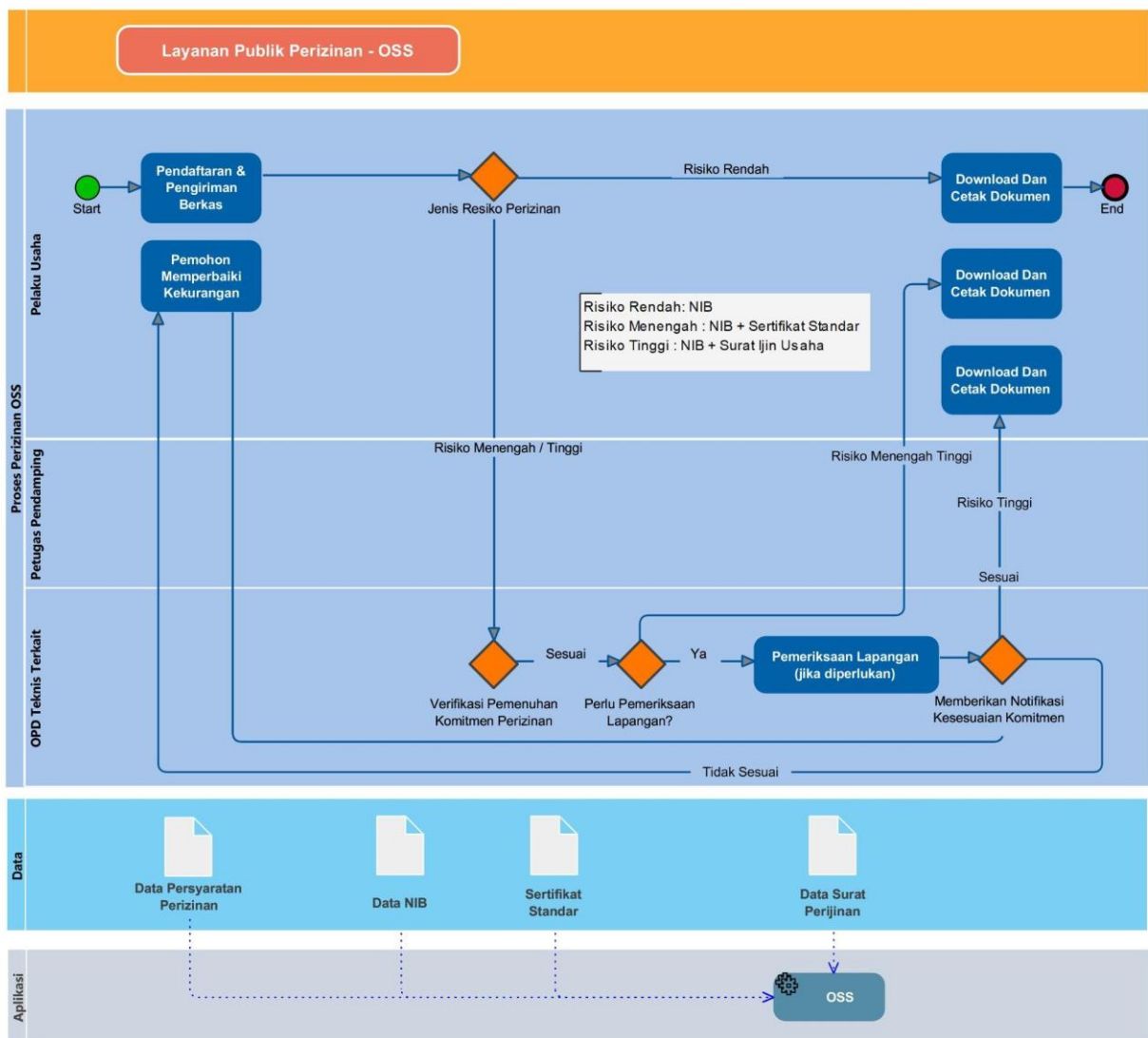
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, DPMPTSP melaksanakan fungsi:

- a) Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- c) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

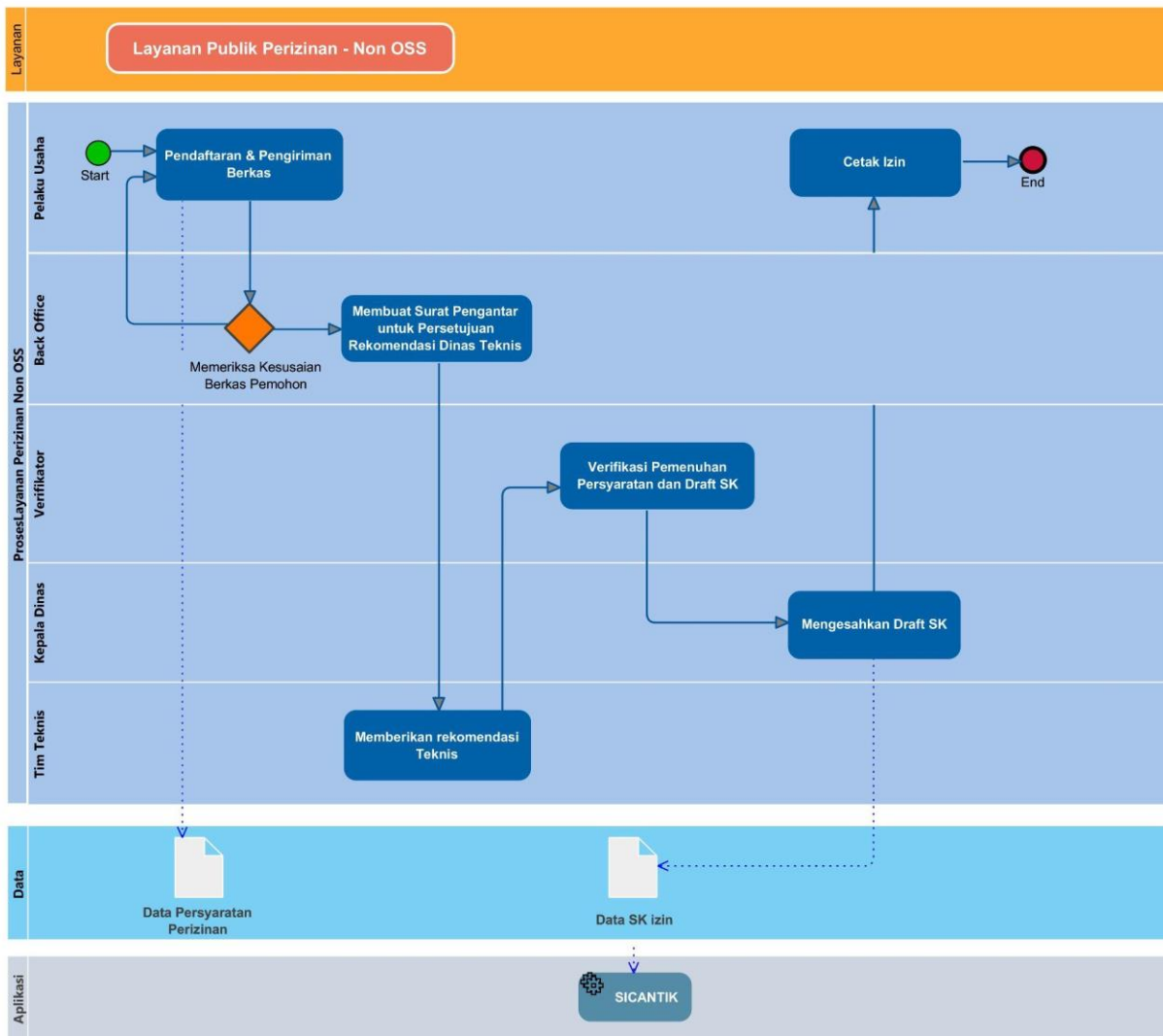
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan Perizinan yang terdapat di DPMPTSP adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.01 Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.01.16 Perizinan
3	Kategori Layanan	RAL.01.16.01 Layanan Perizinan OSS RAL.01.16.02 Layanan Perizinan SICANTIK

DPMPTSP memiliki 2 kategori layanan perizinan yang melibatkan SKPD Terkait, Petugas Pendamping, Pelaku Usaha, Kepala Dinas, verifikator, Tim Teknis. Pada layanan perizinan ini Aplikasi yang digunakan adalah OSS dan SICANTIK.



Gambar 3.4.37 RAL.01.16.01 Layanan Perizinan OSS



Gambar 3.4.38 RAL.01.16.01 Layanan Perizinan Non-OSS

15. Layanan Kesehatan

Dalam menunjang layanan Kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

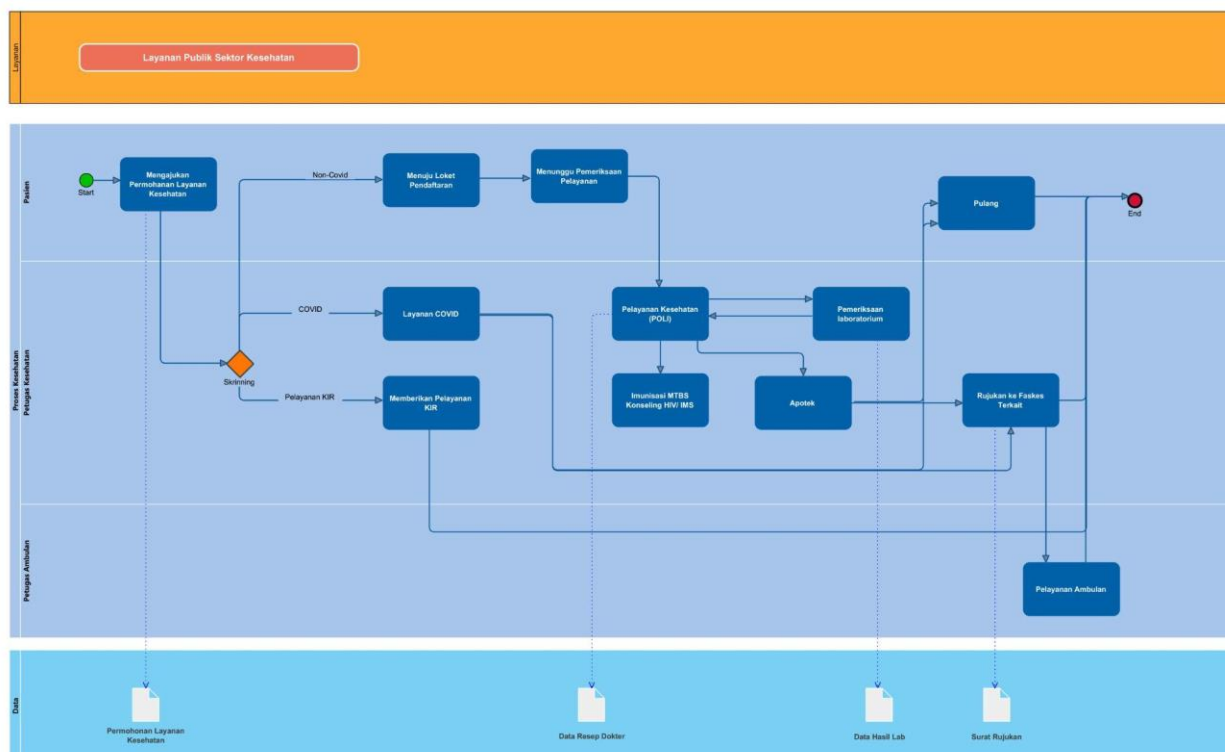
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- d) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi, dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.
- e) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan kesehatan yang terdapat di Dinas Kesehatan adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.01 Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.01.25 Kesehatan
3	Kategori Layanan	RAL.01.25.01 Layanan Kesehatan

Dinas Kesehatan memiliki 1 kategori layanan kesehatan yang melibatkan Pasien, Petugas Kesehatan, dan Petugas Ambulan.



Gambar 3.4.39 RAL.01.25.01 Layanan Kesehatan

16. Layanan Kependudukan

Dalam menunjang layanan Kependudukan yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Dinas Kependudukan melaksanakan fungsi:

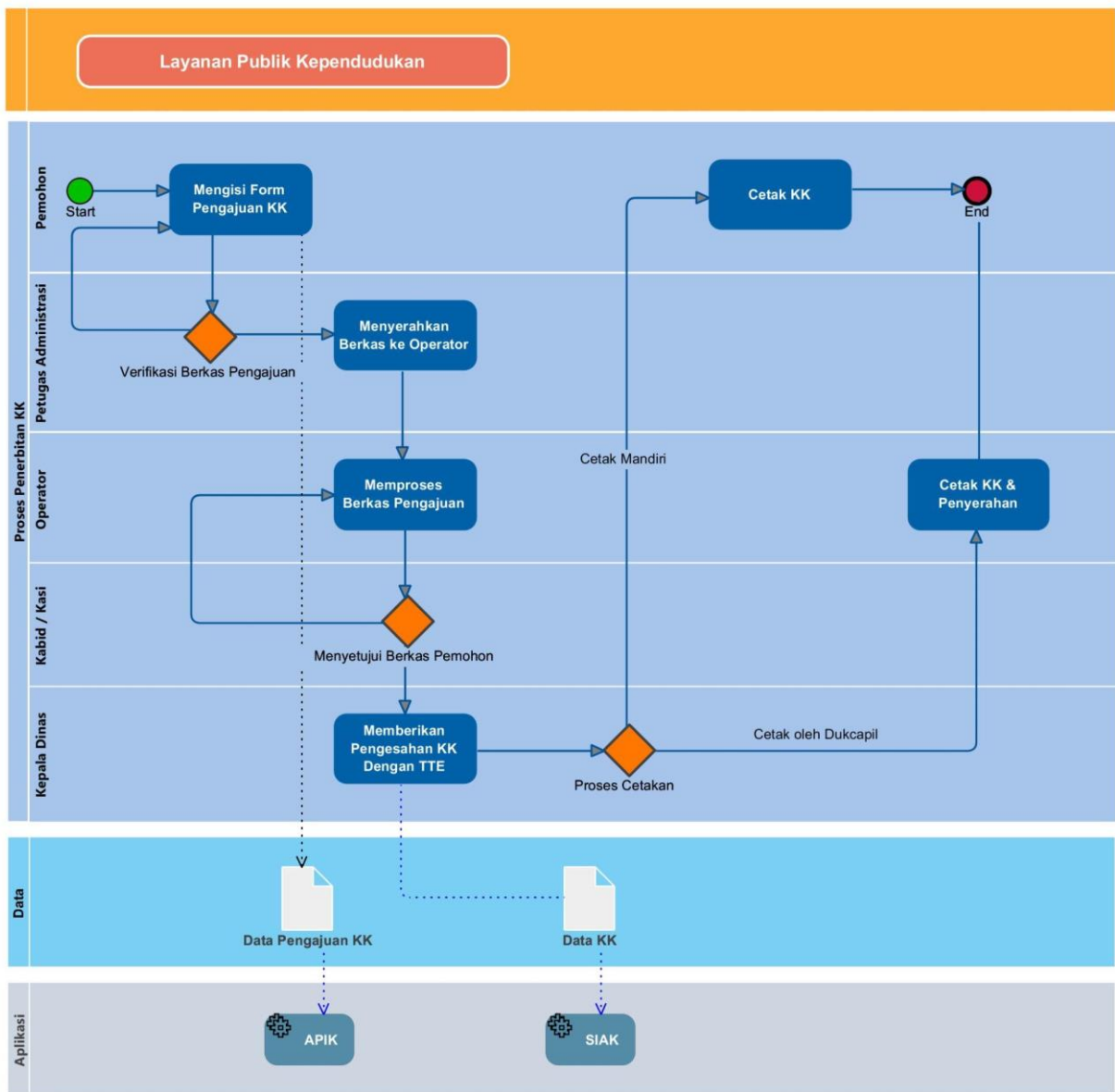
- Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, mengelola data serta menerbitkan Akta Kelahiran, Akta kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak.
- Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, serta mencatat pengesahan dan pengangkatan anak, perubahan nama Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing

- c) Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, serta mengelola perubahan status kewarganegaraan
- d) Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, serta mencatat pembatalan perkawinan dan perceraian

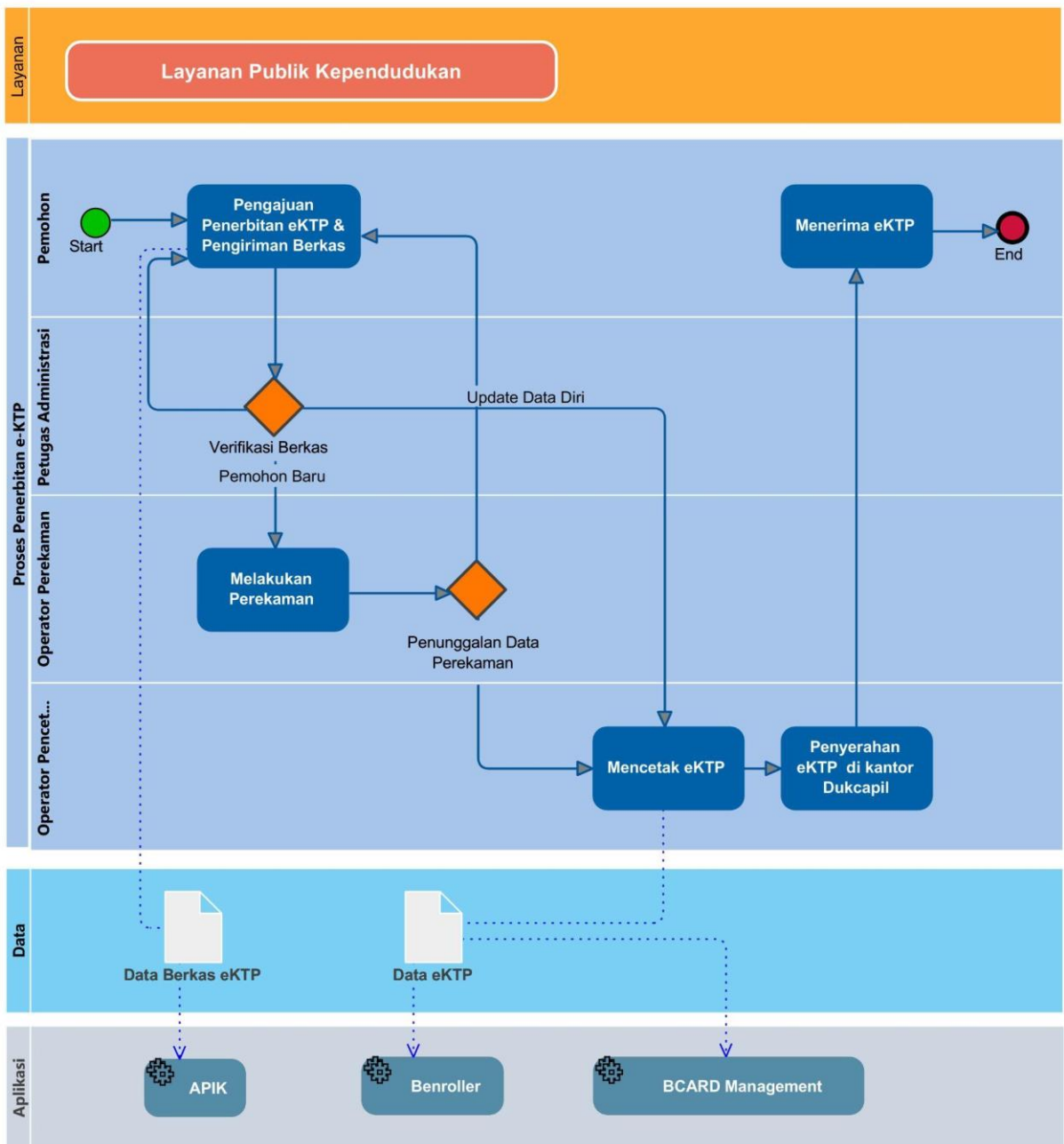
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan Kependudukan yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL 01 Layanan Publik
2	Area Layanan	01.23 Kependudukan
3	Kategori Layanan	RAL.01.23.01 Layanan Penerbitan KK RAL.01.25.02 Layanan Penerbitan e-KTP RAL.01.23.03 Layanan Akta Kelahiran RAL.01.23.04 Layanan Akta kematian RAL.01.23.05 Layanan Akta Perkawinan RAL.01.23.06 Layanan Akta Perceraian RAL.01.23.07 Layanan Penerbitan KIA RAL.01.23.08 Layanan Proses Surat Pindah

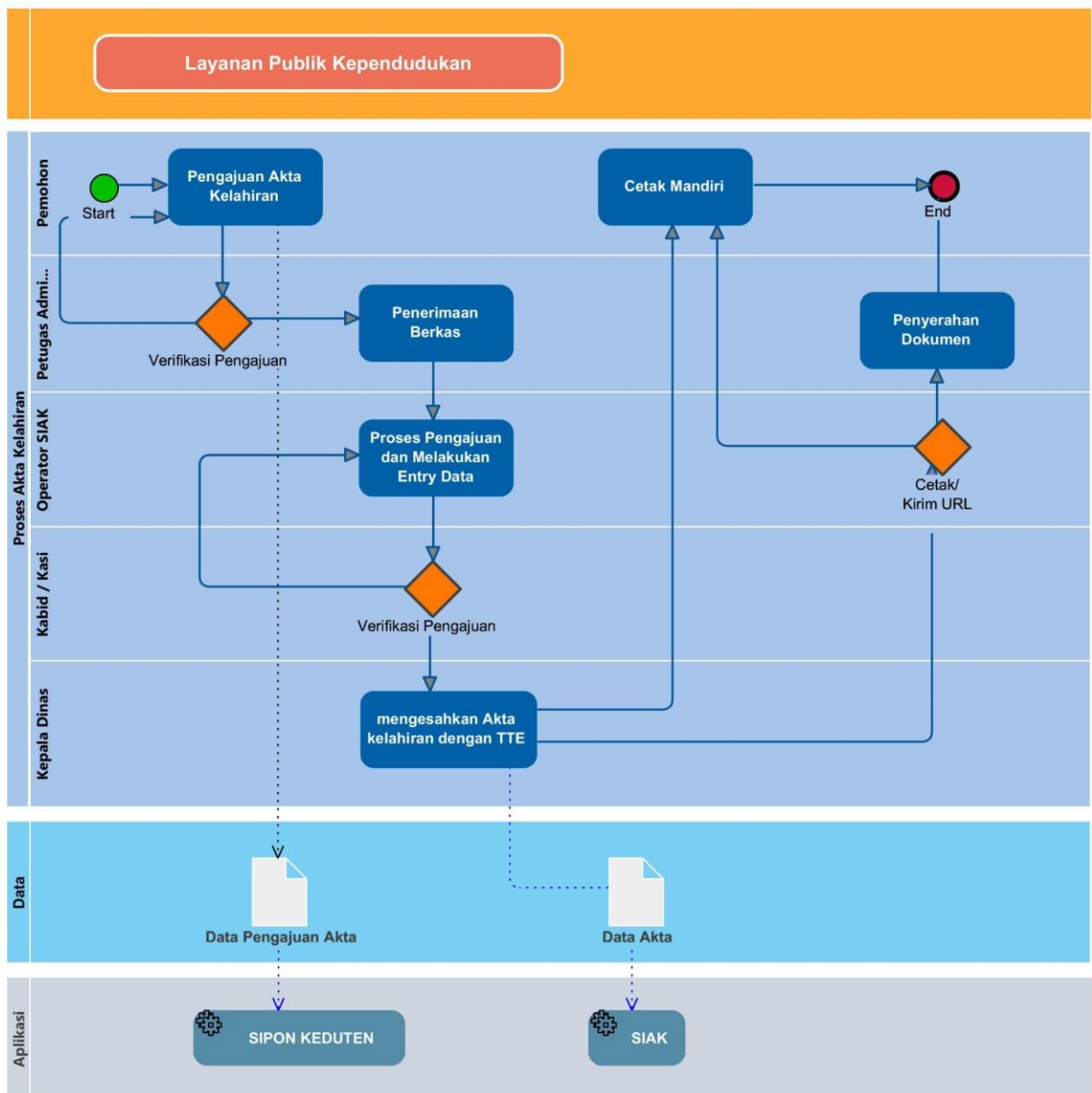
Dinas Kependudukan memiliki 8 kategori layanan Kependudukan yang melibatkan DUKCAPIL, Kabid/Kasi, Kepala Dinas, Petugas dan Masyarakat. Pada layanan kesehatan ini Aplikasi yang digunakan adalah APIK dan SIAK untuk penerbitan KK, Akta kematian, Surat Pindah, Penerbitan KIA, Akta Perkawinan, dan perceraian hanya SIAK. kemudian terdapat juga Benroller dan BCARD Management untuk layanan penerbitan e-KTP serta SIPON KEDUTEN pada akta Kelahiran



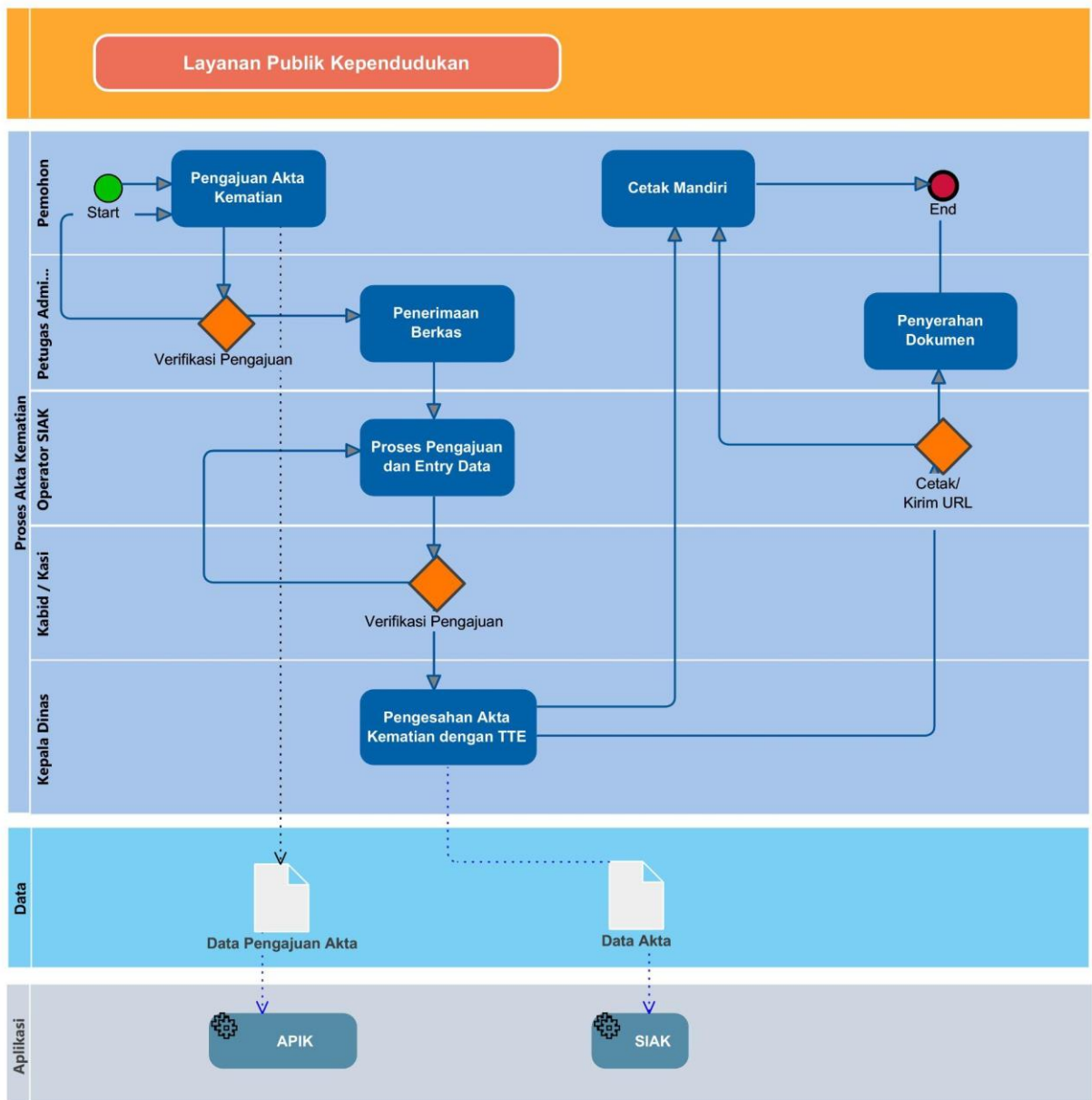
Gambar 3.4.40 RAL.01.23.01 Layanan Penerbitan KK



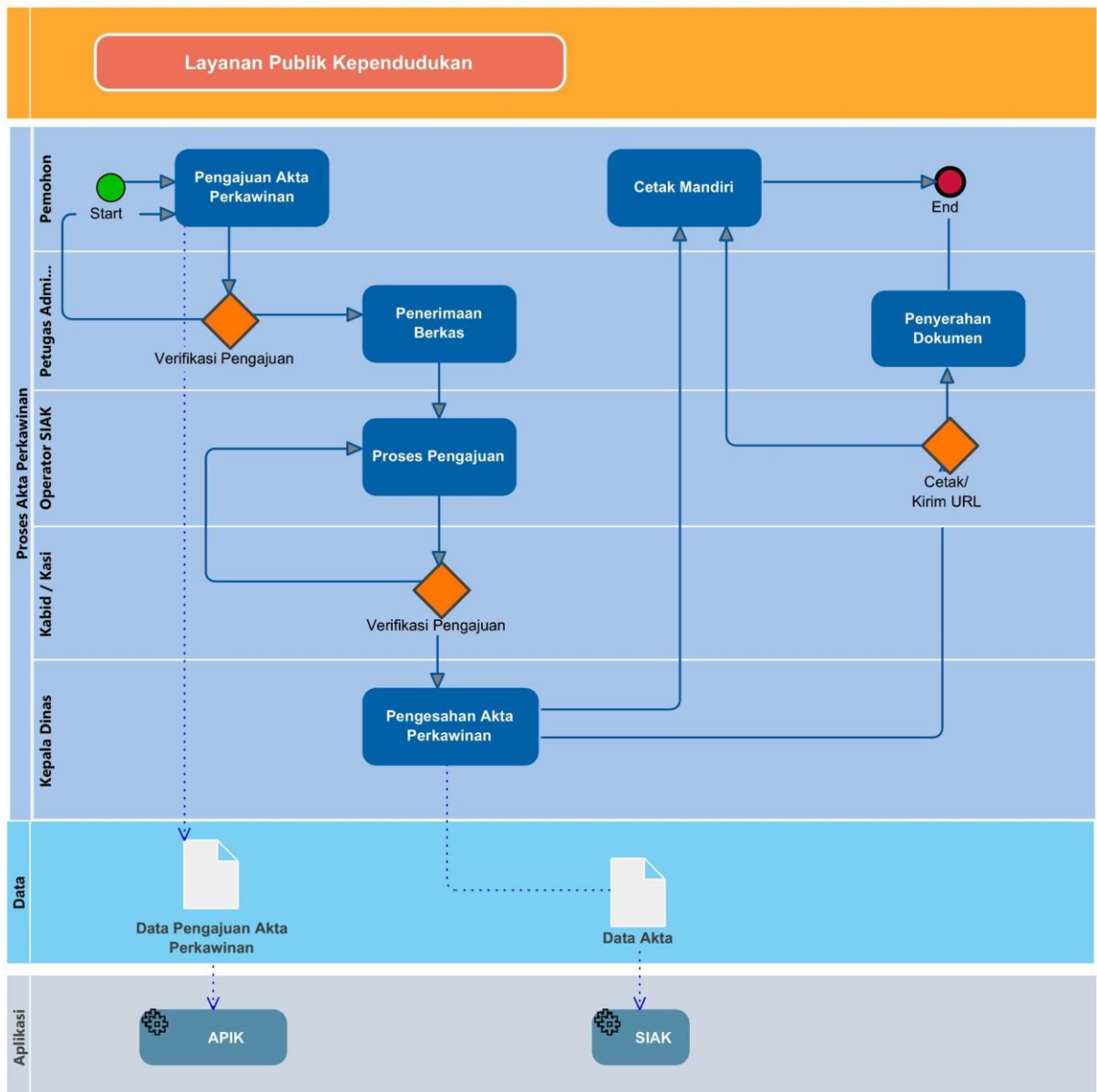
Gambar 3.4.41 RAL.01.25.02 Layanan Penerbitan e-KTP



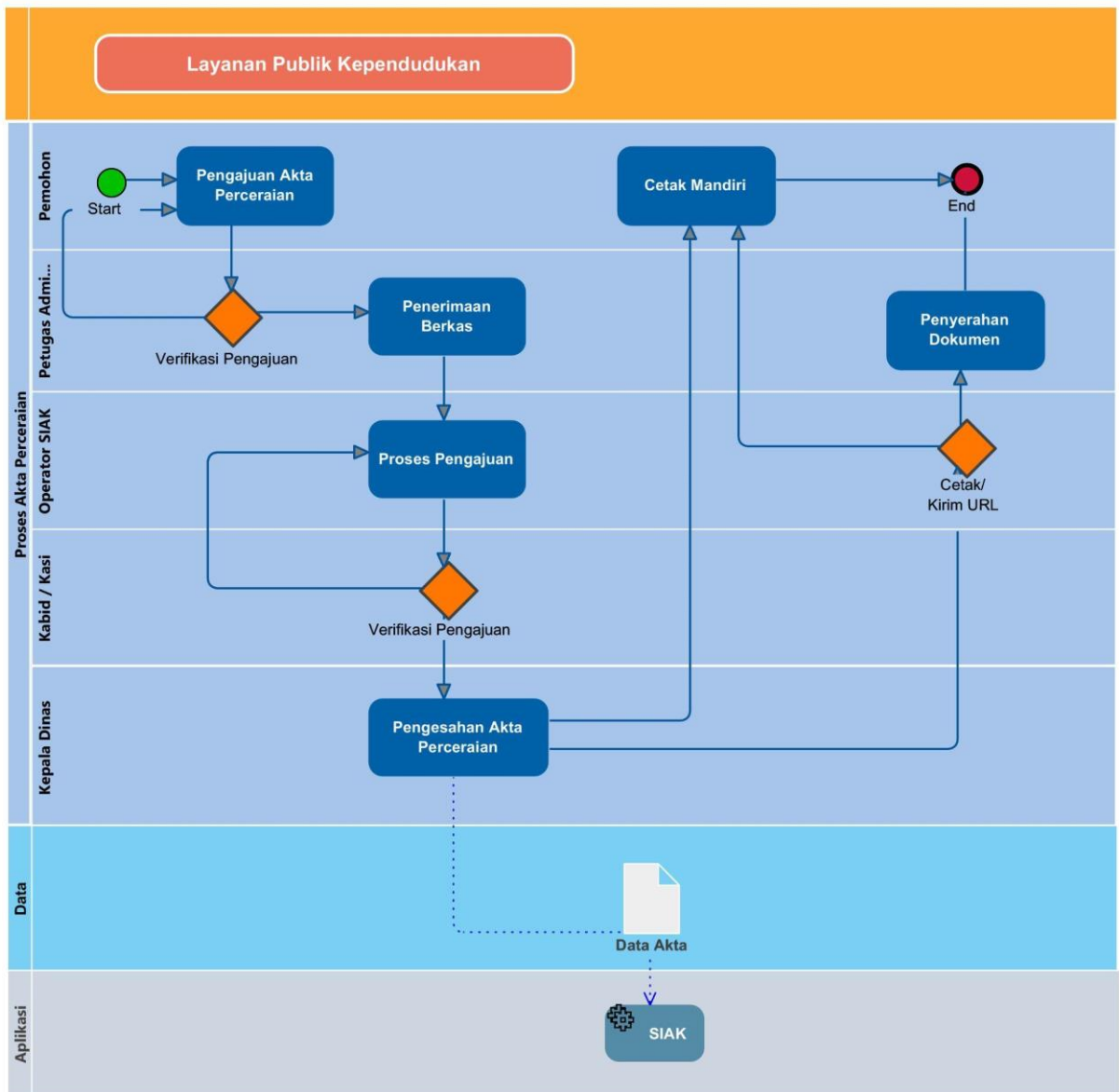
Gambar 3.4.42 RAL.01.23.03 Layanan Akta Kelahiran



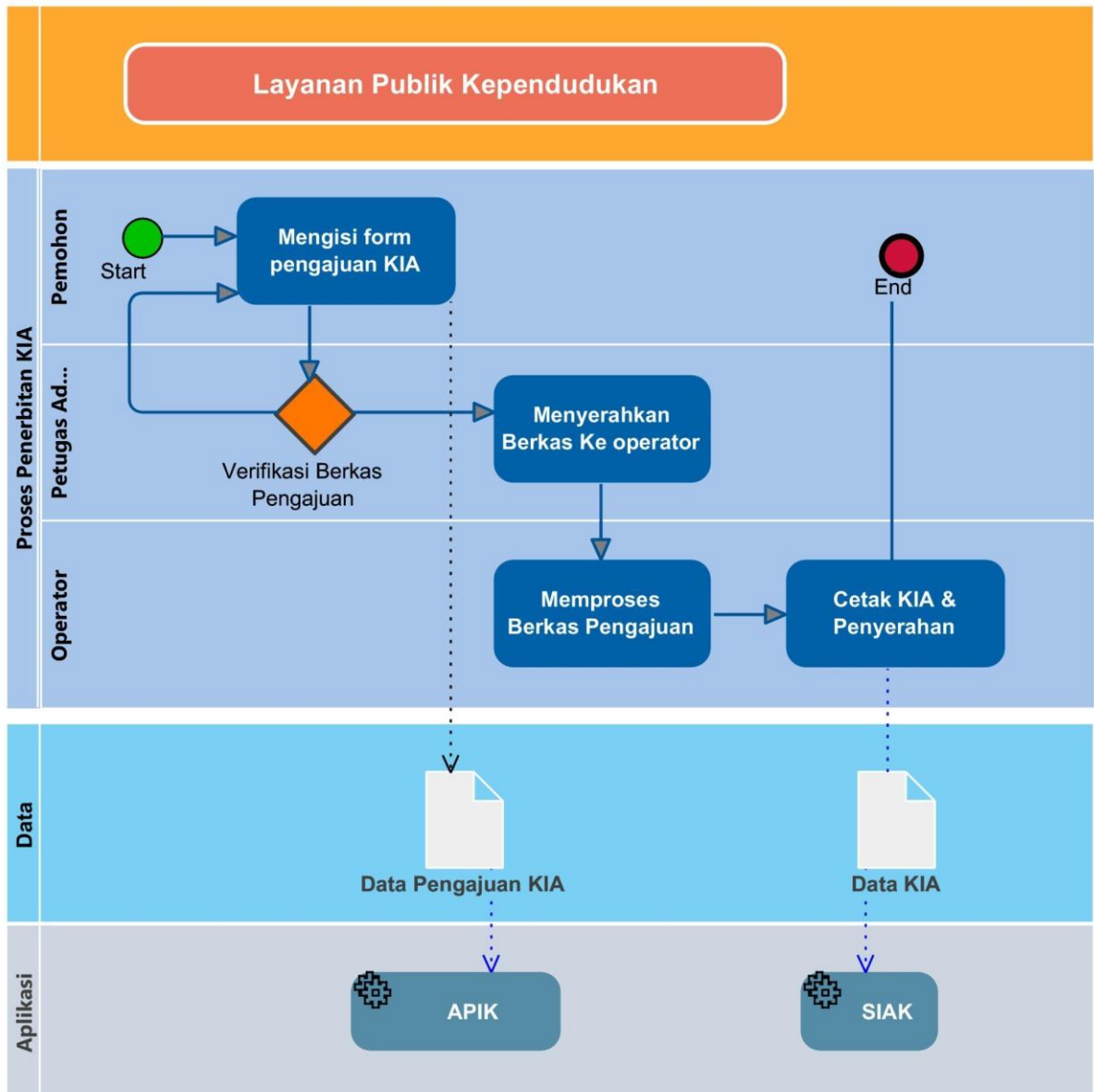
Gambar 3.4.43 RAL.01.25.04 Layanan Akta Kematian



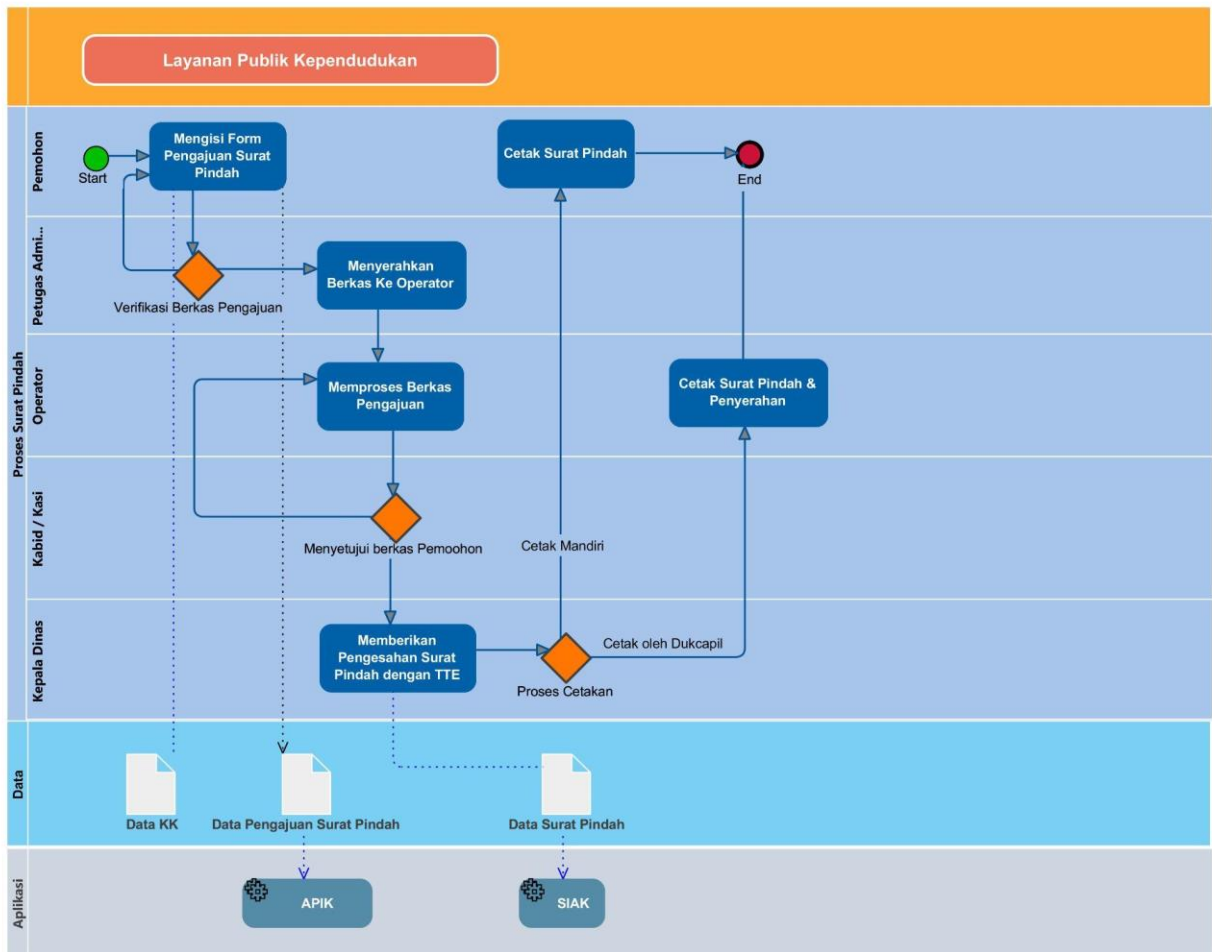
Gambar 3.4.44 RAL.01.25.05 Layanan Akta Perkawinan



Gambar 3.4.45 RAL.01.25.06 Layanan Akta Perceraian



Gambar 3.4.46 RAL.01.25.07 Layanan Penerbitan KIA



Gambar 3.4.47 RAL.01.25.08 Layanan Proses Surat Pindah

B. Katalog Layanan

Berikut ini dijelaskan mengenai katalog layanan dari seluruh SKPD di pemerintah kabupaten Tapin. Dimana untuk Level 1 & 2 mengacu pada kodifikasi referensi arsitektur layanan SPBE nasional. Selanjutnya untuk level 3 mengacu pada layanan yang ada di seluruh SKPD.

Tabel 3.4.1 Katalog Layanan

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan TPN-001	Layanan Gaji Berkala	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan TPN-001 Layanan Gaji Berkala
Layanan TPN-002	Layanan Kartu Taspen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-002 Layanan Kartu Taspen
Layanan TPN-003	Layanan Permohonan Pembuatan karis/Karsu	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-003 Layanan Permohonan Pembuatan karis/Karsu
Layanan TPN-004	Layanan Permohonan Pembuatan Karpeg	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-004 Layanan Permohonan Pembuatan Karpeg
Layanan TPN-005	Layanan Profil Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-005 Layanan Profil Kepegawaian
Layanan TPN-006	Layanan TPP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-006 Layanan TPP
Layanan TPN-007	Layanan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-007 Layanan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Layanan TPN-008	Layanan Usul Kenaikan Pangkat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-008 Layanan Usul Kenaikan Pangkat

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan TPN-009	Layanan Usul pencatuman Gelar	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-009 Layanan Usul pencatuman Gelar
Layanan TPN-010	Layanan Usul Pensiun	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-010 Layanan Usul Pensiun
Layanan TPN-011	Layanan Pelatihan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TPN-08.02. Pengelolaan Kepegawaian	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan TPN-011 Layanan Pelatihan ASN
Layanan TPN-012	Layanan Pendataan dan Permohonan SKT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TPN-09.03. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Politik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.29. Keamanan	Layanan TPN-012 Layanan Pendataan dan Permohonan SKT
Layanan TPN-013	Layanan Data Anggaran	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TPN-14.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan TPN-013 Layanan Data Anggaran
Layanan TPN-014	Layanan Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TPN-14.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan TPN-014 Layanan Keuangan
Layanan TPN-015	Layanan Informasi dan Bantuan Logistik Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TPN-06.04. Penyiapan Tangguh Bencana	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan TPN-015 Layanan Informasi dan Bantuan Logistik Kebencanaan
Layanan TPN-016	Layanan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	TPN-03.05. Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan TPN-016 Layanan Pajak Daerah
Layanan TPN-017	Layanan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	TPN-03.05. Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan TPN-017 Layanan Retribusi Daerah
Layanan TPN-018	Layanan Data Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN-11.02. Penelitian Dan Pengembangan Daerah	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Layanan TPN-018 Layanan Data Inovasi
Layanan TPN-019	Layanan Informasi Profil Dinas	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN-14.01. Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan TPN-019 Layanan Informasi Profil Dinas
Layanan TPN-020	Layanan Pengaduan Masyarakat	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN-14.01. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.45. Komunikasi	Layanan TPN-020 Layanan Pengaduan Masyarakat

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan TPN-021	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN-14.01. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Layanan TPN-021 Layanan Perencanaan Dan Penganggaran
Layanan TPN-022	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Pagu	Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	TPN-14.01. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Layanan TPN-022 Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Pagu
Layanan TPN-023	Layanan Informasi Produk Hukum	Bagian Hukum	TPN-13.01. Pengelolaan Informasi	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.28. Hukum	Layanan TPN-023 Layanan Informasi Produk Hukum
Layanan TPN-024	Layanan Informasi Pemerintahan, Informasi Sosial Kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	TPN-03.07. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan TPN-024 Layanan Informasi Pemerintahan, Informasi Sosial Kemasyarakatan
Layanan TPN-025	Layanan Informasi, Birokrasi Dan Tata Lakasana	Bagian Organisasi	TPN-08.01. Peningkatan Tata Kelola Organisasi	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan TPN-025 Layanan Informasi, Birokrasi Dan Tata Lakasana
Layanan TPN-026	Layanan Pelaporan Pembangunan Daerah	Bagian Pemerintahan	TPN-14.01. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.45. Komunikasi	Layanan TPN-026 Layanan Pelaporan Pembangunan Daerah
Layanan TPN-027	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	TPN-12.03. Pengadaan Barang Dan Jasa	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Layanan TPN-027 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Layanan TPN-028	Layanan Adminstrasi	Bagian Perekonomian dan Administrasi	TPN-15.02. Pendampingan Dan Asistensi Administrasi Daerah	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan TPN-028 Layanan Adminstrasi
Layanan TPN-029	Layanan Perlengkapan dan Pemeliharaan Rumah Tangga	Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	TPN-12.02. Pengelolaan Kerumahtanggaan	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan TPN-029 Layanan Perlengkapan dan Pemeliharaan Rumah Tangga
Layanan TPN-030	Layanan Informasi, Kebudayaan, Wisata, Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	TPN-04.03. Peningkatan Pariwisata	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.15. Pariwisata	Layanan TPN-030 Layanan Informasi, Kebudayaan, Wisata, Ekonomi Kreatif
Layanan TPN-031	Layanan Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.23. Kependudukan	Layanan TPN-031 Layanan Kependudukan
Layanan TPN-032	Layanan Survey Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TPN-07.01. Manajemen Pelayanan Publik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.45. Komunikasi	Layanan TPN-032 Layanan Survey Masyarakat
Layanan TPN-033	Layanan Covid-19	Dinas Kesehatan	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan TPN-033 Layanan Covid-19

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan TPN-034	Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan TPN-034 Layanan Kesehatan
Layanan TPN-035	Layanan Obat dan Resep	Dinas Kesehatan	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan TPN-035 Layanan Obat dan Resep
Layanan TPN-036	Layanan Rujukan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan TPN-036 Layanan Rujukan Rumah Sakit
Layanan TPN-037	Layanan Informasi Data Harga Pangan, Keamanan Pangan, Pengisian Lumbung Gabah, Dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	TPN-05.02. Peningkatan Kemandirian Pangan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.07. Pertanian	Layanan TPN-037 Layanan Informasi Data Harga Pangan, Keamanan Pangan, Pengisian Lumbung Gabah, Dan Keamanan Pangan
Layanan TPN-038	Layanan Evaluasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPN-13.01. Pengelolaan Informasi	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan TPN-038 Layanan Evaluasi
Layanan TPN-039	Layanan Identifikasi Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPN-13.03. Pengelolaan Satu Data Indonesia	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan TPN-039 Layanan Identifikasi Data
Layanan TPN-040	Layanan Pelaporan	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPN-13.01. Pengelolaan Informasi	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.45. Komunikasi	Layanan TPN-040 Layanan Pelaporan
Layanan TPN-041	Layanan Portal Website	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPN-13.02. Pengelolaan Aplikasi	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.44. Informasi	Layanan TPN-041 Layanan Portal Website
Layanan TPN-042	Layanan Satu Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	TPN-13.03. Pengelolaan Satu Data Indonesia	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan TPN-042 Layanan Satu Data
Layanan TPN-043	Layanan Informasi Pencemaran Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.41. Lingkungan Hidup	Layanan TPN-043 Layanan Informasi Pencemaran Lingkungan
Layanan TPN-044	Layanan Izin Pengelolaan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.41. Lingkungan Hidup	Layanan TPN-044 Layanan Izin Pengelolaan Limbah B3
Layanan TPN-045	Layanan Permohonan Izin Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	TPN-06.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.41. Lingkungan Hidup	Layanan TPN-045 Layanan Permohonan Izin Lingkungan
Layanan TPN-046	Layanan Izin Penutupan Saluran Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.41. Lingkungan Hidup	Layanan TPN-046 Layanan Izin Penutupan Saluran Irigasi

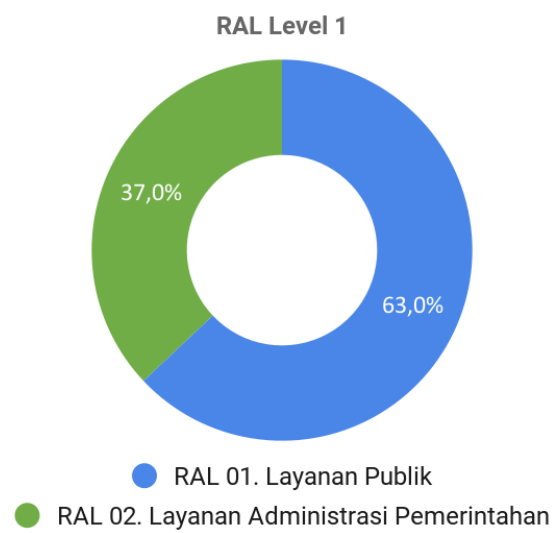
ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan TPN-047	Layanan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.41. Lingkungan Hidup	Layanan TPN-047 Layanan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
Layanan TPN-048	Layanan Informasi Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	TPN-05.01. Pemberdayaan Desa	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan TPN-048 Layanan Informasi Keuangan Desa
Layanan TPN-049	Layanan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan TPN-049 Layanan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga
Layanan TPN-050	Layanan Kedinasan Pembinaan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.36. Olahraga	Layanan TPN-050 Layanan Kedinasan Pembinaan Olahraga
Layanan TPN-051	Layanan Paskibraka, Popda	Dinas Pemuda dan Olahraga	TPN-05.03. Pembinaan Kepemudaan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.36. Olahraga	Layanan TPN-051 Layanan Paskibraka, Popda
Layanan TPN-052	Layanan Aspirasi	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.36. Olahraga	Layanan TPN-052 Layanan Aspirasi
Layanan TPN-053	Layanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	TPN-03.02. Peningkatan Perekonomian Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.16. Perizinan dan Akreditasi	Layanan TPN-053 Layanan Perizinan
Layanan TPN-054	Layanan Berkala Dan Sk	Dinas Pendidikan	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Layanan TPN-054 Layanan Berkala Dan Sk
Layanan TPN-055	Layanan Penerimaan Siswa Baru	Dinas Pendidikan	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Layanan TPN-055 Layanan Penerimaan Siswa Baru
Layanan TPN-056	Layanan Pendidikan	Dinas Pendidikan	TPN-01.01. Peningkatan Pendidikan PAUD, SD, SMP	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Layanan TPN-056 Layanan Pendidikan
Layanan TPN-057	Layanan Konsuling	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan TPN-057 Layanan Konsuling
Layanan TPN-058	Layanan Konsultasi Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan TPN-058 Layanan Konsultasi Keluarga

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan TPN-059	Layanan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TPN-03.06. Pemberdayaan Keluarga	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.23. Kependudukan	Layanan TPN-059 Layanan Keluarga Berencana
Layanan TPN-060	Layanan Database Toko Pasar	Dinas Perdagangan	TPN-03.04. Pengelolaan Perdagangan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.06. Perdagangan	Layanan TPN-060 Layanan Database Toko Pasar
Layanan TPN-061	Layanan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar	Dinas Perdagangan	TPN-03.04. Pengelolaan Perdagangan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.06. Perdagangan	Layanan TPN-061 Layanan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar
Layanan TPN-062	Layanan Informasi Lingkungan Perhubungan Dan Keselamatan	Dinas Perhubungan	TPN-06.01. Pengelolaan Infrastruktur Dasar	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.29. Keamanan	Layanan TPN-062 Layanan Informasi Lingkungan Perhubungan Dan Keselamatan
Layanan TPN-063	Layanan Data Informasi Perikanan	Dinas Perikanan	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan TPN-063 Layanan Data Informasi Perikanan
Layanan TPN-064	Layanan Produk UMKM	Dinas Perindustrian	TPN-03.07. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.14. Usaha Kecil dan Menengah	Layanan TPN-064 Layanan Produk UMKM
Layanan TPN-065	Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TPN-01.02. Fasilitasi SDM Unggul	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.05. Kesekretariatan Negara	Layanan TPN-065 Layanan Perpustakaan
Layanan TPN-066	Layanan Surat Menyurat Dan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TPN-12.01. Pengelolaan Kearsipan	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.05. Kesekretariatan Negara	Layanan TPN-066 Layanan Surat Menyurat Dan Arsip Dinamis
Layanan TPN-067	Layanan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.07. Pertanian	Layanan TPN-067 Layanan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Layanan TPN-068	Layanan Pembinaan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian	Dinas Pertanian	TPN-04.04. Peningkatan Pertanian Perikanan Dan Peternakan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.07. Pertanian	Layanan TPN-068 Layanan Pembinaan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian
Layanan TPN-069	Layanan Fasilitasi Dan Sertifikasi Aset Tanah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	TPN-06.03. Pemanfaatan Tata Ruang	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.22. Pertanahan	Layanan TPN-069 Layanan Fasilitasi Dan Sertifikasi Aset Tanah
Layanan TPN-070	Layanan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan	TPN-06.03. Pemanfaatan Tata Ruang	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah	Layanan TPN-070 Layanan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		Pertanahan			Tertinggal	
Layanan TPN-071	Layanan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	TPN-06.03. Pemanfaatan Tata Ruang	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.20. Perumahan	Layanan TPN-071 Layanan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Layanan TPN-072	Layanan Rekomendasi Pengesahan Siteplan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	TPN-06.03. Pemanfaatan Tata Ruang	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan TPN-072 Layanan Rekomendasi Pengesahan Siteplan
Layanan TPN-073	Layanan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan TPN-073 Layanan Kesejahteraan Sosial
Layanan TPN-074	Layanan Data PPKS	Dinas Sosial	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan TPN-074 Layanan Data PPKS
Layanan TPN-075	Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Dinas Sosial	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan TPN-075 Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
Layanan TPN-076	Layanan Terpadu Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	TPN-09.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Layanan TPN-076 Layanan Terpadu Ketenagakerjaan
Layanan TPN-077	Layanan Pelaporan Dan Akuntabilitas	Inspektorat	TPN-15.01. Penyelenggaraan Pengawasan	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.07. Akuntabilitas Kinerja	Layanan TPN-077 Layanan Pelaporan Dan Akuntabilitas
Layanan TPN-078	Layanan Informasi Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan TPN-078 Layanan Informasi Rumah Sakit
Layanan TPN-079	Layanan Pendaftaran Pasien	Rumah Sakit Umum Daerah	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan TPN-079 Layanan Pendaftaran Pasien
Layanan TPN-080	Layanan Rekam Medis	Rumah Sakit Umum Daerah	TPN-02.01. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan TPN-080 Layanan Rekam Medis
Layanan TPN-081	Layanan Pelaporan	SatpolPP	TPN-09.02. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	RAL 02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.07. Akuntabilitas Kinerja	Layanan TPN-081 Layanan Pelaporan

C. Analisis Diagram Layanan

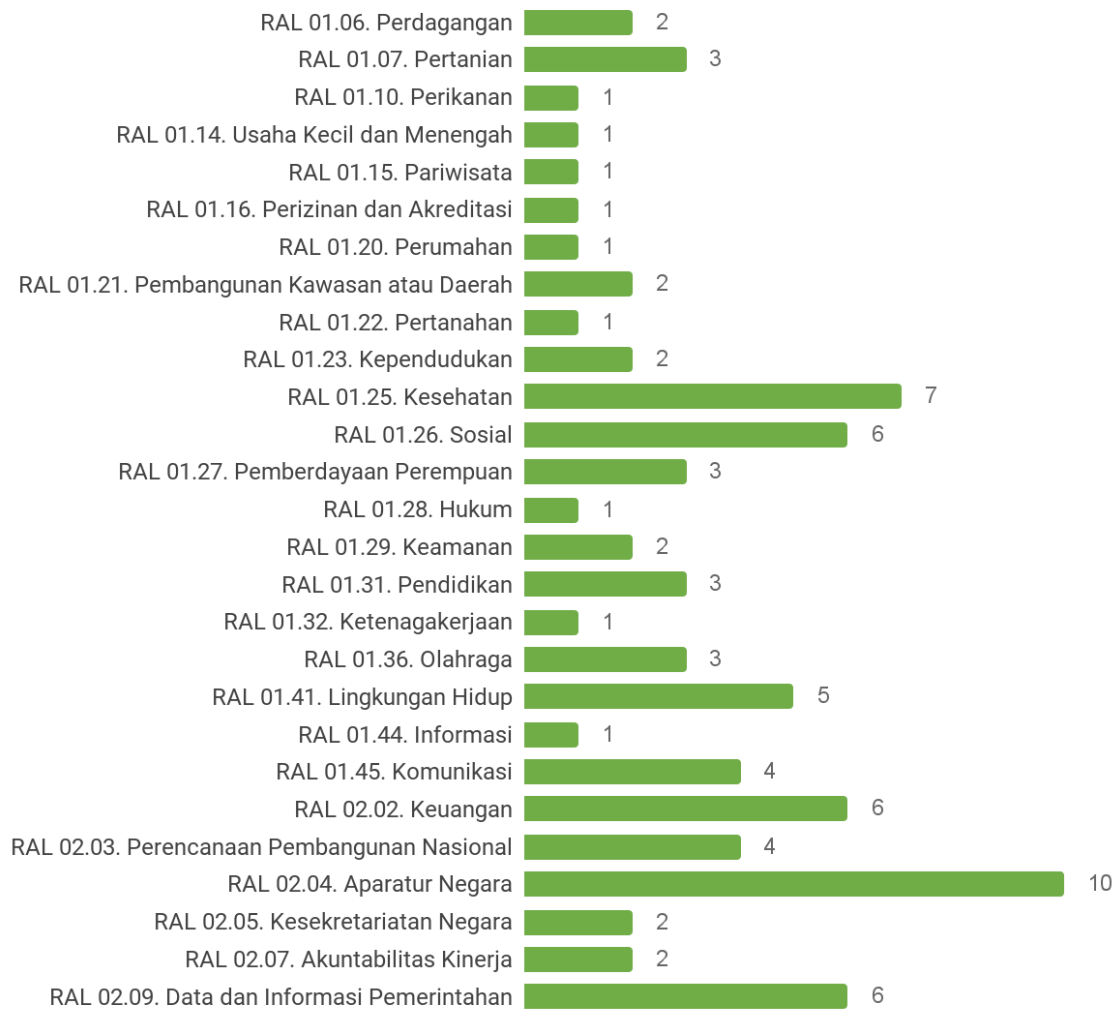
Analisa terhadap kondisi Layanan eksisting dapat dijabarkan sebagai berikut :



Grafik 3.4.1 RAL Level 1

Untuk RAL Level 1 penyesuaian dengan Standar Nasional, dimana ada 63,0% (51 Layanan) Merupakan Layanan Publik, dan 37,0% (30 Layanan) Merupakan Layanan Administrasi Pemerintahan.

RAL Level 2



Grafik 3.4.2 RAL Level 2

Untuk RAL Level 2 penyesuaian dengan Standar Nasional, Paling Banyak pada RAL 02.04 Aparatur Negara (10 Layanan), dan Paling Sedikit pada RAL 01.10 Perikanan, RAL 01.14 Usaha Kecil dan Menengah, RAL 01.15 Pariwisata, RAL 01.16 Perizinan dan Akreditasi, RAL 01.20 Perumahan, RAL 01.22 Pertanahan, RAL 01.28 Hukum, RAL 01.32 Ketenagakerjaan, RAL 01.44 Informasi.

3.5. Arsitektur Aplikasi Eksisting

A. Katalog Aplikasi Eksisting

Analisis kondisi eksisting dilakukan untuk mendapatkan data terkait aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menjalankan layanan yang dimilikinya. Penggalan data aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dilakukan dengan pengisian mandiri tiap SKPD dan survey. Setelah data didapatkan akan dilakukan rekap data dan disusun katalog aplikasi eksisting keseluruhan Kabupaten Tapin Hasil dari kondisi eksisting dijadikan acuan untuk Menyusun kondisi ideal yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Berikut ini disajikan daftar aplikasi eksisting yang digunakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin baik aplikasi dari instansi pusat maupun aplikasi internal daerah.

Tabel 3.5.1 Daftar Aplikasi yang dikelola oleh SKPD di Kabupaten Tapin.

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-001	Aplikasi Gaji Berkala	Sistem Informasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai	Web Based	Open Source		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Gaji	Layanan Gaji Berkala
APP-002	Kerja Tamasa	Sistem Informasi Pengelolaan TPP	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data TPP	Layanan TPP
APP-003	SAPA Tapin	Sistem Informasi Kepegawaian	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Kepegawaian	Layanan Profil Kepegawaian

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-004	SAPK BKN	Sistem Informasi Layanan Kepegawaian	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Kepegawaian	Layanan Profil Kepegawaian
APP-005	Sinormas Tapin	Sistem Informasi Monitoring Pelayanan Administrasi Pendaftaran Dan Pendataan Ormas/Parpol	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Ormas	
APP-006	PINTBUK	Sistem Informasi Transaksi Tuntunai Bendahara	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Anggaran / Keuangan	
APP-007	SIMDA	Sistem Informasi Keuangan	Desktop	Open Source	MySQL	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Anggaran / Keuangan	Layanan Keuangan
APP-008	SIPD	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Anggaran / Keuangan	Layanan Keuangan
APP-009	Logistik Bencana	Sistem Informasi Bantuan Logistik Bencana	Web Based	Open Source		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Logistik	Layanan Informasi dan Bantuan Logistik Kebencanaan
APP-010	SIMDA Pendapatan	Sistem Informasi Penetapan Dan Penerimaan Daerah	Desktop	Open Source		Badan Pendapatan Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data keuangan dan pajak retribusi daerah	Layanan Pajak Daerah
APP-011	SIMPBB	Sistem Informasi Penetapan Dan Penerimaan Daerah	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Pendapatan Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data keuangan dan pajak retribusi daerah	Layanan Retribusi Daerah
APP-012	SIMPBHTB	Sistem Informasi Penetapan Dan Penerimaan Pajak PBHTB	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Pendapatan Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Arsip Statis dan Arsip Dinamis	

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ UnIt Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-013	e-Monev	Sistem Informasi Monitoring Evaluasi	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Monitoring Evaluasi	Layanan Evaluasi
APP-014	e-Office	Sistem Informasi Tata Naskah Dinas Elektronik	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Arsip Statis dan Arsip Dinamis	Layanan Surat Menyurat Dan Arsip Dinamis
APP-015	e-Starlitbang	Sistem Informasi Inovasi Dan Berita Penelitian Dan Pembangunan	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Perencanaan Keuangan	Layanan Keuangan
APP-016	e-Tamasa V1	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Etamasa V1	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Perencanaan Keuangan	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran
APP-017	e-Tamasa V2	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Etamasa V2	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Perencanaan Keuangan	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran
APP-018	KRISNA DAK	Sistem Informasi DAK Fisik	Web Based	Open Source		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data DAK Fisik	
APP-019	SI DAMA SUKA CETING	Sistem Informasi Dasa Wisma Supaya Kita Cegah Stunting	Web Based	Open Source	MySQL	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Stunting	
APP-020	JDIH	Sistem Informasi Produk Hukum	Web Based	Open Source	MySQL	Bagian Hukum	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Produk Hukum	Layanan Informasi Produk Hukum
APP-021	e-SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Online	Web Based	Open Source		Bagian Organisasi	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Akuntabilitas Kinerja	

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-022	e-SAKIP REVIU	Sistem Informasi Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja	Web Based	Open Source	MySQL	Bagian Organisasi	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Akuntabilitas Kinerja	Layanan Pelaporan Dan Akuntabilitas
APP-023	PMPRB	Sistem Informasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Web Based	Open Source	MySQL	Bagian Organisasi	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Reformasi Birokrasi	
APP-024	SIMONA	Monitoring Dan Evaluasi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten / Kota	Web Based	Open Source	MySQL	Bagian Organisasi	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Monitoring Evaluasi	
APP-025	SINOVIK	Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik	Web Based	Open Source	MySQL	Bagian Organisasi	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Pelayanan Publik	
APP-026	SILPPD	Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Web Based	Open Source		Bagian Pemerintahan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Pemerintahan Desa	
APP-027	LPSE	Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik	Web Based	Open Source	MySQL	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
APP-028	SimantabKu	Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Web Based	Open Source	MySQL	Bagian Umum dan Keuangan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data informasi dan keuangan	
APP-029	SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Web Based	Open Source		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Kependudukan	Layanan Kependudukan
APP-030	Survey Kepuasan Masyarakat	Aplikasi Survei Kepuasan Publik	Web Based	Open Source		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Survey Kepuasan Masyarakat	Layanan Survey Masyarakat
APP-031	All Record Antigen	Sistem Informasi Penginapan Rapid Antigen	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Antigen dan PCR	Layanan Covid-19

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-032	All Record PCR	Sistem Informasi Allrecord Pemeriksaan Pcr Tc-19	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Antigen dan PCR	Layanan Covid-19
APP-033	Aplikasi Keluarga Sehat	Sistem Informasi Keluarga Sehat	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Informasi Keluarga	Layanan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga
APP-034	e-KOHORT	Sistem Manajemen Data Kohort Kesehatan Ibu Dan Bayi Balita	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data kesehatan Ibu dan Balita	Layanan Kesehatan
APP-035	e-LOGISTIK	Sistem Informasi Bank Data Ketersediaan Obat	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Ketersediaan Obat	Layanan Obat dan Resep
APP-036	KOMDAT	Sistem Informasi Untuk Mengumpulkan Data Informasi Secara Berkala Yang Bersumber Dari Dinas Kesehatan Kab/Kota Dan Dinas Kesehatan Provinsi	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Informasi, Layanan, Kesehatan	
APP-037	KPCPEN	Sistem Informasi Pemulihan Ekonomi Nasional	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Ekonomi Sosial	
APP-038	MPDN	Sistem Informasi terkait dengan Kematian Maternal dan Perinatal	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Kematian	
APP-039	PPCOVID	Sistem Informasi Data Covid	Web Based	Open Source	Mysql	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Covid	Layanan Covid-19
APP-040	Program Pelaporan ISPA	Sistem Pelaporan Ispa	Desktop	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Penyakit	
APP-041	PWS IMUNISASI	Sistem Pelaporan Dan Pemantauan Wilayah	Desktop	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Imunisasi	

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ UnIt Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
		Setempat (PWS) Program Imunisasi Dengan Aplikasi Data Entri Imunisasi (DETI)								
APP-042	SIHA	Sistem Informasi Hiv/Aids Dan Ims	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Penyakit	
APP-043	SIPK	Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan	Desktop	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Anggaran / Keuangan	
APP-044	SIPNAP	Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika & Psikotropika Nasional	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data KKN	
APP-045	SIPTM	Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Penyakit	
APP-046	SISFO Gizi Terpadu	Sistem Informasi Gizi Terpadu	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Gizi	
APP-047	SISKOHAT	Sistem Informasi Kesehatan Haji Indonesia	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Kesehatan Haji	
APP-048	SISMAL	Sistem Informasi Surveilans Malaria	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Malaria	
APP-049	SITB	Sistem Informasi Tuberkulosis	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Penyakit	
APP-050	SKDR	Sistem Informasi Perkembangan Trend Suatu Penyakit Menular	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Penyakit	
APP-051	SMILE	Sistem Monitoring Imunisasi Dan Logistik Secara Elektronik	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Imunisasi	

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-052	Sertifikasi Beras	Sistem Informasi Sertifikasi Beras	Web Based	Open Source		Dinas Ketahanan Pangan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Harga Pangan	
APP-053	Monev SPBE	Sistem Informasi Evaluasi SPBE	Web Based	Open Source		Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Monitoring Evaluasi	Layanan Evaluasi
APP-054	SIDAK	Sistem Informasi Data Pemerintahan	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data informasi, data pemerintahan, data perlengkapan, data pemeliharaan	
APP-055	Sipenari Japin	Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	Mobile	Open Source		Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Anggaran / Keuangan	Layanan Pelaporan Dan Akuntabilitas
APP-056	SP4N LAPOR!	Sistem Informasi Pengaduan	Web Based	Open Source		Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Aduan	Layanan Pengaduan Masyarakat
APP-057	TIK	Sistem Informasi Identifikasi Data Tik	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Identifikasi TIK	
APP-058	Arsip Surat	Aplikasi Surat Menyurat Dinas Pupr	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Arsip Statis dan Arsip Dinamis	
APP-059	SI-Jantan	Aplikasi Pelaporan Jalan Dan Jembatan	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Laporan Jalan dan Jembatan	
APP-060	Besign	Tanda Tangan Elektronik	Web Based	Open Source		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data TTD Elektronik	

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ UnIt Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-061	SESKUDES	Sistem Informasi Perencanaan Keuangan Untuk Desa	Desktop	Open Source		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Perencanaan Keuangan	Layanan Informasi Keuangan Desa
APP-062	OSS RBA	Sistem Informasi Perizinan	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Perizinan OSS dan Non OSS	Layanan Perizinan
APP-063	SI CANTIK	Sistem Informasi Perizinan	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Perizinan OSS dan Non OSS	Layanan Perizinan
APP-064	PPDB	Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru	Web Based	Open Source		Dinas Pendidikan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Pendaftaran Siswa Baru	Layanan Pendidikan
APP-065	SIGUCAR	Sistem Informasi Guru Boleh Terpencar Berkala Selalu Lancar	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Pendidikan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Guru dan Siswa	Layanan Pendidikan
APP-066	E-Visum BKKBN	Sistem Informasi Pendukung Kinerja PKB/PLKB Di Lini Lapangan	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Kinerja PKB/PLKB	
APP-067	Kampung KB Online	Sistem Informasi Statistik Dan Pengelolaan Data Di Tingkat Kampung Kb	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Keluarga Berencana	
APP-068	Morena BKKBN	Sistem Informasi Pelaporan, Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Dak	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi DAK	
APP-069	NEW SIGA	Sistem Informasi Pengelolaan Data Dan Pengendalian Lapangan	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Informasi Keluarga	Layanan Keluarga Berencana
APP-070	Pembinaan Kader	Website Pembinaan Kader	Web Based	Open Source		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Informasi	

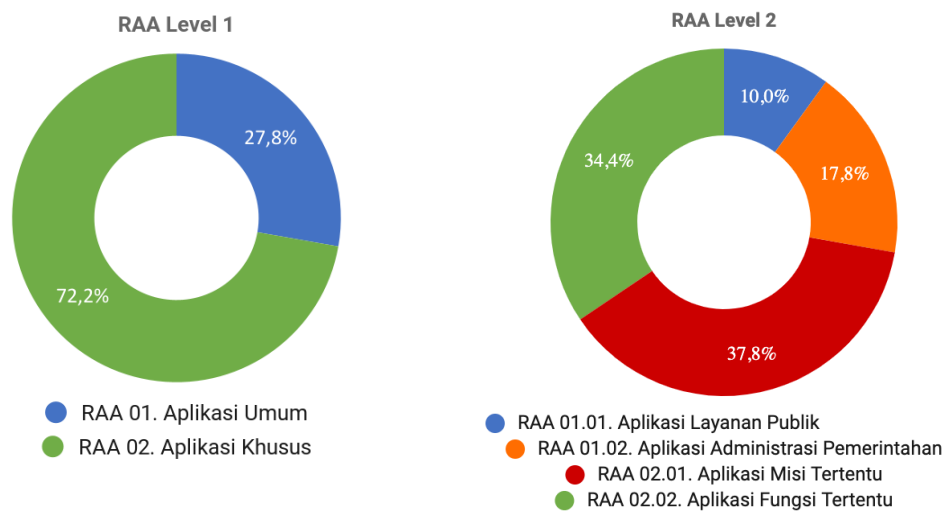
ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
						Berencana				
APP-071	SIRIKA	Sistem Informasi Pengelolaan Dan Pelaporan Logistik Alat Dan Obat Kontrasepsi	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Alat dan Obat Kontrasepsi	Layanan Keluarga Berencana
APP-072	Program database toko pasar	Pembuatan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko	Desktop	Open Source	NULL	Dinas Perdagangan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Arsip Statis dan Arsip Dinamis	
APP-073	SIDATU	Sistem Informasi Retribusi Pasar	Web Based	Open Source		Dinas Perdagangan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Retribusi Pasar	Layanan Retribusi Daerah
APP-074	SIPIKAT	Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Hasil Industri	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Perindustrian	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Industri	
APP-075	INLISLITE	Sistem Informasi Perpustakaan Digital Nasional Indonesia	Desktop	Open Source	MySQL	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Perpustakaan dan Katalog	Layanan Perpustakaan
APP-076	SRIKANDI	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	Web Based	Open Source	Mysql	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Arsip Statis dan Arsip Dinamis	Layanan Surat Menyurat Dan Arsip Dinamis
APP-077	SIRINTIK	Sistem Informasi Monitoring Statistik Pertanian	Web Based	Open Source	MySQL	Dinas Pertanian	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Pertanian	
APP-078	Datusoban	Data Pemerlu Pelayanan Sosial (Ppks) Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Psk)	Web Based	Open Source		Dinas Sosial	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	
APP-079	SIDATUK	Sistem Informasi Fakir Miskin Daerah	Web Based	Open Source		Dinas Sosial	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-080	SIKS-NG	Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation	Web Based	Open Source		Dinas Sosial	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	
APP-081	SISNAKER	Sistem Informasi Ketenagakerjaan Berbasis Online	Web Based	Open Source		Dinas Tenaga Kerja	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Ketenagakerjaan	Layanan Terpadu Ketenagakerjaan
APP-082	e-AUDITEE	Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Web Based	Open Source	MySQL	Inspektorat	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Tindak Lanjut	
APP-083	e-LHKPN	Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Web Based	Open Source	MySQL	Inspektorat	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Harta Kekayaan ASN	
APP-084	JAGA	Sistem Informasi Pencegahan Korupsi	Web Based	Open Source	MySQL	Inspektorat	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data KKN	
APP-085	SIHARKA	Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Asn	Web Based	Open Source	MySQL	Inspektorat	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Harta Kekayaan ASN	
APP-086	KhanzaLite	Sistem Informasi Rumah Sakit Online	Web Based	Open Source		Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Layanan Rumah Sakit	Layanan Informasi Rumah Sakit
APP-086	Pendaftaran Online Rumah Sakit	Website Pendaftaran Rumah Sakit	Web Based	Open Source	MySQL	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Layanan Rumah Sakit	
APP-088	SIMRS Khanza	Sistem Informasi Rumah Sakit Offline	Desktop	Open Source		Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Layanan Rumah Sakit	Layanan Informasi Rumah Sakit
APP-089	SIN@RS	Sistem Informasi Akuntansi	Desktop	Open Source	MySQL	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Anggaran / Keuangan	Layanan Keuangan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-090	JDIH DPRD	Produk Hukum DPRD	Web Based	Open Source	MySQL	Sekretariat DPRD	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	<i>Data Produk Hukum</i>	Layanan Informasi Produk Hukum

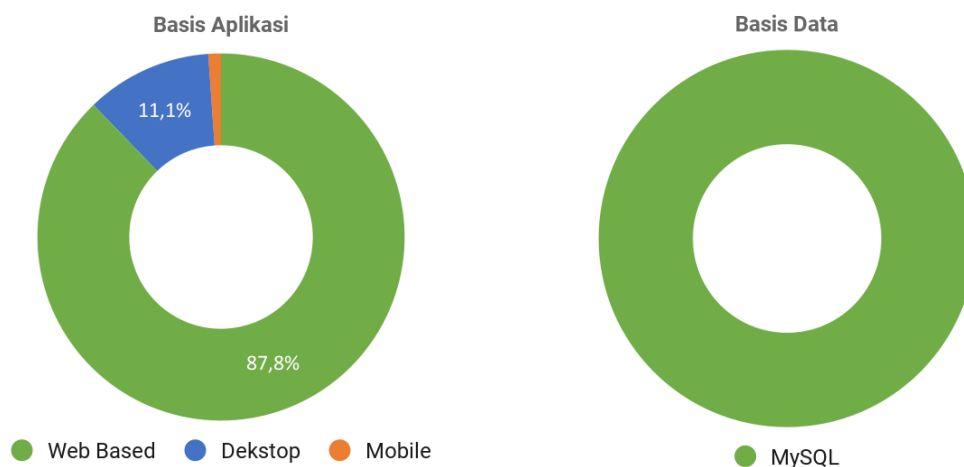
B. Analisis Diagram Aplikasi Eksisting

Analisa terhadap kondisi aplikasi eksisting dapat dijabarkan sebagai berikut:



Grafik 3.5.1 Referensi Arsitektur Aplikasi

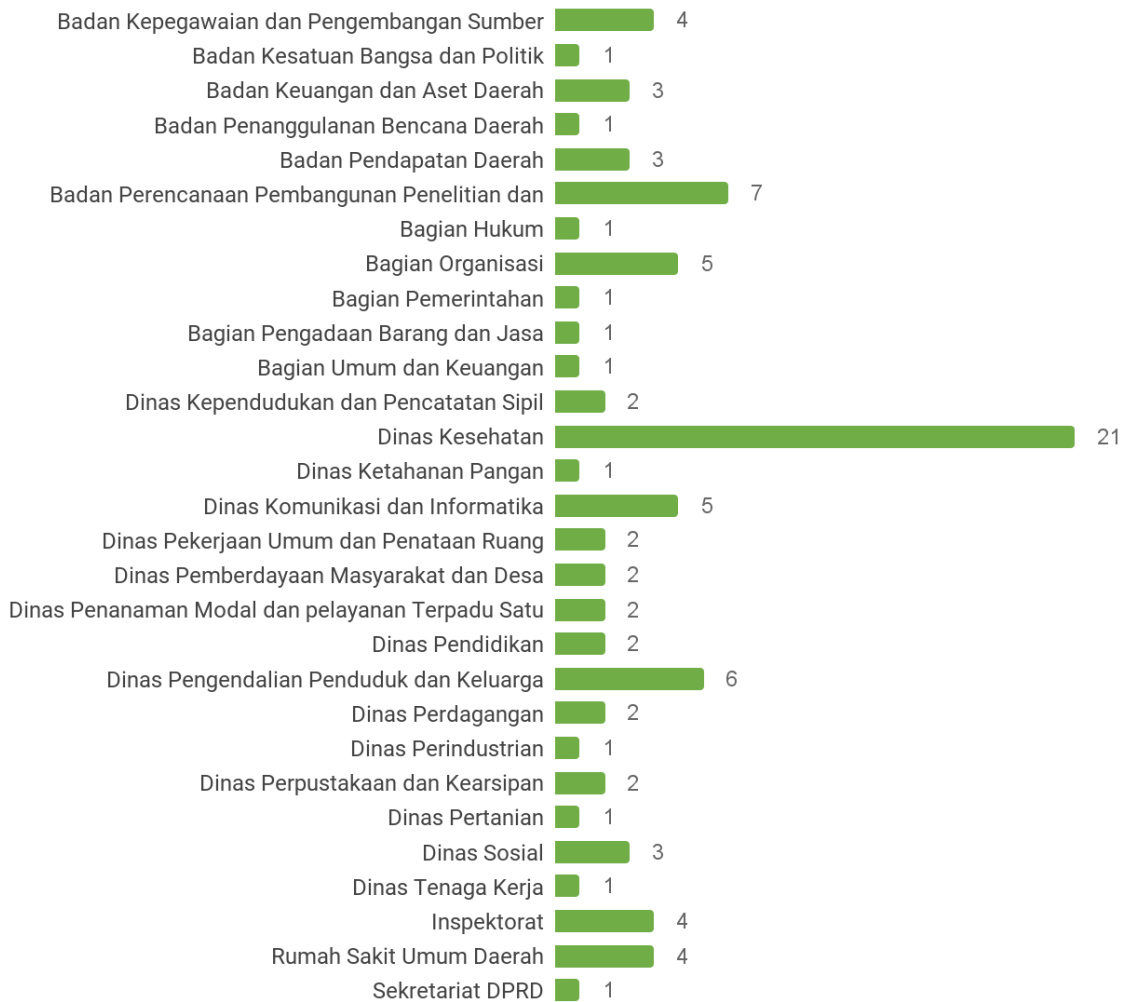
Terdapat 90 aplikasi yang eksisting dimana sesuai Referensi Arsitektur Level 1, 72,2% (69 aplikasi) merupakan RAA 01. Aplikasi Khusus, dan 27,8% (25 aplikasi) merupakan RAA 02. Aplikasi Umum. Untuk Referensi Arsitektur Level 2 dimana 10,0% (9 Aplikasi) merupakan RAA 01.01 Aplikasi Layanan Publik, dilanjut 17,8% (15 Aplikasi) merupakan RAA 01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan, dilanjut 37,8% (34 Aplikasi) merupakan Aplikasi RAA 02.01 Misi Tertentu, dan 34,4% (31 Aplikasi) merupakan Aplikasi RAA 02.02 Fungsi Tertentu di Perangkat Daerah.



Grafik 3.5.2 Kondisi Teknologi Sistem Informasi (ii)

Untuk Kondisi Teknologi Basis Aplikasi yang digunakan untuk saat ini Web Based sebanyak 86,8% (79 aplikasi), dilanjut dengan Desktop sebanyak 11,1% (10 aplikasi) dan yang ketiga adalah platform Mobile dengan jumlah sebanyak 1,1% (1 Aplikasi). Untuk Kondisi Teknologi Basis Data pada Aplikasi Eksisting dimana 100% (66 aplikasi) merupakan Database MySQL.

Unit Operasional Teknologi

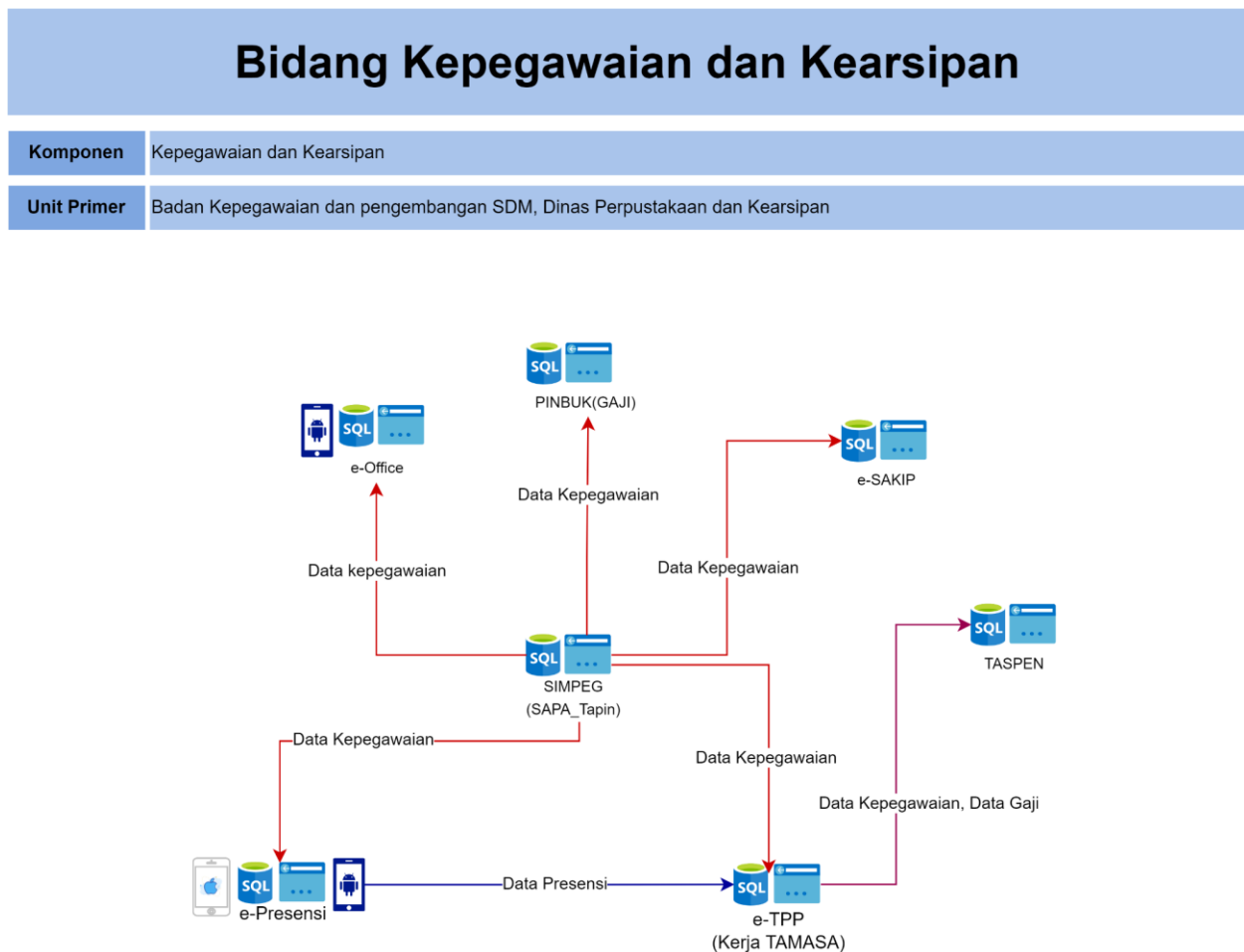


Grafik 3.5.3 SKPD Pengelola Aplikasi Eksisting

Pada Grafik 3.5.4 dapat dilihat SKPD Pengelola Aplikasi. pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM terdapat 4 aplikasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat 1 aplikasi, Badan Keuangan dan Aset Daerah terdapat 3 aplikasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat 1 aplikasi, Badan Pendapatan daerah terdapat 3 aplikasi, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat 7 aplikasi, Bagian Hukum terdapat 1 Aplikasi, Bagian Organisasi terdapat 5 aplikasi, Bagian Pemerintahan 1 aplikasi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdapat 1 aplikasi, Bagian umum dan Keuangan terdapat 1 aplikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 2 aplikasi, Dinas Kesehatan terdapat 21 aplikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat 5 aplikasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat 2 aplikasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 2 aplikasi, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat 2 aplikasi, Dinas Pendidikan terdapat 2 aplikasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 6 aplikasi, Dinas Perdagangan terdapat 2 aplikasi, Dinas Perindustrian terdapat 1 aplikasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat 2 aplikasi, Dinas Pertanian terdapat 1 aplikasi, Dinas Sosial terdapat 3 aplikasi, Dinas Tenaga Kerja terdapat 1 aplikasi, Inspektorat terdapat 4 aplikasi, Rumah Sakit Umum Daerah terdapat 4 aplikasi, Sekretariat terdapat DPRD 1 aplikasi.

C. Diagram Integrasi Antar Aplikasi

Integrasi aplikasi ini dimulai karena adanya kebutuhan pertukaran data/informasi antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Kebutuhan dari operasional pemerintahan mengharapkan data/informasi yang dimiliki oleh sebuah aplikasi dari suatu SKPD harus dikirimkan ke aplikasi lain yang dimiliki SKPD yang lain. Kebutuhan pertukaran data/informasi ini pun bisa berlaku dalam skala lebih luas, seperti integrasi antara pemerintah kabupaten Tapin dengan instansi pusat untuk kepentingan pelaporan dan sebagainya. Berikut ini digambarkan aplikasi yang sudah terintegrasi di lingkungan pemerintah kabupaten Tapin.

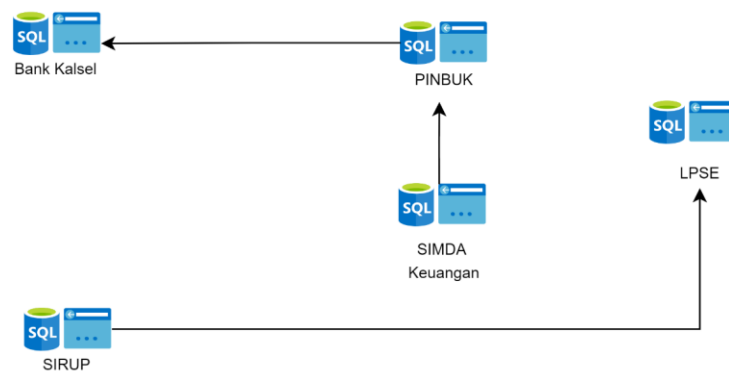


Gambar 3.5.1 Integrasi Antar Aplikasi pada Bidang Urusan Kepegawaian dan Kearsipan

Pada gambar 3.5.1 menunjukkan diagram Integrasi antar aplikasi kabupaten Tapin di bidang Kepegawaian dan Kearsipan dengan unit primernya adalah badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada bidang ini terdapat beberapa aplikasi yang digunakan seperti SIMPEG(SAPA_Tapin), PINBUK(Gaji), e-SAKIP, TASPEN, e-TPP, e-Presensi, dan e-Office. Aplikasi SIMPEG (SAPA_Tapin) menyediakan data kepegawaian yang digunakan oleh PINBUK(Gaji), e-SAKIP, e-TPP, e-Presensi, dan e-Office. kemudian e-TPP melakukan

pengambilan data presensi dari aplikasi e-presensi. Sedangkan Taspen melakukan pengambilan data Gaji dan kepegawaian dari e-TPP (Kerja TAMASA).

Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	
Komponen	Pengadaan Barang dan Jasa
Unit Primer	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa



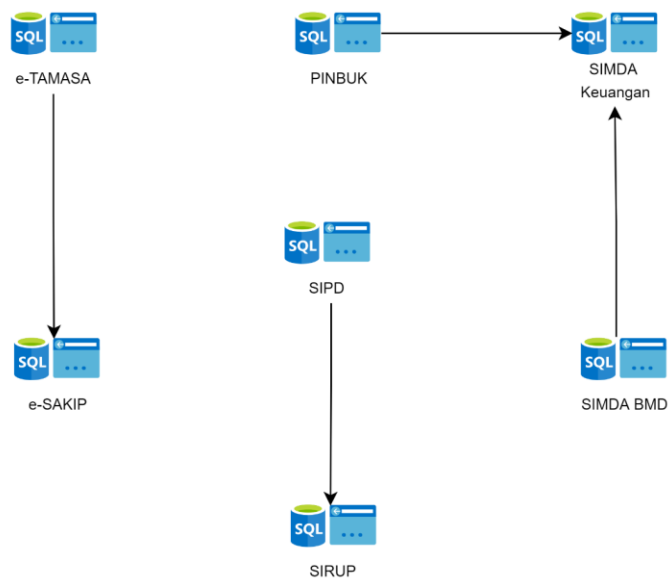
Gambar 3.5.2 Integrasi Antar Aplikasi pada Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Gambar 3.5.5 menunjukkan integrasi antar aplikasi pada bidang pengadaan barang dan jasa dengan unit primernya adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam bidang ini terdapat beberapa aplikasi yang digunakan yaitu Bank Kalsel, PINBUK, LPSE, SIMDA Keuangan, dan SIRUP. Aplikasi PINBUK melakukan pengambilan data dari aplikasi SIMDA Keuangan. Sedangkan Bank kalsel melakukan pengambilan data dari aplikasi PINBUK. Kemudian aplikasi SIRUP melakukan penyajian data yang nantinya data tersebut akan diambil dari aplikasi SIRUP.

Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset

Komponen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset

Unit Primer Bagian Perencanaan dan Keuangan, Badan keuangan dan Aset Daerah



Gambar 3.5.3 Integrasi Antar Aplikasi pada Bidang perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset

Gambar 3.5.6 menunjukkan integrasi antar aplikasi di kabupaten Tapin pada bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset. dalam bidang tersebut terdapat beberapa aplikasi yang digunakan diantaranya adalah PINBUK, SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIRUP, SIPD, e-SAKIP, dan e-TAMASA. Aplikasi SIMDA Keuangan melakukan pengambilan data dari aplikasi SIMDA BMD dan PINBUK, Aplikasi SIRUP melakukan pengambilan data dari aplikasi SIPD. Kemudian aplikasi e-Sakip Melakukan Pengambilan data dari e-TAMASA.

3.6. Arsitektur Infrastruktur

A. Infrastruktur SPBE

Infrastruktur pendukung SPBE yang telah dimiliki oleh Diskominfo Kabupaten Tapin meliputi Co-Location Server, Jaringan Data SKPD/UPT. Berikut ini adalah uraian dari komponen infrastruktur SPBE.

1. Colocation Server

Server aplikasi ditempatkan (co-location) di salah satu perusahaan penyedia layanan co-location server (provider) yang berlokasi di Jakarta.

a. Teknologi

Aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapin sebagian berbasis web dan dapat diakses melalui internet.

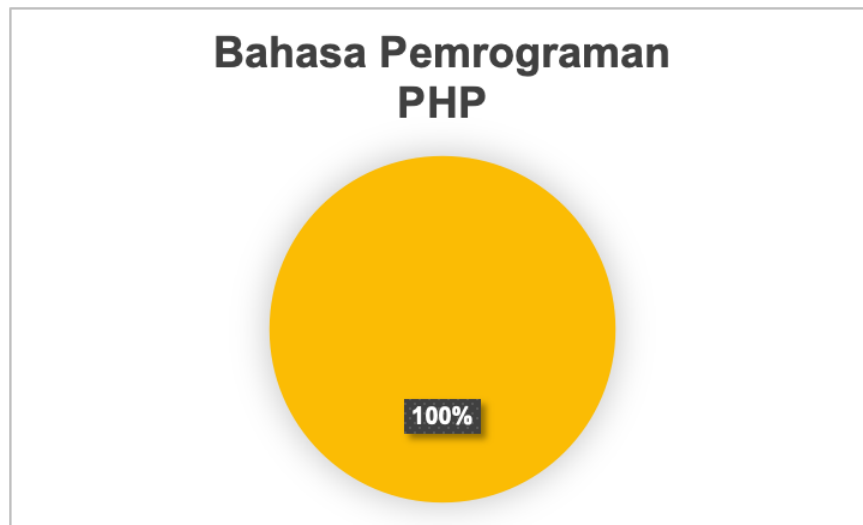
Tabel 3.6.1. Aplikasi dan Teknologi

No	Aplikasi	Alamat URL	Bahasa Pemrograman	Kerja Kerja Pemrograman	Platform CMS	Sistem Operasi Server	Aplikasi Web Server
1	PUPR	https://dinaspuvr.tapinkab.go.id	PHP		WordPress		Apache
2	PKK	http://pkk.tapinkab.go.id	PHP	CodeIgniter		CentOS	Apache
3	TV	https://tv.tapinkab.go.id	PHP		WordPress		
4		https://siappbjp.tapinkab.go.id	PHP				Apache
5	RSUD	https://rsud.tapinkab.go.id	PHP				Apache
6	JDIH	http://jdih.tapinkab.go.id	PHP			CentOS	Apache
7		https://simidibaper.dppkb.tapinkab.go.id	PHP				Apache
8		http://desasalba.tapinkab.go.id	PHP				
9	Perizinan	http://perijinan.tapinkab.go.id/home.php	PHP				Apache
10	KONI	http://koni.tapinkab.go.id	PHP		WordPress		Apache
11		http://dpmpstsp.tapinkab.go.id	PHP		WordPress		Apache

12	Mail	https://webmail.tapinkab.go.id					Apache
13		https://sinar-desa.tapinkab.go.id	PHP	CodeIgniter			Apache
14	Dukcapil	https://dukcapil.tapinkab.go.id					Apache
15	Arsip	https://arsip.bpkad.tapinkab.go.id					Apache
16		https://sirintik.tapinkab.go.id					Apache
17		https://bappelitbang.tapinkab.go.id				CentOS	Apache
18		https://siemondiskominfo.tapinkab.go.id	PHP				Apache
19		https://e-starlitbang.tapinkab.go.id	PHP	CodeIgniter			
20	DPRD	https://dprd.tapinkab.go.id					Apache
21	Disbudpar	https://disbudpar.tapinkab.go.id					Apache
22		https://habar.tapinkab.go.id	PHP		WordPress		Apache
23	Disnaker	https://disnaker.tapinkab.go.id	PHP	Laravel			Apache
24	E-SAKIP	http://esakip.tapinkab.go.id	PHP	CodeIgniter		CentOS	Apache
25	BPKAD	https://bpkad.tapinkab.go.id	PHP		WordPress		Apache
26	SPEDE	https://sipede.tapinkab.go.id	PHP		WordPress		Apache
27	DPRD	https://jdih.dprd.tapinkab.go.id					Apache
28	SETDA	https://setda.tapinkab.go.id					Apache
29	LPSE	http://lpse.tapinkab.go.id/eproc4	PHP		WordPress	Debian	Apache
30	Inspektorat	https://inspektorat.tapinkab.go.id					Apache

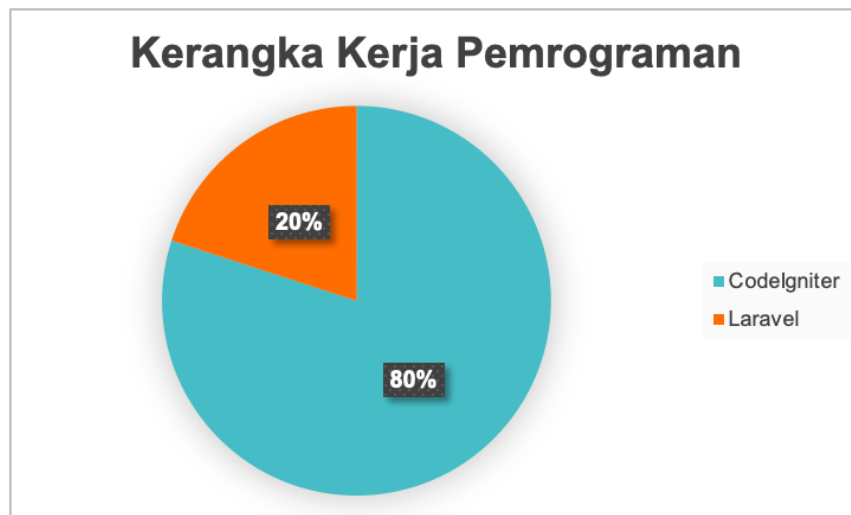
Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh informasi perihal teknologi dari aplikasi yang ada saat ini.

1. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan aplikasi menggunakan PHP.



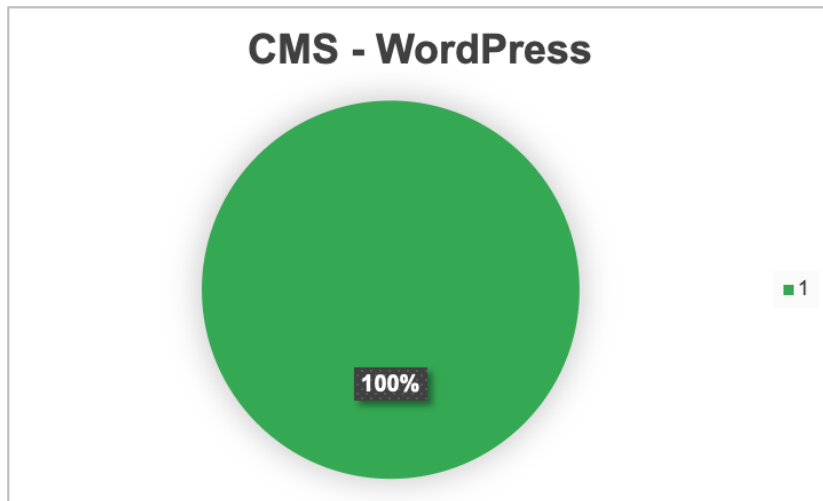
Grafik 3.6.1. Bahasa Pemrograman

2. Kerangka kerja (framework) pemrograman yang digunakan sebagian besar CodeIgniter (80%) disusul oleh Laravel (20%).



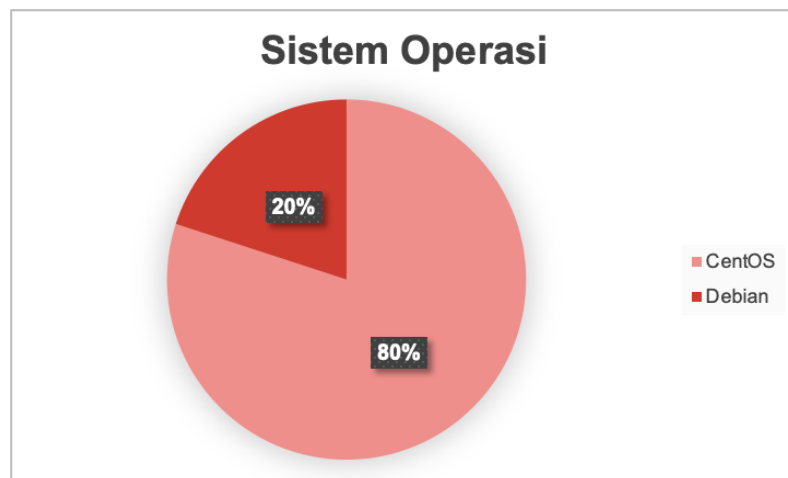
Grafik 3.6.2. Framework Bahasa Pemrograman

3. Content Management System (CMS) yang digunakan oleh beberapa aplikasi web yakni WordPress.



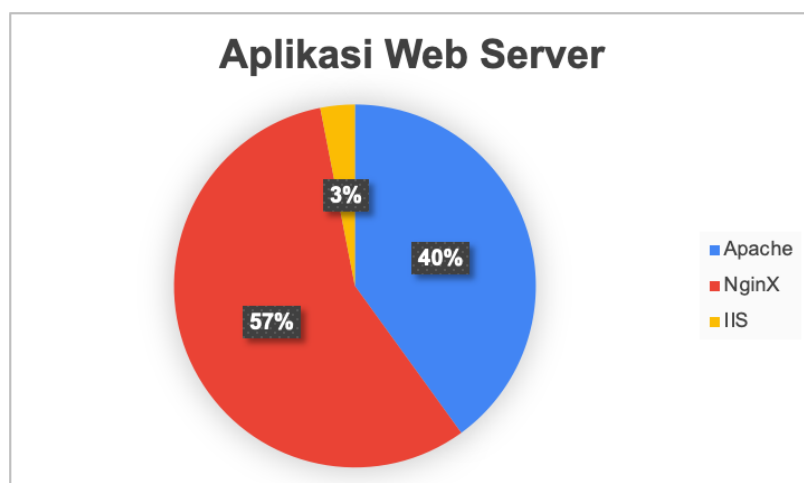
Grafik 3.6.3. Platform Content Management System (CMS)

4. Sistem Operasi Server yang digunakan oleh aplikasi web dari Distro Linux yakni CentOS (80%), dan Debian (20%).



Grafik 3.6.4. Sistem Operasi

5. Seluruh aplikasi Web Server yang digunakan adalah Apache (100%).



Grafik 3.6.5 Aplikasi Web Server

2. Jaringan Intra Daerah

Jaringan intra pemerintah adalah jaringan data yang menghubungkan perangkat komputer, printer, server, dan lainnya antara Pusat Data dengan SKPD/UPT. Kondisi saat ini, Pemerintah Kabupaten Tapin belum memiliki jaringan intra pemerintah. Setiap SKPD/UPT menyelenggarakan jaringan data secara mandiri meliputi jaringan lokal (LAN), jaringan nirkabel (WiFi), dan jaringan internet.

a. Jaringan Data Lokal (LAN) Diskominfo

Kondisi saat ini jaringan intra daerah masih dalam tahap pengembangan. Setiap SKPD/UPT memiliki dan mengelola jaringan datanya secara mandiri termasuk akses internet.

b. Jaringan Internet

Kondisi saat ini setiap SKPD/UPT menyediakan akses internet secara mandiri dengan menggunakan provider seperti Telkom dengan produk Indihome.

c. Jaringan Nirkabel (WiFi)

Kondisi saat ini setiap SKPD/UPT menyediakan akses jaringan nirkabel (WiFi) secara mandiri yang terhubung ke akses internet.

d. Perangkat Jaringan

Kondisi saat ini setiap SKPD/UPT menyediakan perangkat jaringan secara mandiri yang meliputi switch akses, dan kabel jaringan.



Gambar 3.6.1. Perangkat Access Point Jaringan Nirkabel



Gambar 3.6.2. Rack Perangkat Jaringan

3. Sistem Penghubung Layanan Daerah

Sistem penghubung layanan pemerintah adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dan dengan pemerintah pusat. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Tapin menggunakan teknologi Application Programming Interface atau API yakni sebuah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, baik dari platform yang sama maupun lintas platform.

Kondisi saat ini, Diskominfo Kabupaten Tapin sedang dalam tahap pengembangan integrasi aplikasi dengan menggunakan teknologi API.

3.7. Arsitektur Keamanan

Kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Tapin belum memiliki kebijakan, pedoman, standar teknis, dan prosedur keamanan SPBE.

Bab IV

Analisa

Kesenjangan SPBE

4.1. Analisa Kesenjangan SPBE

Untuk mengetahui kebutuhan mendasar dari Pemerintah Kabupaten Tapin maka perlu dilakukan analisis kesenjangan agar pengembangan SPBE yang dilakukan berdasarkan kondisi eksisting dan dibandingkan dengan kondisi ideal. Berikut merupakan detail perbandingan kondisi eksisting dengan kondisi ideal yang seharusnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapin.

Tabel 4.1.1 Perbandingan Kondisi Eksisting dan Kondisi Ideal

#	Domain	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal
1	Kebijakan	Belum adanya kebijakan SPBE mengenai (arsitektur SPBE, manajemen data, layanan jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, keamanan informasi, dan audit TIK).	Adanya kebijakan SPBE mengenai (arsitektur SPBE, manajemen data, layanan jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, keamanan informasi, dan audit TIK).
2	Manajemen	Belum adanya penerapan manajemen SPBE mengenai (manajemen risiko, manajemen data, manajemen keamanan informasi, manajemen layanan, manajemen SDM, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan).	Adanya penerapan manajemen SPBE mengenai (manajemen risiko, manajemen data, manajemen keamanan informasi, manajemen layanan, manajemen SDM, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan).
3	Manajemen	Belum melakukan Audit TIK yang terdiri atas Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, Audit Keamanan Informasi.	Melakukan Audit TIK yang terdiri atas Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, Audit Keamanan Informasi.
4	Data	Belum ada awareness mengenai Forum Satu Data Indonesia.	Adanya awareness mengenai Forum Satu Data Indonesia.
5	Aplikasi	Beberapa aplikasi internal belum menyediakan web service agar terintegrasi dengan aplikasi lain.	Adanya Integrasi antar aplikasi internal pemerintah kabupaten Tapin
6	Aplikasi	Beberapa aplikasi dari pusat belum menyediakan web service agar terintegrasi dengan Aplikasi Tapin.	Adanya Integrasi antar aplikasi dari Pusat dengan daerah.
7	Proses Bisnis	Belum ada pemetaan proses bisnis dan beberapa proses bisnis Pemerintah Kabupaten Tapin belum terdigitalisasi dan terintegrasi.	Adanya peta proses bisnis dan layanan dan proses bisnis Pemerintah Kabupaten Tapin terdigitalisasi dan terintegrasi.
8	Aplikasi	Beberapa aplikasi tidak ada dokumentasi aplikasi dari pihak ketiga.	Kedepan dalam proses pengembangan aplikasi dengan pihak ketiga harus menyertakan dokumentasi aplikasi dari pihak ketiga.
9	Infrastruktur (Pusat Data)	Tidak ada ruang server atau Pusat Data	Tersedianya ruang server atau pusat data sebagai pusat lokasi server - server SKPD/UPT.

#	Domain	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal
			Tersedia ruang untuk penempatan server – server pengembangan (<i>development</i>), dan perangkat jaringan.
10	Infrastruktur (Pusat Data)	Server aplikasi belum dilakukan backup maupun replikasi.	Perlunya dilakukan proses backup terhadap server aplikasi di lokasi yang berbeda dengan pusat data.
12	Infrastruktur (Jaringan Intra Pemerintah)	Belum tersedianya jaringan intra pemerintah daerah yang menghubungkan antara SKPD/UPT dengan Pusat Data/ Pusat Operasi Jaringan (<i>Network Operation Center</i>). Pengembangan jaringan dilakukan secara mandiri oleh SKPD/UPT.	<p>Pengadaan jaringan intra pemerintah daerah Kabupaten Tapin yang menghubungkan antara SKPD/UPT dengan NOC meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Jaringan LAN dan nir kabel SKPD/UPT. · Jaringan Internet untuk akses internet pengguna dan server. · Jaringan Kampus (Campus Network) yang menghubungkan jaringan SKPD/UPT di kompleks kantor pemerintah Kabupaten Tapin. · Jaringan <i>Metropolitan Area Network</i> (MAN) yang menghubungkan antara SKPD/UPT dengan NOC. · Jaringan <i>Wide Area Network</i> (WAN) yang menghubungkan antara NOC dengan Kementerian/Lembaga, dan DRC. <p>Operasional jaringan intra pemerintah daerah dilakukan oleh Diskominfo.</p>
19	Infrastruktur (Sistem Penghubung Layanan Daerah)	Sistem Penghubung Layanan Daerah sedang dalam tahap pengembangan dengan menggunakan teknologi API (<i>Application Programming Interface</i>).	<p>Pengembangan server:</p> <ul style="list-style-type: none"> · API Gateway Internal untuk melayani integrasi antara aplikasi internal kabupaten Tapin melalui koneksi intranet. · API Gateway Eksternal untuk melayani integrasi antara aplikasi internal Kabupaten Tapin dengan Kementerian/Lembaga melalui koneksi internet.
20	Keamanan (Arsitektur Keamanan SPBE)	Pemerintah Kabupaten Tapin belum memiliki Kebijakan atau Pedoman Keamanan Informasi.	Pemerintah Kabupaten Tapin perlu membuat kebijakan atau pedoman keamanan informasi yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

#	Domain	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal
21	Keamanan (Keamanan Data dan Informasi)	Pemerintah Kabupaten Tapin belum memiliki standar teknis dan prosedur keamanan data dan informasi.	Pemerintah Kabupaten Tapin perlu membuat standar teknis dan prosedur keamanan data dan informasi yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
22	Keamanan (Keamanan Aplikasi SPBE)	Pemerintah Kabupaten Tapin belum memiliki standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi SPBE.	Pemerintah Kabupaten Tapin perlu membuat standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi SPBE yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
23	Keamanan (Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)	Pemerintah Kabupaten Tapin belum memiliki standar teknis dan prosedur keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.	Pemerintah Kabupaten Tapin perlu membuat standar teknis dan prosedur keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
24	Keamanan (Keamanan Jaringan Intra Pemerintah)	Pemerintah Kabupaten Tapin belum memiliki standar teknis dan prosedur keamanan jaringan intra pemerintah.	Pemerintah Kabupaten Tapin perlu membuat standar teknis dan prosedur keamanan jaringan intra pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
25	Keamanan (Keamanan Pusat Data)	Pemerintah Kabupaten Tapin belum memiliki standar teknis dan prosedur keamanan Pusat Data	Pemerintah Kabupaten Tapin perlu membuat standar teknis dan prosedur keamanan Pusat Data yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.



Pemerintah Kabupaten Tapin
2022